
DAFTAR ISI

<i>Soft Diplomacy</i> SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010 <i>Mohamad Rosyidin</i>	3-22
Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Uni Eropa, <i>Good Governance</i> , dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru <i>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar</i>	23-46
Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia Belanda (1909-1940) <i>Achmad Sunjayadi</i>	47-66
Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan <i>Paulus Rudolf Yuniarto</i>	67-95
Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik: Perspektif Kajian Wilayah <i>Siswanto</i>	96-107

Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010

Mohamad Rosyidin

Abstract

This paper seeks to interpret and evaluate President Yudhoyono's diplomatic approach towards Malaysia regarding the captured of three Indonesian officials in 2010 by Malaysian Maritime Police. It is interesting since violation of state sovereignty had triggered mass protest in Indonesia, the executive ignored the public demand. Rather than using coercive approach, the Indonesian elite employed soft diplomacy to engage Malaysia towards win-win solutions. This paper argues that Yudhoyono's foreign policy towards Malaysia in this context is counterproductive to increase nation's self-esteem. Yudhoyono's soft diplomacy only matters for short term interest but not for long term one. This paper argues that the strategy chosen by President Yudhoyono is rooted from his misconception of soft power. This paper also suggest that soft power alone is insufficient to serve national interest; it need to be combine with hard power. As such, the effective diplomacy is smart power; the combination of soft and hard power which is compatible to the Second Principle of Pancasila.

Keywords: soft diplomacy, soft power, SBY's foreign policy, smart power

Pendahuluan

Hubungan Indonesia-Malaysia ibarat *roaller-coaster* yang selalu naik-turun. Terkadang hubungan negara serumpun itu hangat, terkadang memanas. Salah satu peristiwa yang membuat hubungan kedua negara memanas adalah insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi laut Malaysia pada 13 Agustus 2010 lalu. Ketiga petugas itu sebelumnya telah menahan tujuh nelayan Malaysia karena tertangkap basah sedang mencuri ikan di perairan Bintan, Indonesia. Ketiga petugas itu pun mendapat perlakuan buruk dari petugas Malaysia. Anehnya, pada saat opini publik begitu kencang mengecam tindakan Malaysia itu dan menuntut respon tegas dari pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru memakai pendekatannya sendiri. Alih-alih melakukan protes keras

atau mengirim pasukan militer untuk menggertak Malaysia, Presiden SBY memilih langkah diplomasi untuk meredam ketegangan antar kedua negara. Setelah pemerintah Indonesia mengembalikan tujuh nelayan Malaysia, kasus pun tuntas dengan dikembalikannya ketiga petugas KKP ke tanah air.

Walaupun pendekatan diplomatik SBY telah berhasil menurunkan tensi hubungan Indonesia-Malaysia, publik kecewa karena pemerintah dianggap terlalu 'ramah' terhadap Malaysia yang sering berbuat ulah. Pemerintah dituduh tidak punya wibawa dan harga diri di hadapan Malaysia. Ketidakmampuan pemerintah bersikap tegas kepada Malaysia mencerminkan rendahnya posisi tawar Indonesia di hadapan Malaysia. Padahal pihak Malaysia menantang Indonesia dengan melontarkan kecaman keras atas tindakan publik Indonesia mengobarkan kampanye anti-Malaysia. Menanggapi demonstrasi anti-Malaysia yang marak terjadi di Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman mengatakan, "Malaysia adalah bangsa yang penyabar. Harus ada tindakan untuk memastikan bahwa demonstrasi bisa dikendalikan sebelum bangsa Malaysia kehilangan kesabaran" (vivanews 2010). Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai kesiapan Malaysia untuk berkonflik dengan Indonesia. Namun dalam menanggapi situasi konfliktual seperti itu, pemerintah berjalan sendirian dalam memutuskan kebijakan luar negeri apa yang akan diambil terlepas dari aspirasi publik.

Tulisan ini hendak menafsirkan dan mengevaluasi kebijakan luar negeri Presiden SBY dalam kasus penangkapan tiga petugas KKP oleh petugas Malaysia. Secara spesifik, tulisan ini mengkaji strategi kebijakan luar negeri SBY dalam konteks konflik hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Di samping itu, tulisan ini menawarkan masukan berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait bagaimana seharusnya memilih strategi diplomasi yang tepat khususnya dalam situasi konfliktual.

Tulisan ini mengaplikasikan konsep *power* dalam studi Hubungan Internasional untuk mendeskripsikan perilaku politik luar negeri SBY terhadap Malaysia. Untuk menganalisis strategi diplomasi SBY, tulisan ini mengaplikasikan pemikiran Joseph Nye tentang tipologi *power* yaitu *soft power*, *hard power*, dan *smart power* (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Argumen dalam tulisan ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber data pendukung terutama digali dari pendapat para ahli yang tulisannya tersebar di berbagai karya ilmiah baik berupa buku dan jurnal ilmiah dan pernyataan para pembuat kebijakan dalam bentuk teks pidato dan pernyataan-pernyataan di media massa. Meskipun sebagian besar data merupakan data kualitatif, namun tulisan ini juga memasukkan data kuantitatif sebagai data pendukung.

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa strategi kebijakan luar negeri yang dipakai SBY dalam menghadapi situasi konfliktual dengan Malaysia kurang tepat dan cenderung berdampak negatif terhadap wibawa dan harga

diri bangsa. Pemerintah tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang diambil dalam jangka panjang. Akar dari pilihan strategi diplomasi tersebut adalah kepercayaan yang terlalu berlebihan pada *soft power* yang dianggap sarana paling efektif dalam hubungan internasional abad-21. Tulisan ini berpendapat bahwa kesalahpahaman pemerintah terhadap konsep *soft power* turut berperan dalam pemilihan strategi diplomasi yang kurang tepat. *Soft power* bukan satu-satunya alat diplomasi dan terkadang tidak efektif dalam situasi konfliktual.

Tulisan ini mengajukan saran bahwa dalam menyikapi tindakan negara lain yang cenderung konfrontatif, pemerintah semestinya mengambil strategi kebijakan luar negeri yang tepat tanpa mengorbankan kewibawaan dan harga diri bangsa. Dalam kaitan ini, penulis tidak menganjurkan menggunakan strategi yang bersifat konfrontatif-emosional, melainkan strategi yang berhati-hati (*prudent*) dalam pengertian strategi itu nantinya tidak beresiko melemahkan wibawa dan harga diri bangsa di hadapan bangsa lain. Menurut para penganut aliran realisme politik, diplomasi yang *prudent* berarti diplomasi yang meletakkan konsekuensi politik sebagai parameter rasionalitas kebijakan luar negeri. Konsekuensi politik ini seharusnya menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan sebelum keputusan penting diambil. Mengabaikan pertimbangan ini berpotensi memperlemah posisi tawar Indonesia di hadapan negara lain.

Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan menjelaskan konsep *power* dan tipologinya untuk menjelaskan diplomasi sebagai strategi pelaksanaan politik luar negeri. Bagian kedua akan mengaplikasikan konsep *soft power* pada kasus hubungan Indonesia-Malaysia terkait penangkapan tiga petugas KKP oleh petugas Malaysia. Bagian ketiga adalah kesimpulan dan rekomendasi.

Kerangka Teori: Tipologi *power* sebagai alat diplomasi

Diplomasi senantiasa berhubungan dengan strategi penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Kekuasaan atau dalam bahasa ilmu politik '*power*' adalah kemampuan membuat pihak lain melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh pihak tersebut (Dahl 1957: 202-203). Morgenthau (1978: 30) mengatakan bahwa, "Ketika kita membicarakan tentang kekuasaan, yang kita maksud adalah pengendalian seseorang terhadap pikiran dan tindakan orang lain." Dalam pengertian yang berbeda, *power* bisa berarti sumberdaya (*resources*) yang berguna untuk mencapai tujuan dalam proses tawar-menawar atau negosiasi. Oleh sebab itu, *power* dalam politik internasional ibarat uang dalam ekonomi pasar (Wolfers 1962: 105). Ibarat dalam proses jual-beli, baik penjual maupun pembeli dituntut piawai menggunakan *power* agar mampu menghindari kerugian dan memperbesar keuntungan. Begitu

pula dengan negarawan, kepiawaian menggunakan *power* ketika melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain sangat menentukan keberhasilan politik luar negerinya. Negarawan yang kurang piawai menggunakan *power* akan menyebabkan negaranya menderita kerugian dalam hal pencapaian kepentingan nasional. Sebaliknya, negarawan yang piawai memainkan *power*-nya, maka negara lain akan berpikir dua kali untuk mempermainkan negara tersebut. Pendek kata, *power* menempati posisi sentral dalam dunia diplomasi.

Sebagai konsep yang abstrak, *power* tidak dapat diketahui hanya dari indikator-indikator yang bersifat material. Hans Morgenthau dalam risalah klasiknya, *Politics Among Nations* (Morgenthau 1978: 117) membagi kategori *power* menjadi dua macam yaitu *power* yang relatif stabil dan *power* yang cenderung berubah atau tidak konstan. *Power* yang relatif stabil adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat material dan dapat diukur misalnya luas wilayah (geografi), jumlah penduduk (demografi), kapasitas industri, kekuatan militer, serta potensi sumberdaya alam. Sedangkan *power* yang cenderung berubah adalah sumberdaya-sumberdaya yang bersifat imaterial dan tak dapat diukur seperti karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Kedua jenis *power* tersebut tidak dapat direduksi satu sama lain. Artinya, *power* yang relatif stabil tidak lebih penting daripada *power* yang cenderung berubah dan sebaliknya. Keduanya merupakan elemen vital kekuatan nasional sebuah negara supaya dapat memenangkan kompetisi dan kerjasama (*discord and collaboration*) di percaturan politik internasional.

Studi paling mendalam dan komprehensif mengenai *power* dilakukan oleh Joseph Nye. Karya-karyanya banyak membahas tentang hakekat *power* dalam hubungan luar negeri. Studi Nye mengenai *power* sebenarnya dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Amerika Serikat mengingat Nye pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Intelijen Nasional. Akan tetapi, buah karyanya telah dibaca secara luas oleh para pemimpin dunia sehingga pemikirannya sangat mempengaruhi politik luar negeri negara-negara lain di luar Amerika.

Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah mengenai tipologi *power*. Nye membagi *power* menjadi tiga macam yaitu *hard power*, *soft power*, dan *smart power* (Nye 2004; 2009; 2011a; 2011b). Sebetulnya pembagian tersebut bukan gagasan yang sama sekali baru karena sebelumnya sudah disebutkan bahwa Hans Morgenthau juga membagi *power* menjadi dua macam. Bedanya adalah tipologi *power* versi Morgenthau hanya berdasarkan pada sifat dari sumber-nya, sedangkan tipologi Nye berdasarkan pada sifat dari penggunaannya. Dengan kata lain, tipologi Morgenthau dimaksudkan untuk membagi bermacam-macam sumber atau elemen kekuatan nasional suatu negara

(*elements of national power*), sedangkan tipologi Nye dimaksudkan untuk membagi cara kerja *power* dalam menghasilkan tujuan yang dikehendaki.

Secara sederhana, *hard power* dimaknai sebagai penggunaan sarana-sarana koersi untuk mencapai tujuan. Memerintahkan orang lain untuk melakukan apa yang seseorang inginkan adalah elemen dari *hard power*. Orang tersebut dapat melakukannya karena ia memakai pendekatan 'imbalan dan hukuman' (*reward and punishment*) atau strategi 'tongkat dan wortel' (*stick and carrot*). Jika orang yang diperintahkan tersebut bersedia melakukan apa yang diinginkan oleh yang memerintahkannya, maka orang itu akan diberi imbalan. Akan tetapi jika menolak, maka akan diberi hukuman. Aspek psikologis memainkan peran dalam *hard power*. Orang itu menyadari bahwa ia sedang diperintah (di bawah tekanan). Sehingga dalam situasi ini, relasi antara pihak satu dan pihak lain bersifat hirarkis atau patron-klien. Dalam hubungan internasional, sumber *hard power* adalah kekuatan militer dan ekonomi. Para penganut teori realis percaya bahwa kedua sumberdaya material tersebut adalah elemen terpenting kekuatan nasional suatu negara.

Berbeda dengan *hard power* yang bersifat koersif, *soft power* lebih menekankan pada pendekatan *co-optive* (persetujuan). Artinya, pihak lain melakukan apa yang kita inginkan bukan karena ia berada dalam tekanan, melainkan karena ia setuju dengan pemikiran atau tindakan kita sehingga ia bersedia mengikutinya.¹ Strategi *soft power* bukan memberi imbalan atau hukuman, melainkan 'menciptakan situasi' atau *agenda setting*. Ketika pihak lain tertarik atau terkesan dengan gagasan atau perilaku kita, maka hal itu dapat mempengaruhi cara ia berpikir dan merumuskan tujuan yang pada gilirannya mempengaruhi tindakannya. Analogi yang digunakan Nye (1990: 181) adalah orang tua akan lebih efektif dalam mengontrol anak-anak remajanya jika ia mampu membentuk keyakinan dan pikiran anak-anaknya. *Soft power* sama pentingnya dengan *hard power*. Bila suatu negara mampu memperlihatkan legitimasi kekuasaannya di mata negara lain, maka ia dapat terhindar dari sikap resisten atau melawan dari negara lain. Jika budaya dan ideologi yang ia anut menarik, pihak lain akan mengikutinya. Jika ia mampu mempromosikan norma internasional yang konsisten dengan masyarakatnya, maka ia tidak perlu berubah (Nye 1990: 167). Justru pihak lain akan mendukung dan mengikuti norma tersebut. Jadi negara tak perlu menguras banyak biaya sebagaimana *hard power* untuk membuat pihak lain mengikutinya.

1 Konsep *soft power* mirip dengan konsep hegemoni dari Antonio Gramsci. Menurut perspektif Gramscian, hegemoni secara bebas dapat dimaknai sebagai "manipulasi ideologi oleh kelas penguasa sehingga seolah-olah menguntungkan semua pihak". Ini berbeda dengan konsep *soft power* yang tidak mengandung manipulasi tetapi "promosi nilai-nilai, ideologi, budaya, dan norma untuk menarik pihak lain". Namun begitu, keduanya sama-sama menekankan pada strategi untuk menguasai. Konsep *soft power* juga berbeda dengan konsep Ideological State Apparatus (ISA) dari Louis Althusser yang dimaknai sebagai *institusi-institusi sosial* yang melanggengkan ideologi pemerintah.

Meskipun demikian, *soft power* hendaknya dibedakan dengan pengaruh (*influence*). Seseorang mampu mempengaruhi orang lain tetapi belum tentu mempunyai kekuasaan atas orang tersebut. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai kekuasaan belum tentu mampu mempengaruhi orang lain (*powerless*). Morgenthau (1978: 31) mencontohkan, seorang menteri luar negeri bisa mempengaruhi kebijakan seorang presiden namun ia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada presiden, sebaliknya presiden mampu memaksakan kehendaknya kepada menteri luar negeri semata-mata karena ia punya otoritas. Nye (2004: 6) mengatakan bahwa pengaruh bisa saja muncul dari *hard power*, sedangkan *soft power* lebih dari sekedar pengaruh. *Soft power* lebih dari sekedar persuasi atau kemampuan memerintahkan pihak lain menggunakan kekuatan argumen. *Soft power* adalah kemampuan membuat pihak lain tertarik sehingga ia akan memberikan persetujuannya. Persetujuan berarti kerelaan untuk menerima. Secara psikologis pihak yang dikenai *soft power* tidak menyadari kalau dia sedang dikuasai. Itulah yang diingatkan oleh Nye pasca serangan teroris 11 September 2001. Bila Amerika terlalu mengedepankan arogansi dan intoleransi, maka Amerika akan semakin rapuh (Nye 2002: xvi).

Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, *soft power* adalah instrumen diplomasi yang semakin diperlukan. Napoleon Bonaparte pernah berujar, "Hanya ada dua kekuatan di dunia, pedang dan pikiran. Di masa depan pedang akan dikalahkan oleh pikiran" (Heinl 1966: 318). Perkataan Napoleon tersebut menemukan relevansinya dalam konteks politik internasional abad-21 seiring semakin banyak negara yang memanfaatkan *soft power* daripada *hard power* yang mengedepankan cara-cara militer. Diplomasi kebudayaan merupakan contoh pemanfaatan *soft power* dalam mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Banyak negara mulai mempromosikan beragam aset budaya yang dimilikinya untuk menarik perhatian dunia internasional. Jepang dan Korea Selatan adalah sedikit negara yang cukup berhasil memanfaatkan budaya mereka untuk mendukung tujuan kebijakan luar negerinya.

Meskipun *soft power* sangat cocok dipakai dalam iklim globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat, ia bukan solusi bagi semua persoalan yang dihadapi negara. Tantangan abad-21 tidak hanya keamanan non-tradisional, namun ancaman tradisional dari negara lain tetap sangat besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan *hard power*. Ia tetap relevan sebagai penyokong kesuksesan *soft power*. Kombinasi antara *hard power* dan *soft power* disebut *smart power* (Nye 2011: xiii). Pakar diplomasi S. L. Roy (1984: 19) menyatakan bahwa, "Hakikat diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrumen diplomasi, termasuk penggunaan kekuatan." Pernyataan ini mengimplikasikan kapan pun negosiasi damai dilaksanakan, kekuatan koersif berdiri di belakang

(siap siaga), dan bila dibutuhkan, ia dibawa ke depan sebagai ancaman, jika ancaman gagal kekuatan koersif digunakan secara terbuka. Kekuatan militer sebagai sarana pemaksa atau alat kekerasan merupakan bagian integral dari diplomasi dalam dunia yang anarki (Roy 1984: 20). Jadi *smart power* adalah kunci sukses diplomasi yang cerdas (*smart diplomacy*). Mengedepankan *hard power* saja dapat memicu kebencian dan permusuhan dari negara lain. Mengedepankan *soft power* saja dapat menimbulkan resiko jangka panjang lemahnya posisi tawar di hadapan negara lain. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam hubungan antar negara harus dimaknai dalam kerangka penggunaan *smart power* secara canggih.

Soft power dan diplomasi SBY

Kasus penangkapan tiga petugas KKP oleh Polisi Maritim Malaysia di perairan Bintan memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berujung pada tindakan saling kecam. Kemarahan publik memang beralasan sebab selain telah melanggar kedaulatan karena memasuki wilayah Indonesia, tindakan aparat Malaysia yang menangkap tiga petugas KKP tersebut disertai dengan kekerasan. Menanggapi tindakan 'kurang ajar' Malaysia tersebut, opini publik menghendaki ketegasan dari pihak Indonesia. Tuntutan itu memang terkesan emosional dan reaktif. Morgenthau (1978: 265) pernah menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seringkali tidak sejalan dengan opini publik. Namun secara normatif, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya memberikan tindakan tegas karena apa yang dilakukan oleh Malaysia itu sudah mengancam kepentingan nasional Indonesia, khususnya menyangkut kedaulatan dan perlindungan terhadap warga negara.

Awalnya pemerintahan SBY mengajukan nota protes sebagai reaksi atas peristiwa tersebut. Namun protes Indonesia ternyata tidak diiringi dengan tindakan tegas pemerintahan SBY. Pada akhirnya, SBY memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam pidatonya di Markas Besar TNI, SBY mengemukakan alasan mengapa Indonesia memilih pendekatan diplomatik. *Pertama*, faktor sejarah. "Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat, dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun" (detik 2010). Di samping itu, diplomasi penting karena untuk menjaga keutuhan ASEAN. *Kedua*, faktor strategis. Ada sekitar dua juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia serta tiga belas ribu pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia. Wisatawan Malaysia di Indonesia adalah ketiga terbesar di dunia. Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US\$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US\$ 534 juta. Jumlah

perdagangan kedua negara telah mencapai US\$ 11,4 miliar pada tahun 2009 (Yudhoyono 2010).

Tabel-tabel di bawah ini memperkuat alasan SBY di balik keputusan memilih strategi diplomatik ketimbang strategi koersi terhadap Malaysia. Dari aspek perdagangan, pada tahun 2009 neraca perdagangan Indonesia-Malaysia mengalami defisit dalam sektor migas. Meskipun demikian, surplus perdagangan terjadi dalam sektor non-migas. Sementara dari aspek penempatan tenaga kerja migran, Malaysia merupakan negara tujuan terbesar kedua setelah Arab Saudi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 123.886 orang. Lalu dari aspek investasi langsung, Malaysia menempati peringkat ke-10 yang pada tahun 2009 saja mencakup 75 proyek dengan total investasi sebesar \$129.3 juta. Pendek kata, Malaysia terlalu menguntungkan bagi Indonesia sehingga SBY memilih pendekatan lunak untuk menjaga agar keuntungan tadi tidak lepas dari Indonesia.

Tabel 1. Neraca perdagangan Indonesia-Malaysia tahun 2009 (ribu US\$)

URAIAN	2009
TOTAL PERDAGANGAN	12.500.255,0
MIGAS	3.679.653,2
NON MIGAS	8.820.601,8
EKSPOR	6.811.823,5
MIGAS	1.175.451,8
NON MIGAS	5.636.371,8
IMPOR	5.688.431,5
MIGAS	2.504.201,5
NON MIGAS	3.184.230,0
NERACA PERDAGANGAN	1.123.392,1
MIGAS	-1.328.749,7
NON MIGAS	2.452.141,8

Sumber: kemendag.go.id

Tabel 2. Penempatan Per Tahun Per Negara (10 Besar Negara Penempatan)

No	Negara Penempatan	Tahun										Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
1	Saudi Arabia	281,087	257,217	234,644	276,633	228,890	137,643	11,814	1,427,928			
2	Malaysia	219,658	222,198	187,123	123,886	116,056	134,108	46,296	1,049,325			
3	Taiwan	45,706	50,810	59,522	59,335	62,048	73,498	30,669	381,588			
4	Singapore	28,661	37,496	21,807	33,077	39,623	47,781	20,430	228,875			
5	United Emirate Arab (UAE)	22,685	28,184	38,092	40,391	37,337	39,857	14,274	220,820			
6	Hongkong	20,100	29,973	30,204	32,417	33,262	50,283	18,237	214,476			
7	Kuwait	24,600	25,756	29,218	23,041	563	2,723	693	106,594			
8	Qatar	7,980	10,449	8,582	10,010	13,559	16,578	8,476	75,634			
9	Yordania	10,978	12,062	11,155	10,932	5,695	134	29	50,985			
10	Oman	5,210	7,150	8,309	9,700	9,259	7,292	3,375	50,295			

Sumber: BNP2TKI

Tabel 3. Peringkat 20 Besar Realisasi FDI Menurut Negara (2009)

No	Negara/Country	Proyek/ Project	Nilai/Value (US\$ Juta/Us\$ Million)	%
1	Singapura/Singapore	189	4.341,0	40,1
2	Belanda/Netherlands	32	1.198,7	11,1
3	Jepan/Japan	124	678,9	6,3
4	Korea Selatan/South Korea	186	624,6	5,8
5	Inggris/United Kingdom	61	587,7	5,4
6	Seychel/Seychelles	4	322,2	3,0
7	Amerika Serikat/United States of America	27	171,5	1,6
8	Mauritius/Mauritius	6	159,5	1,5
9	Swiss/Switzerland	11	132,1	1,2
10	Malaysia/Malaysia	75	129,3	1,2
11	Jerman/Germany	18	103,9	1,0
12	Australia/Australia	26	79,7	0,7
13	R.R. China/People's Republic China	37	65,5	0,6
14	Muang Thai/Thailand	4	51,4	0,5
15	Italia/Italy	11	41,1	0,4
16	Taiwan/Taiwan	36	31,7	0,3
17	Perancis/France	12	29,0	0,3
18	India/India	31	26,2	0,2
19	Hongkong/Hong Kong (SAR)	18	21,0	0,2
20	Emirat Arab/Arab Emirat	3	15,5	0,1
21	Gabungan Negara/Joint Countries	310	2.004,7	18,5
Jumlah/Total		1.221	10.815,2	100,0

Sumber: BKPM dalam CDMI Consulting

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, Indonesia perlu berpikir tentang resiko yang akan ditanggung Indonesia jika pemerintah nekat menggunakan pendekatan koersif kepada Malaysia. Menurut peneliti LIPI Jaleswari Pramodhawardani, Malaysia adalah anggota aliansi Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama dengan Singapura, Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Menurut perhitungannya, jika Indonesia mengambil sikap keras terhadap Malaysia maka Indonesia akan dikeroyok oleh empat negara tersebut (vivanews 2010). Pertimbangan pemerintah memilih tindakan lunak terhadap Malaysia didorong oleh alasan moral dan rasional.

Pendekatan SBY dalam menyelesaikan persoalan itu dikritik banyak kalangan. Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, "Apa kita harus berbaikan ketika tiga petugas KKP kita ditangkap. Kalau ingin baik dengan semua orang, menurut pengalaman, kita justru tidak dihargai, karena tidak punya pendirian" (tribunnews 2010). Komisi I DPR RI yang membidangi masalah luar negeri juga mengkritik kebijakan yang diambil SBY sebagai tindakan yang merendahkan harga diri bangsa. Anggota Komisi I Sidharto

Danusubroto mengatakan, "Ini bukan soal diplomasi, tapi sudah menginjak-injak harga diri kita" (tribunnews2010). Hikmahanto Juwana juga mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa pelecehan yang dilakukan oleh petugas Malaysia kepada petugas KKP menciptakan kesan arogansi Malaysia di mata publik Indonesia (kompas 2010). Kritik tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara aspirasi rakyat dan respon pemerintah. Menurut peneliti CSIS Philip Vermonte, pemerintah adalah 'pemimpin', bukan 'budak' opini publik (liputan6 2010). Apapun kritik dan kecaman yang dilayangkan kepada pemerintah, diplomasi santun (*soft diplomacy*) tetap menjadi gaya diplomasi khas seorang SBY.

Soft diplomacy SBY berakar dari pandangan bahwa solusi untuk menyelesaikan masalah hubungan antar negara tidak bisa dan tidak akan berhasil jika menggunakan cara-cara keras atau paksaan. Pada pidato pembukaan 13th General Assembly of The Veterans Confederations of ASEAN Countries, 27 Juli 2010, SBY mengatakan abad-21 berbeda dari abad-20 karena abad-21 adalah abad *soft power* (Faizasyah 2012: 58). *Soft power* dianggap lebih efektif ketimbang *hard power*. SBY (2008) mengungkapkan pentingnya penggunaan strategi *soft power* ini di hadapan para diplomat Indonesia.

Dan kemudian berkali-kali saya sampaikan mari kita gunakan *soft power*. *Soft power*, sering, sangat atau lebih efektif dibandingkan dengan *hard power*. Seelok-eloknya kita menyelesaikan masalah dengan mengedepankan *soft power* dan kita buktikan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negeri pun dengan *soft power approach* ternyata banyak yang lebih berhasil dibandingkan menggunakan pendekatan tradisional seperti dulu, *security approach* yang berlebihan.

Senada dengan SBY, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (2010) juga mengatakan bahwa *soft power* akan menempati posisi sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Ketika berbicara di Universitas Harvard tahun 2009 lalu, SBY mengulangi komitmennya terhadap *soft power*. Ia mengatakan bahwa jika abad-20 adalah abad *hard power*, maka abad-21 adalah abad *soft power* (Yudhoyono 2009). *Hard power* menyebabkan konflik, sementara *soft power* menyebabkan kerjasama dan harmoni. Pandangan hitam-putih SBY tentang *power* tersebut membuatnya beranggapan bahwa *hard power* tidak relevan lagi dalam situasi sekarang ini yang menuntut negara lebih banyak melakukan kerjasama ketimbang konflik. Militer dianggap instrumen usang dalam berdiplomasi yang identik dengan masa perang. Pada era dimana perang digantikan oleh kerjasama, pemilihan strategi *soft power* adalah kebijakan yang dipandang sejalan dengan globalisasi (Rosyidin 2012: 413).

Akan tetapi, globalisasi tidak melulu identik dengan kerjasama. Globalisasi juga menyimpan sisi gelap berupa benturan kepentingan yang

tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari tingkat interaksi antar aktor internasional yang kian intensif. Globalisasi juga memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang mengubah struktur kekuasaan global menjadi multipolar. Perkembangan ini bukan berarti menjadikan dunia semakin damai dan stabil. Justru sebaliknya, konflik antar negara dan tingkat kerawanan semakin meninggi (Waltz 2000).

Implikasi dari kondisi seperti itu, negara perlu menggunakan strategi diplomasi yang kontekstual. Nye (2011: xiv) mengatakan, *power* selalu tergantung pada konteks. Artinya, jika konteks yang dihadapi menuntut pemerintah menggunakan *hard power*, maka pemerintah seharusnya menggunakannya. Begitu pula sebaliknya, ada situasi dimana pemerintah perlu menggunakan strategi *soft power*. Sebagai contoh, ketika kedaulatan terancam oleh pelanggaran yang dilakukan negara lain maka strategi *hard power* perlu dikedepankan. Alasannya, pemerintah akan kesulitan mengatasi masalah itu dengan hanya mengandalkan kekuatan nilai, norma dan budaya yang dimiliki. Dalam situasi dimana keputusan harus diambil secara cepat dan tepat, menjatuhkan pilihan pada strategi *soft power* dalam situasi konfliktual terlalu riskan. Dalam situasi yang berbeda, misalnya ketika ancaman bersifat laten dalam arti ancaman tersebut tidak di depan mata, pemerintah bisa mengandalkan *soft power* untuk mengikis potensi ancaman tersebut dan mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan. Dengan demikian, makna kalimat “menjadikan musuh menjadi teman, teman menjadi mitra” (Yudhoyono 2005) merupakan bagian dari strategi *soft power* untuk mengubah hubungan konfliktual menjadi kerjasama secara gradual. Kesimpulannya, dalam konteks ancaman nyata dan mendesak (*urgent*) maka pilihan strategi *hard power* lebih tepat, sementara dalam konteks ancaman yang potensial maka pilihan strategi *soft power* lebih tepat.

Pendekatan diplomasi SBY sepertinya tidak mempertimbangkan konteks yang dihadapi. Pemerintah terlanjur percaya pada manfaat *soft diplomacy* dalam memecahkan segala persoalan hubungan antar bangsa. *Soft diplomacy* mengedepankan pendekatan dialog konstruktif tanpa melibatkan unsur paksaan dan ancaman. *Soft diplomacy* penting untuk membangun rasa saling percaya (*trust*) supaya segala persoalan bisa teratasi dengan *win-win solution*. Penyelesaian masalah harus dilakukan dengan kepala dingin alih-alih emosi yang cenderung reaksioner. Pendekatan diplomasi ini dilakukan dalam kerangka gagasan ‘*a million friends zero enemy*’ yakni menegaskan komitmen Indonesia bahwa Indonesia tidak memandang negara lain sebagai musuh. Indonesia selalu beritikad baik dalam melaksanakan hubungan luar negeri dalam suasana konfliktual dengan tidak memperkeruh keadaan misalnya menggelar kekuatan militer sebagai strategi *deterrence*. Kendati negara lain menunjukkan sikap tidak ramah, Indonesia harus bisa menunjukkan sikap sebaliknya. Hanya dengan pendekatan itulah masalah hubungan antar negara bisa diatasi.

Komitmen SBY pada *soft power* sedikit banyak dipengaruhi oleh momen kebangkitan Asia. Pergeseran kekuatan global yang ditandai dengan bangkitnya China dan India dalam hal ekonomi membuat Indonesia optimis bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara agar dapat memenangi peluang di abad-21. Dalam pidatonya ketika membuka Sidang Pleno ke 4 Asian Parliamentary Assembly (APA) menyatakan secara tegas bahwa Asia adalah kawasan yang penuh harmoni dan sejahtera.

Saya sungguh percaya, bahwa kunci dari masa depan Asia yang damai dan sejahtera, terletak pada kapasitas kita untuk membangun dan menyebarkan *soft power*. Apabila abad 21 dapat kita jadikan abad *soft power*, kita akan mewujudkan suatu Asia yang berbeda (detik.com 2009).

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme SBY dalam merespon kebangkitan Asia atau *Asian Century*. Konflik adalah tema masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam karena sudah ketinggalan jaman. Sebaliknya, kerjasama harus terus ditingkatkan dengan semua bangsa di dunia untuk mencapai tujuan nasional.

Implementasi *soft power* sebagai pendekatan diplomasi Indonesia tak lepas dari pengaruh gagasan Nye. Nye memang pernah mengatakan bahwa dalam abad informasi dewasa ini, *soft power* memang perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hanya saja, pandangan SBY tentang dunia terlalu monolitik. SBY melihat dunia dalam kacamata kaum liberal yang serba optimis dan progresif. SBY sepertinya mengabaikan elemen konflik dan ancaman sebagai bagian tak terpisahkan dari relasi antar negara. SBY begitu percaya *soft power* bisa mengatasi segala persoalan. SBY sepertinya lupa bahwa *soft power* hanya salah satu sisi dari *power*. Ketika *soft power* lebih relevan untuk mencapai tujuan negara dalam iklim globalisasi, bukan berarti mengesampingkan atau bahkan menghilangkan *hard power*. Lagipula, akan menjadi sebuah paradoks apabila pemerintah berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanan jika ternyata alat negara tersebut sia-sia karena tidak digunakan. Pemerintah sepertinya 'alergi' menggunakan pendekatan koersif menyangkut isu-isu sensitif seperti kasus pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh negara tetangga.

Dalam hal ini Presiden SBY agaknya keliru dalam menafsirkan konsep *soft power* yang dicetuskan Nye. Pernyataan SBY di Universitas Harvard bahwa abad-21 adalah abad *soft power* dapat ditafsirkan sebagai penyangkalan SBY terhadap kenyataan bahwa konflik-konflik antar negara masih menyelubungi hubungan internasional abad-21 sekalipun pada saat bersamaan kerjasama baik bilateral maupun multilateral kian meningkat signifikan. Nye sendiri sebagai pencetus konsep-konsep itu tidak pernah mengatakan bahwa *soft*

power akan menggantikan *hard power*. Ketika berbicara di Central European University, Nye (2011) mengatakan bahwa,

Terkadang orang menafsirkan apa yang saya tulis dengan mengatakan: “oh, *soft power* menggantikan atau menyingkirkan *hard power*; militer dan ekonomi”. Apa yang ingin saya katakan adalah *soft power* merupakan bagian dari keseluruhan alat yang kita gunakan atau kita butuhkan ketika berpikir tentang strategi.

Pernyataan Nye ini menggarisbawahi poin penting gagasannya bahwa *soft power* hanyalah salah satu sisi kekuasaan yang sama sekali tidak mereduksi gagasan tentang *hard power*. Dalam tulisannya yang lain, Nye (2009: 160) meluruskan anggapan keliru banyak orang mengenai konsep *soft power* yang ia ajukan dengan mencetuskan gagasannya tentang ‘*smart power*’. Konsep tersebut ia kembangkan sebagai cara untuk meyakinkan banyak kalangan bahwa penggunaan *soft power* saja tidak bisa menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif.

Dalam dunia diplomasi, pemerintah kerap melakukan kesalahan perihal memilih strategi apa yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kesalahan ini bisa terjadi karena mispersepsi atau irasionalitas pembuat kebijakan. Irasionalitas bisa muncul lantaran cara pandang elit yang dikotomistis atau monolitik. Cara pandang ‘sejuta teman tidak ada musuh’ dapat dimaknai sebagai cara pandang yang monolitik karena itu berarti mengingkari keberadaan pihak-pihak yang berniat memusuhi. Menurut Mandel (1984), salah satu ciri kebijakan luar negeri yang irasional adalah kebijakan luar negeri yang terlampau hati-hati dan lamban (*stick-in-the-mud irrationality*). Kebijakan luar negeri yang hati-hati sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari resiko buruk misalnya perang dengan negara lain. Tetapi masalahnya, kebijakan yang terlampau hati-hati akan melanggengkan kondisi *status quo* dan struktur hirarkis dalam hubungan antar bangsa (Mandel 1984: 658). Kelihatannya paradoks apabila prinsip kehati-hatian seorang pemimpin dianggap sebagai tindakan irasional. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa kehati-hatian dalam arti irasional tidak sama dengan kehati-hatian dalam arti *prudence* sebagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin saat pengambilan keputusan. Kehati-hatian seorang pemimpin dapat dikategorikan ke dalam tindakan irasional karena akan menjerumuskan negara ke dalam situasi yang dapat merugikan negara itu sendiri. Misalnya, Kehati-hatian memang penting, namun jika terlalu berlebihan bisa menjadi bumerang bagi negara itu sendiri.

Kebijakan SBY yang terlampau hati-hati dalam menanggapi kasus penangkapan tiga petugas KKP di atas dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang irasional. Dikatakan irasional sebab pendekatan *soft diplomacy* yang

dipilih SBY berpotensi melanggengkan *status quo* dan struktur hirarkis antara Indonesia dan Malaysia. *Status quo* yang dimaksud adalah kondisi hubungan antar kedua negara akan cenderung konfliktual di masa yang akan datang. Kehati-hatian SBY akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek, misalnya dalam urusan TKI dan kerjasama ekonomi. Namun sikap kehati-hatian itu menciptakan preseden bahwa pemerintah Indonesia tidak berani menggertak Malaysia sehingga dalam jangka panjang peristiwa serupa bukan tidak mungkin akan terulang kembali. Sementara itu, pendekatan *soft diplomacy* SBY juga akan melanggengkan struktur hirarkis antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks pola interaksinya. Meskipun secara legal-institusional hubungan kedua negara adalah sejajar, namun dalam praktiknya Indonesia seolah-olah menjadi subordinat Malaysia. Konsesi-konsesi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Malaysia untuk meredakan ketegangan antar kedua negara menjadi bukti bahwa Indonesia *powerless* di hadapan Malaysia.

Menolak menggunakan *hard power* karena terlalu percaya pada efektivitas *soft power* menimbulkan apa yang disebut sebagai 'paradoks kepentingan nasional'. Paradoks kepentingan nasional adalah situasi dimana keinginan untuk meraihnya malah menyebabkan kerugian. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara *tujuan* dan *cara* yang digunakan (Rosyidin 2012: 414). Misalnya, tujuan semua negara di dunia adalah menjaga kedaulatan atau membela warga negara. Seandainya ada negara lain yang melakukan pelanggaran terhadap keduanya, maka cara diplomasi tidak akan efektif. Hal ini karena sikap yang ditunjukkan negara lain tersebut adalah sikap permusuhan. Jika ditanggapi dengan santun, maka kerugian akan berada pada pihak negara yang dilanggar.

Pemikiran tersebut bukan berarti menganjurkan supaya negara selalu mengedepankan cara-cara kekerasan. Perang selalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain itu, perang bisa menjauhkan negara dari peluang kerjasama dengan negara lain. Resiko itu hanya terjadi hanya jika pemerintah menggunakan kebijakan luar negeri yang agresif dan emosional. Diplomasi idealnya harus dijauhkan dari sikap reaksioner dan terkesan membabi-butu. Akan tetapi poin penting yang perlu digarisbawahi adalah kekuatan militer sebagai alat pendukung diplomasi semestinya tidak dipandang sebagai hal yang tabu. Sampai kapanpun, pendekatan koersif tetap penting. Hanya saja, kapan waktunya ia digunakan memerlukan pertimbangan yang rasional.

Rasionalitas SBY memilih langkah diplomasi memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. *Soft diplomacy* mungkin dapat mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka pendek. Dengan tidak melawan Malaysia, Indonesia setidaknya tidak kehilangan aset strategis di Malaysia yaitu aset ekonomi.

Dengan menghindari opsi *gunboat diplomacy*² yang bernuansa *hard power*, Indonesia berarti ikut serta dalam menjaga stabilitas kawasan dan keutuhan ASEAN. Namun pada saat yang sama pemerintah gagal menjaga kewibawaan negara dan harga diri (*self-esteem*) bangsa di hadapan negara lain. Menjaga kewibawaan dan harga diri bangsa adalah kepentingan jangka panjang yang menjamin keberlangsungan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Survabilitas atau kemampuan mempertahankan diri tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjaga kewibawaannya.

Turunnya kewibawaan dan harga diri suatu negara dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Dalam konteks relasi antar bangsa, status negara tidak hanya dibentuk oleh kedaulatan yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) seperti kekuasaan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya tetapi juga kedaulatan yang berorientasi keluar (*outward looking*) yaitu pengakuan sebagai anggota masyarakat internasional (Wendt 2004: 294). Secara psikologis, pengakuan oleh negara lain ini mengisyaratkan adanya penerimaan secara sederajat (*egaliter*). Sama seperti individu manusia, negara juga menginginkan 'keamanan ontologis' (Mitzen 2006) yaitu terhindar dari ancaman terhadap identitas dan harga dirinya. Kepentingan nasional dalam konteks keamanan tidak hanya bersifat fisik seperti melindungi batas wilayah dan penduduk, tetapi juga bagaimana negara tersebut diperlakukan dengan hormat oleh negara lain (*honorable*). Rasa hormat (*honor*) erat hubungannya dengan harga diri (*self esteem*), yaitu pengakuan negara lain terhadap keberadaan suatu negara (Lebow 2008: 64). Inilah sebabnya tindakan sewenang-wenang Malaysia terhadap Indonesia tidak dapat dibenarkan dalam kacamata keamanan ontologis tersebut. Jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah preventif, kejadian seperti yang dilakukan Malaysia itu bukan tidak mungkin akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Kesimpulan dan rekomendasi

Pendekatan *soft diplomacy* SBY dalam merespon pelanggaran kedaulatan oleh Malaysia merupakan konsekuensi dari cara pandang yang keliru dalam melihat politik dunia. Howard Lentner (2004: 1) mengingatkan bahwa, "Sebagaimana semua aktivitas politik, baik kerjasama maupun konflik selalu hadir, dominasi dan perlawanan selalu muncul, serta persaingan pun ada di mana-mana." Frederick Agung dari Prussia mengatakan bahwa, "Diplomasi

2 *Gunboat diplomacy* atau diplomasi kapal meriam adalah sebutan untuk diplomasi yang melibatkan kekuatan militer. James Cable (dalam Dunaway 1991: 35-36) mendefinisikan *gunboat diplomacy* sebagai "penggunaan atau ancaman kekuatan angkatan laut secara terbatas, bukan [dimaksudkan] sebagai tindakan perang, [tetapi] untuk mengamankan kepentingan, atau untuk mencegah kekalahan, baik dalam sengketa internasional atau melawan negara lain dalam wilayah atau yurisdiksi negara bersangkutan". Penggunaan konsep *gunboat diplomacy* untuk saat sekarang mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya terbatas pada kekuatan angkatan laut tetapi kekuatan militer secara umum.

tanpa kekuatan militer ibarat musik tanpa instrumen". Fanatisme terhadap *soft power* dapat membuat diplomasi Indonesia menjadi lembek dan tidak berkarakter. Sah-sah saja menganggap Malaysia merupakan negara sahabat, 'saudara serumpun', mitra dagang terbesar, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika negara yang dipersepsi sebagai sahabat tersebut menunjukkan sikap permusuhan dengan Indonesia, pemerintah semestinya menanggapi dengan sikap tegas. Tegas tidak berarti perang. Tegas berarti menunjukkan bahwa Indonesia bukan 'boneka mainan' yang akan tinggal diam jika diperlakukan tidak adil.

Dalam rangka membangun landasan diplomasi yang kokoh dan berkarakter, Indonesia mutlak kembali ke Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai yang komprehensif termasuk urusan politik luar negeri. Sila ke-II "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengandung pengertian bahwa Indonesia menghendaki prinsip kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia tidak naif dalam menyadari realitas-realitas hubungan internasional yang jauh dari kerangka idealitas (Latif 2011: 215). *Hard power* dan *soft power* ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pilihan pendekatan *hard power* saja dalam hubungan antar negara jelas tidak bijak dan kontraproduktif. Menggunakan *soft power* saja untuk menyikapi tindakan negara lain yang melanggar kedaulatan negara juga tidak efektif. Oleh sebab itu, pendekatan yang perlu dikembangkan pemerintah Indonesia adalah strategi *smart power*. Kombinasi antara *hard power* dan *soft power* sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sebaliknya, *smart power* sangat sejalan dengan Pancasila sebagai strategi diplomasi yang efektif dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Sebagaimana karya ilmiah lainnya, tulisan ini tidak lepas dari kekurangan. Tulisan ini berpendapat bahwa konsep *soft power* sebenarnya kurang relevan untuk memahami kebijakan SBY terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. Seperti telah dibahas sebelumnya, *soft power* adalah strategi alternatif selain *hard power*, tetapi bukan berarti menggantikan strategi *hard power*. Strategi ini menekankan pada penggunaan unsur-unsur non-koersif seperti nilai-nilai, norma-norma, budaya, ideologi untuk menarik negara lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan negara lain tanpa perlu menggunakan tekanan dan paksaan. Persoalannya, pada saat SBY memilih pendekatan diplomatik terhadap Malaysia, unsur-unsur tersebut sama sekali tidak memainkan peran. Sederhananya, SBY hanya melakukan upaya diplomatik melalui dialog untuk meredakan ketegangan kedua negara. Hal ini berarti menampik anggapan kebanyakan kalangan yang menilai bahwa kebijakan SBY itu mencerminkan penggunaan *soft power*; sama sekali bukan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri SBY terhadap Malaysia dalam isu penangkapan tiga petugas KKP itu merupakan wujud mispersepsi SBY terhadap sikap dan tindakan

negara lain. SBY tidak melihat persoalan secara obyektif tetapi lebih condong pada preferensi subyektif. Padahal, ada resiko yang jauh lebih besar di balik keputusan tersebut yakni terkait wibawa dan harga diri pemerintah Indonesia di hadapan Malaysia. Kepentingan ini jelas lebih dari sekedar kepentingan strategi jangka pendek seperti kepentingan ekonomi atau alasan moral sebagai saudara serumpun. Kesimpulan ini memperkuat teori mispersepsi yang mengatakan bahwa faktor psikologi pembuat kebijakan berperan penting dalam membentuk hubungan konfliktual antar negara (Jervis 1968 & 1976). Konsekuensi dari mispersepsi pengambil kebijakan dalam situasi konfliktual adalah kebijakan luar negeri yang irasional, yaitu kebijakan yang berpotensi merugikan negara tersebut. Jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran, berarti itu membuktikan bahwa keputusan SBY memilih pendekatan diplomatik telah gagal karena keputusan itu terbukti tidak mampu mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi. Jadi, mispersepsi pembuat kebijakan dapat menyebabkan irasionalitas kebijakan luar negeri. ●

Referensi

- Dahl, R. 1957. "The Concept of Power," *Behavioral Science*, Vol. 2, No. 3 (July), pp. 201-215.
- Detik. 2009. *Soft power untuk Asia yang berbeda*, <<http://news.detik.com/read/2009/12/08/130400/1256067/10/soft-power-untuk-asia-yang-beda>>, diakses pada 3 Oktober 2012.
- Dunaway, W.M. 1991. *Gunboat Diplomacy in A New World Order: Strategic Consideration for U.S Naval Intervention in the Twenty-First Century*, M.A thesis, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tuft University.
- Faizasyah, T. 2012. *Polugri 101 Kutipan Presiden SBY Mengenai Diplomasi & Hubungan Internasional*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Heinl, R.D. 1966. *Dictionary of Military and Naval Quotations*. Annapolis: United States Naval Institute.
- Jervis, R. 1968. "Hypotheses on Misperception," *World Politics*, Vol. 20, No. 3 (April), pp. 454-479.
- Jervis, R. 1976. *Perception and Misperception in International Politics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Juwana, H. 2010. *Kisruh Indonesia-Malaysia di Perbatasan*, Kompas, 24 Agustus.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lebow, R.N. 2008. *A Cultural Theory of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lentner, H.H. 2004. *Power and Politics in Globalization: The Indispensable State*. London: Routledge.

- Mandel, R. 1984. "The Desirability of Irrationality in Foreign Policy Making: A Preliminary Theoretical Analysis," *Political Psychology*, Vol. 5, No. 4, pp. 643-660.
- Mitzen, J. 2006. "Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma," *European Journal of International Relations*, Vol. 12, No. 3, pp. 341-370.
- Morgenthau, H.J. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* 5th edn. New York: Alfred Knopf.
- Natalegawa, M. 2010. *Indonesia and the World 2010*, The Jakarta Post, 26 January.
- Nye, J.S. 1990a. "Soft Power," *Foreign Policy*, No. 80, (Autumn), pp. 153-171.
- Nye, J.S. 1990b. "The Changing Nature of World Power," *Political Science Quarterly*, Vol. 105, No. 2 (Summer), pp. 177-192.
- Nye, J.S. 2002. *The Paradox of American Power: Why The World's Only Superpower Can't Go It Alone*. New York: Oxford University Press.
- Nye, J.S. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Nye, J.S. 2009. "Get Smart: Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs*, Vol. 88, No. 4 (July-August 2009), pp. 160-163.
- Nye, J.S. 2011a. *The Future of Power*. New York: Public Affairs.
- Nye, J.S. 2011b. *Global Power in The 21st Century*, Lecture at Cental European University, September 26, 2011, <<http://archive.ceu.hu/video/2011-09-26/at-ceu-joseph-nye-talks-global-power-in-the-21st-century>>, diakses pada 20 Maret 2014.
- Rosyidin, M. 2012. "Globalisasi dan Paradoks Kepentingan Nasional: Million Friends Zero Enemy," *Analisis CSIS*, Vol. 41, No. 3 (September), pp. 399-423.
- Roy, S. L. 1984. *Diplomasi*, terj. Herwanto dan Mirsawati. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tribunnews. 2010. *JK: Prinsip Politik Luar Negeri SBY tidak Realistis*, <<http://www.tribunnews.com/2010/08/19/prinsip-sby-semua-teman-tidak-ada-lawan-adalah-prinsip-pedagang>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Tribunnews. 2010. *Malaysia Langgar HAM*, <<http://www.tribunnews.com/2010/08/25/malaysia-langgar-ham>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vermonte, P. 2010. *Pidato SBY dan Opini Publik*, <<http://news.liputan6.com/read/294388/pidato-sby-dan-opini-publik>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vivanews. 2010. *RI Pilih Hadapi Malaysia dengan Diplomasi*, <<http://politik.news.viva.co.id/news/read/174887-ri-pilih-hadapi-malaysia-dengan-diplomasi>>, diakses pada 26 Mei 2013.
- Vivanews. 2010. *Menlu Malaysia: Kami Protes*, <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/173428-menlu-malaysia-kami-terhina>>, diakses pada 21 Maret 2014.

- Vivanews. 2010. *Dagang Indonesia-Malaysia, Siapa Untung?*, <<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/174056-dagang-indonesia-malaysia-siapa-untung->>, diakses pada 21 April 2014.
- Waltz, K. 2000. "Structural Realism After Cold War," *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer), pp. 5-41.
- Wendt, A. 2004. "The State as person in International Theory," *Review of International Studies*, Vol. 30, pp. 289-316.
- Wolfers, A. 1962. *Discord and Collaborations: Essays on International Politics*. Baltimore: John Hopkins Press.
- Yudhoyono, S.B. 2005. *Speech By President of The Republic of Indonesia Before The Indonesian Council on World Affairs (ICWA)*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2005/05/19/332.html>>, diakses pada 19 April 2013.
- Yudhoyono, S.B. 2008. *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2008/04/02/875.html>>, diakses pada 17 Mei 2012.
- Yudhoyono, S.B. 2009. *Towards Harmony Among Civilizations*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2009/09/30/1228.html>>, diakses pada 16 April 2013.
- Yudhoyono, S.B. 2010. *Pidato Presiden RI mengenai Dinamika Hubungan Indonesia-Malaysia*, <<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2010/09/01/1473.html>>, diakses pada 23 April 2014.

Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Uni Eropa, *Good Governance*, dan Diskursus Pembangunan Indonesia Pasca-Orde Baru¹

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar

Abstract

Indonesia and the European Union (EU) have been starting to cooperate in many sectors since 1990. However, there have been shifts the area of cooperation after the New Order. EU, through Partnership and Cooperation Agreement (firstly signed in 2003), has been agreed to take part in strengthening Indonesia's civil society organisations. EU offers some funded program to be conducted by Indonesia's civil society organisations in broad range of area, mainly in human rights, democratic participation, and development agenda, and good governance. This cooperation agreement made EU as one of main partner for Indonesia's civil society organisations to strengthen their capacities in community empowerment and policy advocacy. However, EU's involvement in assisting civil society in post-Suharto Indonesia has also become an instrument for promoting EU's norms in Indonesia. This paper will raise two questions in relations to EU's involvement: (1) What is EU's main motive in assisting Indonesia's development through civil society? (2) To what extent do the projects affect social and political practices in Indonesia? By using Foucault's concept of 'governmentality', this paper have analysed that EU's involvement in assisting civil society in Indonesia through its funded projects reflects EU's attempts to discipline the third world, particularly Indonesia and thus control the subjectivity through civil society engagement. This paper suggests that studies on EU power should address the changing discourse in international politics and how EU interacts with other global entity, particularly the third world, in a more critical perspective.

Keywords: European Union, Civil Society, Development, Human Rights, Democracy, Normative Power Global Governmentality

1 Penulis berterima kasih kepada *reviewer* Jurnal Kajian Wilayah atas masukan konstruktif yang diberikan. Selain itu, dalam proses penulisan, penulis juga berterima kasih kepada Muhadi Sugiono, Yunizar Adiputera, Suci Lestari Yuana, Fadly an-Noor, dan Annisa Gita Srikandini atas beberapa komentar dan diskusi yang mempertajam tulisan ini. Versi awal dari tulisan ini dipresentasikan pada *3rd Convention of European Studies*, Universitas Gadjah Mada, 21-23 Mei 2014.

"...Hence the status of the EU as a global civil power or civilian power is one which still is central to a discussion of its role in international relations..."

Ian Manners

Pendahuluan

SETELAH usainya Perang Dingin, yang ditandai dengan jatuhnya Uni Sovyet, politik internasional diwarnai oleh sebuah perubahan yang kemudian mewarnai peta kekuatan global di masa berikutnya: munculnya Uni Eropa (UE). Sejak Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tahun 1992, negara-negara di Eropa secara bertahap mulai mentransformasikan kerjasama mereka dalam satu format regionalisme yang lebih kompleks, dalam payung besar "Uni Eropa". Kerjasama tersebut semakin kompleks ketika pada tahun 1999, negara-negara anggota Uni Eropa menyepakati *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) melalui Perjanjian Amsterdam dan satu mata uang bersama yang bersifat tunggal, yaitu Euro (Casarini, 2007).

Transformasi di Eropa ini, pada perkembangannya, melahirkan perdebatan baru soal 'kekuatan' Uni Eropa dalam politik global. Ian Manners, seorang ahli regionalisme Eropa, menilai bahwa Uni Eropa punya 'kekuatan normatif' yang didasarkan pada distribusi norma-norma pembentukan Uni Eropa (yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian pembentukan UE) kepada dunia internasional.² Manners berargumen, kekuatan yang dibangun oleh Uni Eropa bergantung pada "norma" yang melekat pada dirinya dan diperjuangkan melalui interaksinya dengan entitas-entitas lain (Manners, 2002). Salah satu upaya Uni Eropa dalam membangun norma di kancah politik global tersebut termanifestasi dalam keterlibatannya di wilayah pembangunan internasional. Uni Eropa terlibat dalam asistensi proses-proses demokratisasi, penanaman norma "*Good Governance*", serta promosi Hak Asasi Manusia di negara-negara dunia ketiga yang baru saja mengalami proses demokratisasi, tak terkecuali Indonesia.

Menariknya, keterlibatan Uni Eropa dalam menyediakan asistensi proses transisi demokrasi tersebut—atau dengan kata lain sebagai "donor"—juga menyiratkan satu pertanyaan lain terkait dengan 'politik hegemoni' Uni Eropa di dunia ketiga. Praktik pembangunan internasional dan "promosi norma" tersebut, dalam perspektif yang lebih kritis, penting untuk dikritisi karena tidak terlepas dari relasi-relasi kekuasaan tertentu (Foucault, 1991). Tulisan ini akan bertumpu pada satu pertanyaan utama: melalui program penguatan masyarakat sipil dan paket donornya, bagaimana Uni Eropa

2 Menurut Ian Manners, *Normative Power* adalah kemampuan untuk mewujudkan atau mengubah sesuatu yang dianggap "normal" dalam hubungan internasional ("*the ability to shape or change what passes for normal in international relations*"). Kekuatan normatif bergantung pada kemampuan untuk memperjuangkan norma-norma tertentu dalam relasinya dengan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional, dan dengan demikian tidak bergantung pada kemampuan persenjataan atau ekonomi. Lihat Manners (2002: 32).

membentuk subjek 'Eropa' di negara dunia ketiga, dalam hal ini Indonesia, dan bagaimana relasi kekuasaan yang terbangun dari proses itu? Konsep "governmentality" yang diajukan oleh Michael Foucault akan digunakan untuk mengupas relasi-relasi kekuasaan yang terbentuk dari program-program Uni Eropa di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011.

Membaca Ulang 'Kekuatan Eropa': Reorientasi Perspektif

Selama ini, perdebatan tentang 'kekuatan Eropa' (*European Power*), dalam kajian-kajian Hubungan Internasional, diwarnai oleh debat antara kubu realis (yang percaya dengan kekuatan militer dan politik) dan liberal (yang percaya pada norma dan kerjasama). Argumen-argumen yang berakar pada pendekatan liberal-institusionalis cenderung melihat fenomena ini sebagai bentuk penyebaran norma-norma Eropa ke wilayah lain dan merefleksikan kekuatan Eropa yang 'normatif' dan 'sipil'. Pandangan ini percaya bahwa hubungan antar-negara dibentuk oleh nilai-nilai yang berakar dari rasa saling percaya (*mutual recognition*) dan membuat negara punya legitimasi tertentu. Oleh karena itu, bagi mereka, perilaku negara punya dasar moral yang mendorong mereka untuk bekerjasama (Reus-Smit, 1999: 156; Baylis and Smith, 2001; Burchill, 2005). Francois Duchene, seorang akademisi Perancis terkenal, pertama kali menggulirkan diskursus bahwa Eropa punya 'kekuatan sipil' *civilian power*' (Duchene, 1972 via Manners, 2002). Hanns Maull memperjelas konsepsi Duchene ini bahwa 'kekuatan sipil' berarti menerima kerjasama sebagai norma dalam hubungan internasional, mengedepankan kekuatan non-militer, serta menggunakan cara-cara sipil untuk tujuan sipil (Maull, 2006).

Pandangan semacam ini ditentang oleh kaum realis. Secara teoretis, realisme mendasarkan argumen skeptisisme mereka atas adanya moralitas dalam hubungan internasional (Beitz, 1978; Donnelly, 2005). Perspektif ini menekankan pada perilaku negara dalam menghadapi *power politics* di lingkungannya, termasuk dalam konteks Eropa. Proponen utama pandangan ini, Hedley Bull, mengkritik pendekatan 'kekuatan sipil Eropa' yang diajukan oleh Duchene, dengan melihat bahwa kekuatan Uni Eropa yang sebenarnya tidak terletak pada interaksinya dengan negara lain atau norma yang ia berikan, melainkan kekuatan yang lebih material –militer dan ekonomi (Bull, 1981). Bagi Bull, 'norma' atau 'kekuatan sipil' belaka tidak bisa menjadi sandaran untuk mempertahankan Eropa dari intervensi eksternal. Meningkatnya tensi keamanan di dunia tahun 1980an, menurut Bull, mestinya membuat Uni Eropa bisa menyesuaikan diri dengan meningkatkan porsi anggaran dan kebijakan di bidang pertahanan –atau dengan kata lain, menggunakan "militer" (Bull, 1981).

Menguatnya semangat kerjasama dan integrasi di Eropa pasca-Perang Dingin kemudian membuka banyak perspektif baru untuk melihat bagaimana Uni Eropa bertransformasi menjadi sebuah entitas politik baru dalam politik dunia. Tesis Ian Manners tentang 'kekuatan normatif Eropa' menjadi salah satu yang penting di antara perspektif-perspektif tersebut. Ian Manners membawa beberapa argument konstruktivis yang percaya bahwa kekuatan Eropa dalam politik global selama ini terletak pada kemampuannya untuk 'menjadikan norma-norma mereka sebagai sesuatu yang normal dalam politik internasional' (Manners, 2002: 29). Bagi Manners, terminologi 'kekuatan normatif' bertumpu pada kemampuan Uni Eropa untuk mendorong opini publik, memperjuangkan '*ideational forces*', dan membentuk sesuatu yang 'normal' dalam politik internasional (Manners, 2002: 29). Kekuatan normatif bertumpu pada norma, yang sumbernya berasal dari perjanjian-perjanjian yang membentuk Uni Eropa. Ada empat prinsip utama yang menjadi norma utama Uni Eropa yang berasal dari *Treaty of the European Union* (yang kemudian diamandemen dalam *Treaty Amsterdam*): (1) kebebasan; (2) demokrasi; (3) penghargaan atas HAM dan kebebasan individual; serta (4) aturan hukum (*rule of law*) (Manners, 2002: 33).

Kendati demikian, konsepsi Manners tentang 'kekuatan normatif' ini juga tidak kedap kritik. Kritik Thomas Diez menarik untuk disimak –apa yang disebut oleh Manners sebagai 'kekuatan normatif' pada dasarnya adalah cara Uni Eropa untuk mengidentifikasi bahwa dirinya adalah '*The I*' dan entitas lain adalah '*The Other*' (Diez, 2005). Cara pandang seperti ini melihat bahwa norma yang dianggap oleh Uni Eropa adalah sesuatu yang 'universal', dan harus diikuti oleh entitas-entitas lain (Diez, 2005; Kovler, 2011; Merlingen, 2007). Implikasinya, cara pandang tentang 'kekuatan normatif Eropa' berpotensi terjebak pada bias yang melihat bahwa "Eropa" adalah pusat dari artikulasi dan entitas di luar Eropa adalah subjek yang harus diatur, dibentuk, dan diarahkan agar sesuai dengan normalitas-normalitas tertentu yang dipahami Eropa.

Terminologi 'normatif' yang diajukan oleh Ian Manners dan proponent lainnya ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. 'Norma' tentu bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi secara politis dengan melibatkan relasi-relasi politik tertentu. Konsep Michael Foucault tentang *governmentality* cukup penting untuk menjadi pisau analisis guna membongkar cara pandang Uni Eropa terhadap negara-negara berkembang (dalam konteks ini, Indonesia) melalui program-program penguatan kapasitasnya. Menurut Foucault, politik seharusnya tidak hanya dilihat pada wilayah legal-institusional, melainkan pada relasi-relasi kekuasaan yang membentuk logika politik tertentu (Foucault, 1991). Kekuasaan adalah sesuatu yang tertanam, secara internal, pada artikulasi-artikulasi individual, dan oleh karenanya menyatu dengan artikulasi sehari-

hari subjek. Dengan kata lain, kekuasaan tidak beroperasi di luar artikulasi keseharian dan pengetahuan, melainkan justru menyatu di dalamnya (Foucault, 1978; Foucault, 1991).

Dalam Hubungan Internasional, konsep tentang *governmentality* berguna untuk memetakan dimensi kekuasaan dari sesuatu yang sekilas bukan hal yang politis (Warner and Williams, 2009; Foucault, 1991; Li, 2012). Dengan kata lain, teori ini dapat membantu kita untuk membongkar dimensi-dimensi 'politik' dari proyek-proyek 'normatif' Uni Eropa. Terminologi 'normatif' yang dipercayai oleh Manners dan proponen-proponennya dalam membaca Uni Eropa mesti dibaca berbeda –bahwa norma-norma yang dipercayai oleh Uni Eropa pada dasarnya dieksekusi melalui teknik-teknik kontrol tertentu dan mengandung rasionalitas-rasionalitas tertentu (Rose, 1999). Norma adalah 'cover' dari sebuah rasionalitas dan subjektivitas yang ingin ditanamkan kepada entitas-entitas tertentu, mendisiplinkan mereka, dan memasukkan mereka dalam 'masyarakat kontrol' (*society of control*). Norma berfungsi sebagai instrument untuk menormalisasi praktik kekuasaan tertentu dan memproliferasinya di dalam masyarakat (Rose, 1999; Taylor, 2009). Artinya, 'kekuatan normatif' justru, pada dasarnya, adalah sebuah cara untuk melegitimasi ekspansi kekuatan Uni Eropa di entitas-entitas non-Eropa melalui "norma".

Dengan demikian, tulisan ini berargumen bahwa pada dasarnya keterlibatan Uni Eropa di dunia, seperti asistensi pembangunan, promosi HAM, atau fasilitasi proses transisi menuju demokrasi ketiga sarat dengan rasionalitas-rasionalitas dan dimensi kekuasaan tertentu. Melalui rasionalitas-rasionalitas tersebut, Uni Eropa membentuk subjek-subjek 'dunia ketiga' sesuai dengan norma-norma yang mereka definisikan. Pada titik inilah kritik terhadap tesis 'kekuatan normatif Eropa' – atau yang ia sebut di kemudian hari: 'etika normatif' – yang diajukan oleh Ian Manners bisa kita ajukan. Agenda-agenda pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh Uni Eropa di Indonesia tidak bisa sekadar dilihat sebagai manifestasi "norma", tetapi juga praktik kekuasaan. Relasi-relasi kekuasaan yang muncul itulah yang perlu diungkap melalui pemaparan data-data empiris.

Setidaknya, ada dua strategi yang dimunculkan untuk menanamkan "norma" dalam kategori masyarakat liberal (Rose, 2000). *Pertama*, strategi inklusi, yaitu melalui pemberian fasilitas dan asistensi pada kelompok-kelompok target yang sesuai dengan "subjektivitas" yang diinginkan oleh Uni Eropa. Inklusi ini, sebagaimana nanti akan diidentifikasi, dilakukan melalui pemberian *grant* atau asistensi teknis terkait dengan beberapa program yang disetujui oleh Uni Eropa. *Kedua*, strategi eksklusi, yaitu melalui identifikasi aktor-aktor yang 'gagal' memenuhi kriteria *good governance* Uni Eropa dan oleh karenanya menjadi subjek disiplin. Masyarakat sipil menjadi aktor yang penting dalam mendisiplinkan aktor-aktor tersebut dengan membebaskan

norma-norma tertentu pada subjek tersebut, antara lain transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, dengan pembebanan norma tersebut, tercipta ‘masyarakat kontrol’ di mana Uni Eropa mampu menanamkan kekuasaannya secara hegemonik (Simon, 1999; Rose, 2000).

Upaya untuk membebaskan masyarakat tersebut tentu harus berhadapan dengan narasi hegemonik yang sudah ada di Indonesia, yakni narasi birokratis-teknokratis warisan Orde Baru. Oleh sebab itu, guna menanamkan *governmentality* secara naratif, Uni Eropa harus berhadapan dengan narasi hegemonik yang menguasai struktur pemerintahan. Strategi yang digunakan adalah strategi *decentering*, dengan menawarkan diskursus alternatif –melalui masyarakat sipil dan norma *Good Governance* – dan mempertarungkannya dalam struktur politik yang ada (Nayak dan Salbin, 2010). Strategi *decentering* tersebut melekat pada pemberian dukungan oleh Uni Eropa yang dilakukan secara simultan hingga tahun 2011. Melalui strategi inklusi-eksklusi ini, Uni Eropa bisa mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi kriteria yang mereka inginkan sebagaimana rasionalitas yang mereka bawa serta, lebih jauh, mendisiplinkan praktik kekuasaan yang berlawanan dengan rasionalitas yang mereka bawa.³

Sehingga, secara lebih kritis, tulisan ini berargumen bahwa program-program asistensi pembangunan yang dibawa oleh Uni Eropa adalah sebuah proyek politik tertentu. Berkaca pada keterlibatan Uni Eropa dalam pembangunan dan transisi demokrasi di Indonesia pasca-krisis, tulisan ini mencoba untuk melakukan telaah atas program-program Uni Eropa di Indonesia pasca-1998 dan, secara kritis, akan mengurai dimensi-dimensi kekuasaan di dalamnya.

Membaca Indonesia Pasca-Krisis: *Good Governance*, Masyarakat Sipil, dan Penyesuaian Struktural

Pada bulan Mei 1998, menyusul krisis ekonomi yang berujung pada kerusuhan di berbagai daerah, Jenderal Suharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pengunduran diri ini menandai era baru dalam politik Indonesia--reformasi— yang tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga berhubungan erat dengan pertarungan diskursus-diskursus politik dan pembangunan yang mapan sejak Orde Baru dan memunculkan diskursus baru pembangunan di Indonesia.

3 Salah satu contoh dari praktik inklusi-eksklusi ini dapat dilihat pada program-program Uni Eropa tentang pendidikan. Uni Eropa berupaya menanamkan norma *Good Governance* dalam pendidikan melalui strategi (1) inklusi kelompok masyarakat sipil melalui pemberian dukungan advokasi; (2) melakukan *decentering* atas diskursus teknokratis yang melekat pada pemerintah melalui dukungan terhadap advokasi tersebut, sehingga mendisiplinkan diskursus tersebut. Hal ini akan dibahas pada bagian keempat.

Untuk membaca bagaimana diskursus-diskursus ekonomi politik saling bertarung satu sama lain di era Orde Baru. Beberapa peneliti mencatat, diskursus pembangunan Orde Baru di awal pembentukannya (1966-1980an) ditandai oleh beberapa hal, antara lain munculnya kapitalisme negara melalui proyek-proyek industrialisasi substitusi impor (ISI), keterbukaan ekonomi dan penanaman modal baik asing maupun domestik, pembenahan struktur dan apparatus negara, serta menguatnya rezim pembangunan yang berbasis pada perencanaan (Hill dan Narjoko, 2008; Hadiz dan Chalmers, 1997; Robison, 1986; Hiariej, 2003; Hadiz dan Robison, 2004). Namun, pada tahun 1980an, 'goncangan minyak' mulai surut dan dana yang mengalir tidak lagi sebesar tahun 1970an. Pada era ini, berdasarkan resep lembaga-lembaga keuangan internasional dan didukung oleh para ekonom yang berhaluan liberal, pemerintah mulai memperkenalkan paket deregulasi keuangan yang membuat sektor finansial mulai berkembang, liberalisasi di sektor perdagangan, serta perubahan kebijakan industrialisasi menjadi model orientasi ekspor (Hadiz dan Robison, 2004; Poot, Kuyvenhoven, dan Jansen, 1992). Namun, Skema-skema kebijakan ekonomi yang berbasis pada kerangka neo-institusional tersebut buyar setelah krisis ekonomi menerpa negara-negara Asia pada tahun 1997-1998.

Era pasca-Orde Baru ditandai oleh munculnya satu diskursus dominan: *Good Governance*. Dibawa satu paket bersama *structural adjustment program* dan beberapa mekanisme donor yang lain, *good governance* pada intinya menawarkan reformasi institusi negara yang berbasis pada "pembukaan dan perlindungan atas hak-hak individu, absennya korupsi, regulasi yang ramah-pasar, serta sesuai dengan kebijakan makroekonomi neoliberal" (World Bank via Carroll, 2009). Institusi menjadi salah satu poin penting dalam format reformasi Bank Dunia. Menurut skema yang diterapkan secara global ini, *good governance* mengisyaratkan bahwa tata kelola pemerintahan harus dibuat kompatibel untuk berjalannya mekanisme pasar yang efektif (Carroll, 2009; Abrahamsen, 2000). Untuk membuat *governance* yang kompatibel dengan pasar itu, diperkenalkanlah beberapa norma seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses *governance* yang ada.⁴

Diskursus ini menguat seiring dengan masuknya beberapa skema donor yang ingin memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia. IMF memberikan bantuan pinjaman melalui berbagai *letter of intent* yang ditandatangani di akhir era kepemimpinan Soeharto. Di sisi lain, Bank Dunia

4 Pada dasarnya, beberapa norma semacam transparansi, akuntabilitas atau keterlibatan masyarakat sipil sudah berkembang di Indonesia sejak 1990an, dibawa oleh beberapa NGO yang mengampanyekan *Reformasi*. Akan tetapi, diskursus tersebut bukan sama sekali mengacu pada *Good Governance* yang dibawa oleh IMF dan Bank Dunia. Di kalangan aktivis proreformasi, norma transparansi, akuntabilitas, dan semacamnya lebih berfungsi sebagai instrument untuk mendelegitimasi pemerintahan Orde Baru. Diskursus *Good Governance* baru berkembang setelah 1998, sebagai 'paket' penyesuaian struktural Indonesia. Lihat Uhlin (1996), Hadiz (2004), Hadiwinata (2003).

juga memberikan bantuan melalui *Kecamatan Development Program*, sebuah proyek pembangunan yang bertujuan untuk menggalang kewirausahaan melalui modal sosial (Li, 2007; Carroll, 2012). Sementara itu, Uni Eropa tampil dengan program-program promosi demokratisasi dan HAM di Indonesia (Hadiwinata, 2008). Aktivitas donor ini berjalan seiring dengan proses demokratisasi yang segera berlangsung di Indonesia sejak 1999.

Menariknya, hampir semua lembaga donor tersebut melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses asistensi dengan tujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Embrio masyarakat sipil di Indonesia sebetulnya sudah mulai muncul ketika pada awal tahun 1990an, organisasi-organisasi non-pemerintah mulai muncul, baik organisasi yang berbasis pada pemberdayaan dan advokasi, keagamaan hingga gerakan-gerakan sosial seperti buruh, petani, sosial-demokrat, dan mahasiswa yang mulai terlibat dalam perlawanan terhadap rezim Suharto.⁵ Setelah Suharto jatuh pada tahun 1998, organisasi yang berbasis advokasi dan pemberdayaan mulai mendapatkan momentumnya dengan munculnya lembaga-lembaga donor yang memberikan dukungan kepada masyarakat sipil untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah. Kebanyakan lembaga donor mempercayakan masyarakat sipil untuk mengambil peran partisipasi dalam proses-proses pembangunan yang mereka danai. Masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam proses demokrasi formal, sehingga diperlukan untuk menjaga mekanisme-mekanisme politik tetap akuntabel (Scholte, 2004). Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses demokrasi formal menjadi aspek penting untuk melaksanakan *good governance* dan menanamkan norma-norma HAM serta Demokratisasi di Indonesia. Melalui skema EIDHR (*European Initiatives for Democracy and Human Rights*) yang menjadi *framework* Uni Eropa dalam melakukan pembangunan di Indonesia, dinyatakan bahwa,

"...Masyarakat sipil yang kuat dan independen penting untuk membuat demokrasi dan pelaksanaan HAM berfungsi dengan baik. Uni Eropa memprioritaskan dialog rutin dengan masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar UE, dan secara mendalam sadar bahwa ada usaha-usaha beberapa negara untuk membatasi independensi masyarakat sipil. Sebagai donor utama bagi masyarakat sipil, Uni Eropa akan melanjutkan usaha melindungi para pejuang HAM melalui EIDHR dan membuat pendanaan di wilayah itu lebih fleksibel serta mudah diakses..."

(Strategic Framework and Action Plan of EIDHR, 2012)

5 Organisasi-organisasi non-pemerintah yang muncul di akhir dekade 1990-an tersebut memiliki basis ideologi, diskursus, dan tuntutan politik yang beragam. Dari organisasi berbasis keagamaan ada NU (terutama sayap pemberdayaan yang diinisiasi oleh Abdurrahman Wahid, Lakspeadam), Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga yang kritis terhadap Soeharto. Ada pula LSM-LSM liberal seperti PIJAR atau Komunitas Utan Kayu yang mengusung diskursus demokratisasi. Di samping itu, juga ada kelompok kiri radikal seperti Forkot, PRD, atau PDI-Perjuangan yang bergerak di akar rumput dengan gagasan marxis-revolusioner. Di decade 1997-1998, tuntutan mereka relative sama: menurunkan Soeharto. Lihat Uhlin (1998), Hefner (2000), Hiariej (2006).

Dengan *framework* tersebut, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting bagi skema bantuan donor Uni Eropa. Dalam demokratisasi yang kian terlembaga di Indonesia, adanya pendanaan bagi masyarakat sipil dari lembaga-lembaga donor seperti Uni Eropa membuat aktivitas mereka mulai menguat, apalagi aktivitas advokasi kini mulai terjejaring secara internasional dan aktor-aktor yang bermain tidak hanya aktor domestik. Akibatnya, terjadi proses ‘transnasionalisasi’ masyarakat sipil yang memungkinkan terciptanya *mutual interest* antara masyarakat sipil di Indonesia dan Uni Eropa berupa aktivitas advokasi dan saluran pendanaan (Widjojanto et. al, 2003).

Pada konteks inilah, kita bisa membaca bahwa menguatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil tersebut dibangun dalam satu kerangka besar *good governance*. Aktivitas-aktivitas masyarakat sipil tersebut didesain agar reformasi institusi pemerintah dapat transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan norma-norma tersebut dalam institusi pemerintah, mekanisme pasar dapat berjalan baik tanpa harus dibayang-bayangi oleh monopoli atau korupsi. Artinya, *good governance* adalah prasyarat dari terciptanya iklim persaingan usaha yang bersih dari intervensi negara, atau dengan kata lain disebut sebagai “neoliberalisme” (Hadiz, 2004; Carroll, 2009). Dengan tata pemerintahan (*governance*) yang baik, mekanisme pasar yang dipercaya ‘alamiah’ dapat berjalan tanpa intervensi politik apapun dari pemerintah. Sehingga, posisi masyarakat sipil menjadi jelas, yakni untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang kompatibel dengan pasar.

Di Indonesia, *good governance* berjalan beriringan dengan desentralisasi dan demokratisasi dan menjadi diskursus utama penyelenggaraan pemerintah, terutama sejak UU Pemerintah Daerah disahkan pada tahun 2004. Tentu saja, norma ini juga tidak kecap dari kritik. Beberapa penulis terutama mengkritik leksikon ‘*good governance*’ ini karena dianggap hanya ‘cover’ dari konsolidasi neoliberalisme di negara-negara dunia ketiga dan bisa menjadi ‘kuda troya’ bagi demokrasi itu sendiri (Carroll, 2010; Hadiz, 2004; Harriss, 2002).⁶ Kendati demikian, norma inilah yang menjadi salah satu agenda dalam kerangka asistensi pembangunan, demokrasi, dan HAM yang diagendakan oleh Uni Eropa di Indonesia. Hal tersebut akan diulas di bagian keempat tulisan ini.

Keterlibatan Uni Eropa dalam Pembangunan di Indonesia

Indonesia telah membangun hubungan bilateral dengan Uni Eropa sejak lama. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1988, Uni Eropa membuka delegasinya

6 “Kuda Troya” yang dimaksud di sini adalah bahwa gagasan *Good Governance*, dalam titik tertentu, bisa merusak proses demokratisasi dan tatanan kelembagaan masyarakat lokal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *Good Governance* berjalan beriringan dengan konsolidasi kapitalisme neoliberal yang meminggirkan peran negara dalam ekonomi dan memperkuat pasar. Dalam kerangka itu, *Good Governance* tidak menyentuh problem struktural yang dihadapi oleh masyarakat. Kajian etnografis Tania Murray Li di Sulawesi Tengah (2007) memperlihatkan bahwa norma *Good Governance* justru tidak berfungsi pada konteks ekonomi-politik yang menguntungkan pemodal besar, semisal pertambangan.

ke Indonesia. Pembukaan delegasi ini difasilitasi oleh Hubungan Uni Eropa dengan ASEAN. Hubungan tersebut kemudian dilembagakan dalam *The Mission of the Republic Indonesia to European Communities* yang dibentuk pada tahun 1990 dengan tujuan mengakomodasi potensi hubungan yang lebih erat di masa depan.

Setelah krisis Asia 1998, yang juga diikuti oleh dibentuknya format regionalism ekonomi-politik di Eropa, hubungan itu semakin erat. Sejak krisis, Uni Eropa telah menggelontorkan dana untuk merestrukturisasi tatanan ekonomi di Asia (Casarini, 2007; Melo, 2006). Kerjasama ini berlanjut dengan mulai masuknya Uni Eropa ke ranah pembangunan internasional, dengan serangkaian program *aid* dan asistensi dalam pembangunan (Carbone, 2007). Kerangka Pembangunan Internasional Uni Eropa tersebut disahkan pada tahun 2005 dalam format "*European Consensus on Development*" yang menyajikan *framework* bagi Uni Eropa untuk melakukan asistensi pembangunan di negara-negara target. *European Consensus* ini kemudian diterjemahkan di Indonesia melalui "*Indonesia-European Community Strategy Paper 2007-2013*" yang memuat strategi pembangunan Indonesia yang dibantu oleh Uni Eropa sesuai dengan *framework* yang dibangun (EC, 2007a). *Strategy Paper* ini kemudian diperkuat oleh *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* yang ditandatangani pada tahun 2009.

Democracy and Human Rights yang menjadi *tools* bagi pelaksanaan program-program asistensi pembangunan Uni Eropa di wilayah demokrasi dan HAM. Pada instrument tersebut, penguatan masyarakat sipil menjadi instrument utama guna mengarusutamakan HAM dan Demokrasi (EC, 2007b). Konsekuensinya, banyak sekali program Uni Eropa, sejak 2007, yang melibatkan masyarakat sipil sebagai pelaksana program, tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Sipil memang menjadi aktor yang penting dalam hubungan kerjasama Uni Eropa dan negara-negara dunia ketiga sesuai dengan perjanjian Cotonou yang menggarisbawahi pentingnya Uni Eropa terlibat untuk mempromosikan demokratisasi dalam kebijakan luar negerinya.

Keterlibatan Uni Eropa dalam asistensi pembangunan Indonesia sudah terlihat dengan banyaknya aktivitas Uni Eropa dalam mengawal Pemilu 1999. Empat tahun kemudian, pada tahun 2003, perjanjian kerjasama dan kemitraan (PCA) ditandatangani. Dalam PCA tersebut, Uni Eropa setuju untuk mendukung aktor non-negara untuk melakukan pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk *stakeholders* yang ada di Indonesia. Kerjasama yang mula-mula dibangun adalah kerjasama pendidikan. Tujuan kerjasama ini, menurut PCA tersebut, adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas serta meningkatkan transparansi dan monitoring anggaran pendidikan. Dalam skema ini, ada 6 proyek yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-negara senilai lebih dari €1,000,000.

Pada tahun 2007, PCA tersebut diperbaharui dengan *framework* yang lebih canggih. *Framework* yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai dukungan pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen *Country Strategy Paper* (CSP). Dokumen tersebut menggariskan kebijakan-kebijakan pembangunan Uni Eropa kepada Indonesia. Kemitraan dan kerjasama dimaksudkan untuk mendukung kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, yang tertuang dalam RPJM-Nasional (2009-2014). Secara lebih spesifik, Uni Eropa memfokuskan dukungan dalam delapan sektor, di antaranya pendidikan, pembangunan ekonomi, lingkungan & perubahan iklim, serta Demokrasi & HAM.

Country Strategy Paper menyorot banyak persoalan, antara lain bahwa Indonesia masih belum *sustainable* dalam industry dan pengelolaan lingkungan, serta korupsi masih menjadi salah satu masalah penting. Selain itu, masalah kemiskinan yang akut (52% rakyat Indonesia hidup di bawah standard) juga disorot sebagai salah satu masalah penting oleh Uni Eropa. Oleh sebab itu, ada tiga sektor yang menjadi prioritas program Uni Eropa ke Indonesia dari tahun 2007-2013, yaitu (1) pendidikan; (2) perdagangan dan lingkungan; dan (3) penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Ketiga sektor tersebut dikemas dalam model "*Sector-Wide Approach Program*" (SWAP) yang memungkinkan semua *cross-cutting issues* diakomodasi melalui tiga *focal point* di atas. Ada sekitar 70 proyek yang didanai oleh Uni Eropa di wilayah tersebut, beberapa di antaranya terkait dengan penguatan masyarakat sipil (EC, 2007).

Proyek-proyek tersebut terbuka untuk organisasi masyarakat sipil melalui *open tender*. Awalnya, para kandidat diundang pada presentasi yang diadakan di Kantor Uni Eropa Jakarta. Presentasi tersebut kemudian diikuti oleh seleksi tender yang bertujuan untuk melihat proposal mana yang sesuai kriteria pendanaan. Dengan mekanisme tender terbuka ini, masing-masing organisasi mengajukan proposal. Prosedur pengajuannya cukup rumit. Untuk mendapatkan dana, organisasi masyarakat sipil tersebut harus memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan hingga pelaporan. Proposal yang memenangi tender kemudian harus diikuti dengan *letter of interest* dan ringkasan proposal yang dikirimkan langsung ke kantor Uni Eropa. Pihak Uni Eropa akan melakukan tinjauan dari proposal tersebut dan memberikan rekomendasi untuk revisi (ada seleksi lagi di sini).⁷

Setelah tender kedua selesai, pihak yang mengajukan permohonan dana harus mengirimkan proposal lengkap dengan anggaran. Proses pengerjaannya dilaksanakan dengan beberapa kali evaluasi periodik. Jika program tersebut selesai, *project manager* harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban lengkap dengan penggunaan dananya.⁸ Dengan mekanisme yang kompleks

7 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

8 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

ini, Uni Eropa secara tidak langsung melakukan pengembangan kapasitas bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mampu mengerjakan proyek secara profesional.

Beberapa program yang bisa dicatat dari skema asistensi Uni Eropa ini antara lain sebagai berikut. *Pertama, Advokasi Dana Otonomi Khusus untuk Implementasi Pendidikan Berkualitas di Papua.* Program ini didesain sebagai bagian dari sektor penguatan masyarakat sipil di Indonesia. Dilaksanakan oleh Perkumpulan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, program ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sehingga, anggaran tersebut dapat secara langsung memperkuat kapasitas *output* pendidikan di Papua. Uni Eropa mendanai sejumlah €187,753.49 (74,29% dari keseluruhan dana). Proyek ini dilaksanakan selama dua tahun (2009-2011) di Kota Jayapura, Kabupaten Wamena, dan Kabupaten Biak, Papua.

Kedua, Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan. Program ini dilaksanakan di Maluku dan bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan dasar sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan anak. Dalam kacamata Uni Eropa, masyarakat sipil bisa berperan untuk mengadvokasi akses pendidikan anak yang lebih baik sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Kontribusi Uni Eropa dalam proyek ini adalah sebesar €149,333.25 atau sekitar 75% dari total kebutuhan dana proyek), bekerjasama dengan *Save the Children* LBG dari tahun 2009-2011.

Ketiga, Mendorong Transparansi, Efektivitas, dan Akuntabilitas dalam Manajemen Dana Dekonsentrasi Pendidikan. Proyek ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) Tunggal di 6 kota: Lampung, Semarang, Samarinda, Kupang, Makassar dan Jakarta. Tujuan program ini adalah memperkuat nilai-nilai *Good Governance* dalam pengelolaan dana dekonsentrasi pendidikan. PSPK Tunggal bekerja dari tahun 2009-2011 dengan menggunakan teknik penguatan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pengelolaan dana untuk menyingkirkan praktik korupsi dalam dana dekonsentrasi.

Keempat, Monitoring Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) dalam Obligation of Conducts dan Obligation of Results di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi melalui Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2010-2014. Proyek ini dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari pendampingan isu HAM yang menjadi *trademark* Uni Eropa dalam proyek-proyek pembangunan internasionalnya. Dari tahun 2010-2011, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) menyelenggarakan proyek untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun anggaran 2010-2014. Kerangka

kerja yang dipakai adalah kerangka hak-hak ekosob. Proyek ini menyoal pemenuhan hak-hak dasar manusia di wilayah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, program ini adalah respons dari program RANHAM pemerintah yang diajukan oleh pemerintah pusat. BIGS melakukan asistensi untuk implementasi pemenuhan hak-hak ekosob dari program ini di dua Kabupaten di Provinsi Jawa Barat: Bandung dan Cimahi, serta dua kota di Papua, Sorong dan Jayapura. Uni Eropa mendukung pendanaan dari program ini sebesar €92,636.80 (79.44% dari total dana yang diperlukan).

Kelima, Menginisiasi Jalan Baru untuk Menyelamatkan Hutan Indonesia: Dari Illegal Logging ke Good Governance. Proyek ini dilaksanakan sebagai bagian penting dari kampanye lingkungan Uni Eropa di Indonesia. *Birdlife Indonesia* menjadi pelaksana proyek tersebut. Proyek berlangsung dari tahun 2006-2011 dan Uni Eropa berkontribusi sebesar €2.5m. Ada tiga tujuan dari proyek ini, antara lain: (1) menginisiasi strategi inovatif untuk pengelolaan hutan melalui pendekatan restorasi ekosistem; (2) menunjukkan konsesi restorasi ekosistem sebagai mekanisme baru pengelolaan hutan yang inovatif; dan (3) meng-*address* kerawanan-kerawana dalam kehidupan dan problem *illegal logging* untuk menjamin penggunaan dan produksi hutan yang *sustainable*. Program ini dinilai berhasil oleh Uni Eropa dengan diadopsinya mekanisme konsesi restorasi ekosistem dan beberapa aturan terkait oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta Kementerian Kehutanan RI.

Dari tujuh program yang didanai oleh Uni Eropa tersebut, dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat sipil di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan terkait dengan *framework* yang digunakan oleh Uni Eropa. *Pertama*, Uni Eropa percaya bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya bisa terlaksana melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga perlu kontribusi masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Skema inilah yang dipahami sebagai *good governance*. *Kedua*, Uni Eropa memandang persoalan-persoalan transisi di negara sedang berkembang, dalam hal ini Indonesia, adalah persoalan-persoalan institusional. Sehingga, reformasi institusi menjadi pilihan dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi institusional di Indonesia sehingga demokratisasi bisa berjalan secara efektif.

Ketiga, persoalan-persoalan HAM yang dipahami dalam *framework* ekosob seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan hal-hal terkait lain bukan semata persoalan sektoral, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan mekanisme demokratik yang ada di Indonesia. Uni Eropa percaya bahwa upaya untuk mendorong pemenuhan hak-hak warga negara tersebut dapat dilakukan dengan mendorong budaya partisipasi dan keterlibatan *stakeholders* di dalamnya. Pada titik inilah keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses pembangunan menjadi penting. Namun demikian, terlihat

pula bahwa Uni Eropa sedang mencoba untuk membangun satu kerangka berpikir tertentu bahwa partisipasi tersebut dilakukan di dalam institusi, dan oleh karenanya tidak melibatkan hubungan yang sifatnya konfliktual dengan pemerintah. Di sisi lain, mereka juga mendanai beberapa proyek pemerintah seperti RPJM-Nasional. Itulah sebabnya, proyek-proyek Uni Eropa di Indonesia jarang sekali mengulas problem struktural yang memungkinkan kemiskinan itu terjadi, serta menitikberatkan pada persoalan kapabilitas agensi dalam memenuhi hak dasarnya.

Dari ketiga paparan tersebut, terlihat bahwa tema *good governance* yang ditarik dari paradigma neo-institusionalisme masih sangat sentral dalam program-program asistensi pembangunan Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa sudah memasukkan beberapa diskursus tentang *human development* sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, skema yang mereka tawarkan sangat erat kaitannya dengan reformasi institusi dan penguatan sektor-sektor masyarakat sipil. Pada titik inilah perdebatan antara beberapa perspektif yang telah diulas di bagian sebelumnya menjadi penting untuk diulas.

Bukan Sekadar “Kekuatan Normatif”: Analisis dan Kritik

Paparan tentang asistensi yang dilakukan di Indonesia pasca-Orde Baru di atas telah memberikan gambaran mengenai keterlibatan Uni Eropa dalam proses pembangunan di Indonesia. Bagian ini akan memberikan analisis tentang dimensi-dimensi politik dari asistensi pembangunan tersebut yang membuat Uni Eropa bukan sekadar ‘mendifusikan norma’ sebagaimana dipahami oleh proponent-proponent ‘kekuatan normatif’, melainkan juga punya kepentingan politik yang harus dibaca sebagai bagian dari upaya untuk mendisiplinkan tata kelola pemerintahan (*governance*) negara-negara sedang berkembang. Selain itu, bagian ini juga akan melihat sejauh mana upaya pendisiplinan tersebut terkait dengan konsolidasi kapitalisme di tingkat global.

Perspektif-perspektif yang berorientasi pada ‘norma’ seperti kajian-kajian Ian Manners melihat keterlibatan Uni Eropa di negara-negara sedang berkembang itu sebagai sebuah upaya untuk mendifusi norma yang dipahami Uni Eropa ke wilayah lain. Dalam beberapa literatur yang menggunakan pendekatan ini, keterlibatan Uni Eropa dalam asistensi pembangunan di negara-negara berkembang, terutama Asia dan Afrika, adalah potret dari promosi norma-norma tertentu yang membuat mereka punya karakter unik sebagai salah satu aktor dalam politik internasional (Maull, 1999; Manners, 2002; Borzel, Pamuk, and Stahn, 2008). Promosi norma-norma tersebut merefleksikan dimensi “normatif” dari kekuatan Uni Eropa di pentas politik internasional yang membedakan aktivitas mereka dari kekuatan-kekuatan lain, sekaligus menjadikan dimensi “kekuatan” Uni Eropa yang berbasis pada norma-norma tersebut berbeda (Manners, 2002).

Dalam konteks ini, asistensi pembangunan Uni Eropa kepada Indonesia dapat dilihat sebagai cara untuk menyebarkan norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa kepada negara-negara sedang berkembang –dalam hal ini Indonesia. Penyebaran (‘difusi’) norma ini bisa dilihat pada dua hal berikut. *Pertama*, melalui proyek-proyek kerjasama yang mereka danai. Proyek-proyek Uni Eropa dibangun di atas sebuah tujuan tertentu, yakni membebaskan norma-norma tertentu kepada pemerintah yang diukur melalui pencapaian target secara spesifik. Norma-norma tersebut ditanamkan melalui pelibatan masyarakat sipil sebagai pendorong norma-norma tersebut, yang dilakukannya melalui dukungan dana dan proses monitoring rutin seiring dengan berjalannya proyek hingga pelaporan, dan ditanamkan melalui interaksi antara organisasi masyarakat sipil tersebut dengan institusi-institusi pemerintahan yang jadi target. Dengan demikian, Uni Eropa secara tidak langsung menanamkan norma-norma yang mereka tawarkan dalam proyek tersebut dalam proses-proses *governance* yang terjadi di Indonesia, melainkan menggunakan masyarakat sipil .

Kedua, melalui kondisionalitas yang ditawarkan. Proyek-proyek yang didanai oleh Uni Eropa diajukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan diproses berdasarkan kondisionalitas tertentu. Uni Eropa menerapkan prosedur-prosedur spesifik yang mengharuskan pihak-pihak yang mengajukan untuk *comply*. Prosedur ini sangat *strict* dan memerlukan tanggung jawab serta akuntabilitas yang tinggi. Kegagalan untuk *comply* bisa berdampak pada integritas lembaga di mata Uni Eropa. Oleh sebab itu, lembaga masyarakat sipil dituntut untuk juga punya kapasitas-kapasitas pengelolaan proyek tertentu secara profesional.⁹ ‘Akuntabilitas’ menjadi prasyarat khusus dalam pengelolaan proyek yang, secara tidak langsung, menjadi arena pendidikan sekaligus juga mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa kepada institusi masyarakat sipil yang bersangkutan.

Dengan beberapa strategi tersebut, asistensi pembangunan dapat dilihat sebagai instrument untuk mendifusi norma-norma yang dipahami oleh Uni Eropa melalui *good governance* ke Indonesia. Interpretasi ini melihat bahwa asistensi pembangunan perlu dilihat dalam mekanisme difusi norma dan apa yang sedang ditanamkan oleh Uni Eropa ke Indonesia. ‘Difusi norma’ tersebut, dalam titik-titik tertentu, berhasil menanamkan diskursus tentang ‘*good governance*’ yang dipercayai oleh Uni Eropa dalam visi-misi organisasi yang menjadi mitra mereka.¹⁰ Di sisi lain, beberapa aturan perundang-

9 Wawancara dengan Amin Sudarsono, Aktivist PATTIRO, 3 Januari 2011.

10 Kita bisa lihat hal ini dengan menengok beberapa visi, misi, dan prinsip organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan Uni Eropa –PATTIRO, TII, ICIS, dsb. Hampir semuanya mencantumkan terminologi “tata kelola pemerintahan yang baik” dalam dokumen profil mereka. Tidak jelas apakah hal ini terkait dengan “proposal” kepada donor, tetapi secara kritis bisa dilihat bahwa diskursus “*Good Governance*” sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam beberapa aktivitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

undangan dan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional serta lokal, setelah tahun 2004, juga mulai mengadopsi istilah ini.¹¹

Pada titik inilah kita bisa melakukan kritik atas pendekatan 'kekuatan normatif' yang menekankan 'norma' sebagai basis kekuatan Uni Eropa: pada dasarnya, 'norma' bukanlah fondasi dari artikulasi Uni Eropa dalam politik internasional. Benar bahwa aktivitas Uni Eropa di Indonesia didasari oleh norma-norma tertentu, namun perlu juga dilihat secara kritis bahwa norma-norma tersebut merefleksikan kepentingan politik tertentu. Apa yang disebut dan dipercayai oleh Uni Eropa sebagai 'norma', pada dasarnya merefleksikan subjektivitas tertentu yang tidak serta-merta diterima secara universal oleh entitas yang-lain (dalam hal ini, Indonesia). Kajian Christopher Rowan tentang politik bantuan air Uni Eropa di Afrika merefleksikan hal ini. Menurut Rowan, dalam setiap bantuan, selalu ada relasi yang tidak setara antara 'Uni Eropa sebagai subjek/sang-pemberi' dengan 'Afrika sebagai objek/ yang-membutuhkan'. Relasi ini terus-menerus direproduksi melalui bantuan dan, dalam derajat tertentu, justru melegitimasi praktik eksploitasi dalam wujudnya yang berbeda (Rowan, 2009).

Kritik Michael Foucault perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Foucault berpendapat bahwa 'norma' pada dasarnya adalah paket dari instrument pendisiplinan tertentu yang bertujuan untuk mengeksklusi 'The-Other' dari tatanan sosial tertentu dan dengan demikian menciptakan derajat normalitas tertentu (Foucault via Sheridan, 1987). Dengan kata lain, 'norma' adalah manifestasi dari kekuasaan. Kritik Foucault ini memberikan ruang untuk melakukan kritik yang lebih tajam terhadap pendekatan 'kekuatan normatif' dengan meletakkan pengetahuan/kuasa sebagai alat untuk membedah apa saja dimensi politik dari agenda-agenda asistensi pembangunan Uni Eropa di Indonesia. Hubungan-hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia, yang dimanifestasikan dalam asistensi pembangunan, membentuk semacam identitas *EU* sebagai 'The I' dan entitas lain -Indonesia- sebagai 'The Other' (Diez, 2005). Proses konstitusi identitas ini tak terelakkan, karena posisi Uni Eropa sebagai 'pemberi bantuan' mengisyaratkan adanya posisi yang tidak setara dengan Indonesia yang menjadi 'penerima' (*beneficiary*) dari bantuan tersebut, dan posisi tersebut tidak akan setara hingga proses pemberian bantuan selesai (lihat Rowan, 2009). Sehingga, relasi antara Uni Eropa dan Indonesia justru melahirkan identitas yang terus-menerus direproduksi melalui bantuan dan pendanaan. Reproduksi identitas tersebut dimungkinkan melalui apa yang disebut oleh Foucault sebagai *technologies of the self* -teknik-teknik kekuasaan tertentu atas tubuh (Foucault, 1984; Foucault, 1991). Dalam konteks Indonesia, proposal dan proyek yang didanai menjadi instrumen

11 Sebagai contoh, lihat UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) yang menggunakan istilah tata kelola yang baik di beberapa bagian. Uni Eropa terlibat dalam proses-proses perencanaan dan asistensi pembangunan tersebut. Lihat Buku Biru Uni Eropa (2012: 4).

pendisiplinan yang cukup penting guna membentuk subjek Indonesia yang ‘transparan’, ‘akuntabel’, dan bernafas *good governance*.

Foucault berargumen bahwa norma-norma yang dibebankan pada sebuah masyarakat pada dasarnya adalah bagian tak terpisahkan dari ‘rezim kepengaturan neoliberal’ (*neoliberal governmentality*) yang percaya bahwa ranah-ranah sosial –negara, pasar, dan masyarakat—adalah entitas-entitas heterogen yang terbentuk dari relasi-relasi sistemik kekuasaan, jaringan kontrol, dan strategi perlawanan tertentu (Nadesan, 2008: 10). Dengan kata lain, perspektif ini memandang bahwa individu, negara, pasar, dan entitas-entitas lain di masyarakat memiliki fungsi sendiri-sendiri yang terjalin dalam suatu relasi kekuasaan tertentu. Relasi kekuasaan itu diatur secara internal oleh perangkat “norma” tertentu dan secara eksternal mewujudkan dalam bentuk “hukum”. Perangkat-perangkat itulah yang mengendalikan fungsi-fungsi dalam masyarakat (Nadesan, 2008: 22).

Pada titik ini, norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat –atau yang diperkenalkan dan ditanamkan sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Eropa— perlu didiskusikan secara lebih kritis. Dalam rezim kepengaturan neoliberal, individu dikonstitusikan sejauh hubungan dengan norma-norma. Dalam konteks *governance*, norma tersebut kemudian mewujudkan menjadi ‘numerasi administratif’ dimana individu diatur dalam perangkat-perangkat administrative tertentu (Nadesan, 2008: 25). Di sinilah kontrol populasi muncul. Individu-individu yang gagal mengambil “tanggung jawab” atau aktivitasnya menyalahi standar normatif/kerangka acuan spesifik, harus menerima berbagai bentuk petunjuk dan disiplin dari otoritas tertentu. Pembebanan bantuan dan sanksi ekonomi dalam konteks *structural adjustment program* atau *multilateralization of aid* menjadi salah satu contoh nyata dari numerasi administratif tersebut (Rojas, 2004: 102; Foucault, 1991; Larner and Williams, 2009).

Dalam kasus Indonesia, proses-proses *governmentality* tersebut beroperasi dalam proyek-proyek pembangunan internasional. Uni Eropa menggelontorkan banyak dana untuk ‘membangun’ dan memperkenalkan masyarakat Indonesia tentang *good governance* (EC, 2007). Untuk menginternalisasikan norma-norma ini, Uni Eropa menggunakan ‘aktor ketiga’ yang menjalankan proyek-proyek tersebut. Lembaga-lembaga masyarakat sipil mengimplementasikan proyek tersebut di masyarakat, tetapi secara tidak sadar menyebarkan norma-norma tertentu—“*good governance*”—di masyarakat melalui prosedur, kondisionalitas, dan target-target tertentu yang ditetapkan oleh pemberi dana. Masyarakat sipil menjadi instrument biopolitik yang cukup penting untuk mendisiplinkan masyarakat agar sesuai dengan norma *good governance* Uni Eropa.

Kita dapat melihat proses ini dalam berbagai publikasi yang dibuat oleh Uni Eropa tentang ‘kisah sukses’ dari advokasi ini. Uni Eropa menjadikan

kisah advokasi *birdlife* yang sukses sebagai 'best practices' sekaligus parameter keberhasilan advokasi masyarakat sipil di Indonesia. Laporan ini menyiratkan adanya proses biopolitik yang berlangsung melalui organisasi masyarakat sipil (dalam kasus di atas: *Birdlife* Indonesia). Uni Eropa tidak langsung melakukan intervensi pada 'hutan hujan' yang ada di Indonesia -mereka memberdayakan masyarakat lokal dan organisasi masyarakat sipil dengan memberi mereka proyek yang didanai.¹² Prosedur proyek dan dana yang digelontorkan oleh Uni Eropa menjadi *technologies of the self*, mengarahkan organisasi-organisasi tersebut pada satu pencapaian target yang dilakukan oleh Uni Eropa, dan hasilnya menanamkan 'norma' yang dipercayai oleh Uni Eropa ke dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pada titik itulah *good governance* menjadi instrument disipliner terhadap kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Neoliberal governmentality yang dipraktikkan oleh Uni Eropa ini, pada dasarnya dimungkinkan oleh desentralisasi dan demokratisasi yang telah berjalan di Indonesia sejak 1999. Melalui mekanisme *Structural Adjustment Program*, Indonesia menganut otonomi daerah yang mendekonsentrasi kewenangan hingga level Kabupaten/Kota. Bank Dunia kemudian mengembangkan program desentralisasi yang lebih luas dalam proyek Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang kemudian dikembangkan menjadi *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM). (Hadiz, 2010; Erb and Sulistyanto, 2009; Carroll, 2012). Program-program desentralisasi ini diikuti oleh reformasi institusional yang didukung oleh lembaga-lembaga donor. Ada sekitar 12 reformasi institusional yang berlangsung di Indonesia setelah *Reformasi*, termasuk menjadikan Kabupaten/Kota sebagai *focal point* dari pemerintahan daerah, serta desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola sendiri sumber daya yang mereka miliki (Hadiz, 2010: 69). Perubahan-perubahan institusional tersebut juga termasuk hak pemerintah daerah untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui inisiatif khusus pemerintah daerah (Hadiz, 2010: 78-79).

Desentralisasi menjadi salah satu mekanisme yang memberikan 'jalan' bagi diskursus *good overnance* untuk menjadi diskursus dominan dalam politik Indonesia. Dengan mendelegasikan kewenangan ke struktur politik yang lebih kecil, masyarakat sipil dapat melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Tentu saja, hal ini juga punya celah kritik. Vedi R

12 Proyek ini terkait dengan kampanye untuk menyelamatkan hutan hujan di Indonesia. Uni Eropa menunjuk *Birdlife Indonesia* sebagai pelaksana proyek mengajak beberapa *stakeholders* seperti Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, Komunitas Konservasi Indonesia, dan beberapa *stakeholders* lain. Klaim yang dibuat oleh Uni Eropa adalah terbentuknya konsesi restorasi hutan hujan di Jambi yang dikelola oleh konsorsium *Birdlife*. Selain itu, Uni Eropa juga melaporkan bahwa mereka berhasil menerapkan peraturan-peraturan teknis terkait perlindungan hutan, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaannya (EC, 2011).

Hadiz mencatat bahwa skema *good governance* yang melekat dalam proses desentralisasi tersebut tidak menyentuh wilayah struktural, sehingga dinamika ekonomi politik yang menjadi 'pusat' dari oligarki kekuasaan di pemerintah daerah justru terabaikan (Hadiz, 2010; Hadiz, 2004). Di sisi lain, *good governance* juga menjadi sarana untuk melembagakan kapitalisme melalui sarana-sarana institusional di pedesaan (Carroll, 2012). Sehingga, diskursus-diskursus tentang *good governance* yang dimunculkan oleh Uni Eropa sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari konsolidasi kapitalisme yang secara sistematis ditanamkan di Indonesia sejak 1998.

Kesimpulan

Tulisan ini menelusuri dimensi-dimensi politis dari agenda pembangunan internasional yang dicanangkan oleh Uni Eropa. Ada satu pertanyaan: melalui program penguatan masyarakat sipil dan paket donornya, bagaimana Uni Eropa mendisiplinkan subjek dunia ketiga dan menanamkan diskursus *good governance* dalam praktik pembangunan di Indonesia pasca-reformasi? Menggunakan perspektif Foucauldian, tulisan ini berkesimpulan bahwa proses pendisiplinan subjek tersebut berlangsung melalui program penguatan masyarakat sipil yang menjadi satu paket dari proyek besar *good governance*. Uni Eropa memberikan dukungan dana bagi organisasi masyarakat sipil sebagai bagian penting dari promosi norma-norma terkait HAM dan Demokrasi. Program Uni Eropa tersebut dilakukan dengan memberikan *grant* bagi kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi atau pemberdayaan masyarakat. Bersamaan dengan proses tersebut, Uni Eropa juga membebaskan norma-norma *good governance* melalui kerangka acuan dan kondisionalitas yang berada satu paket dengan pemberian *grant* tersebut, dan secara tidak langsung menginklusi organisasi masyarakat sipil mitra dalam kerangka *governmentality* yang mereka bangun.

Melalui inklusi masyarakat sipil tersebut, kerangka *good governance* diterima sebagai "norma" yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil untuk dibebankan kepada negara. Norma tersebut kemudian diadaptasi oleh negara dalam UU dan beberapa dokumen perencanaan yang menjadi *guideline* utama dalam kerja-kerja birokrasi, yang termanifestasi dalam adopsi kata-kata *good governance* dan norma yang melekat di dalamnya di dokumen-dokumen tersebut. Secara lebih kritis, pendekatan Foucauldian melihat bahwa proses tersebut tidak bisa sekadar dimaknai sebagai berjalannya proses demokratisasi, tetapi juga punya relasi kekuasaan tertentu. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembebanan norma-norma *good governance* ini tidak lepas dari skema *neoliberal governmentality* yang ditanamkan di Indonesia pasca-reformasi, dan sangat erat dengan pengurangan peran negara dan penjaminan atas mekanisme pasar.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa manifestasi dari 'kekuatan Uni Eropa', dalam sudut pandang ini, adalah menciptakan kepatuhan terhadap prasyarat, kondisionalitas, dan diskursus yang dibawa oleh Uni Eropa dengan memberikan proyek yang didanai. Agenda penguatan masyarakat sipil menjadi *technologies of the self* yang menjadi instrument bagi Uni Eropa untuk mendisiplinkan sekaligus membentuk identitas Uni Eropa dengan menjadikan negara sedang berkembang sebagai *The-Other* yang harus dibentuk melalui bantuan dan asistensi. Oleh sebab itu, tulisan ini menyarankan agar kajian tentang hubungan Uni Eropa dan Indonesia tidak berhenti sebatas pada 'sisi normatif' sebagaimana dipercayai oleh proponent 'kekuatan normatif', tetapi juga perlu membongkar relasi-relasi kekuasaan di baliknya. Dengan cara ini, kajian eropa bisa menjadi lebih kritis dalam menyikapi masalah-masalah negara sedang berkembang. ●

Referensi

Buku dan artikel

- Acharya, A. 2004. "Regional Security in a Multipolar World: European Union in Global Perspective". *FES Briefing Paper*. Berlin: Frederich Ebert Stiftung.
- Amundsen, I. 1999. *Political Corruption: An Introduction to the Issues*. Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- Abrahamsen, R. 2000. *Disciplining Democracy: Development Discourse and Good Governance in Africa*. London: Zed Books.
- Börzel, TA, Pamuk, Y, Stahn, A. 2008. "Good Governance in the European Union". *Berlin Working Paper on European Integration No. 7*. Berlin: Freie Universität Berlin.
- Baylis, J. and Smith, S. 2008. *The Globalization of World Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Beitz, CR. 1978. *Political Theory and International Relations*, New Jersey: Princeton University Press.
- Bossuyt, J. 2006. "Mainstreaming Civil Society in ACP-EU Development Cooperation" dalam Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Bull, H. 1982. Civilian Power Europe : A Contradiction in Terms ?" *Journal of Common Market Studies*, 12 (2): 149-164.
- Burchill, S. "Liberalism" dalam Burchill, S. (ed). *Theory of International Relations*. Basingstoke: Palgrave.
- Carbone, M. (2007). *The European Union and International Development: The Politics of Foreign Aid*. London dan New York: Routledge.

- Carroll, T. 2010. *Delusions of Development: The World Bank and the Post-Washington Consensus in Southeast Asia*. Hampshire: Palgrave.
- Carroll, T. 2012. *Neoliberal Development Policy in Asia Beyond the post-Washington Consensus*. Jakarta: TIFA and INFID.
- Casarini, N. 2007. "The Making of European Union's Strategy Towards Asia" dalam Casarini, N. and Musu, C. (eds). *European Foreign Policy in an Evolving International System: The Road Towards Convergence*. Hampshire and New York: Palgrave.
- Chandler, D. 2013. "'Human-Centred' Development? Rethinking 'Freedom' and 'Agency' in Discourses of International Development" *Millenium* 42 (1): 3-23.
- Crawford, G. 2006. "European Union and Strengthening Civil Society in Africa" dalam Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Diez, T. 2005. "Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering 'Normative Power Europe'" *Millenium*, 33 (3): 613-636.
- Donnelly, J. 2005. "Realism" dalam Burchill, S. (ed). *Theory of International Relations*. Basingstoke: Palgrave.
- Elgström, O. 2007. "European Union as a Leader in International Multilateral Negotiations – a Problematic Aspiration?" *International Relations* 21 (3): 445-458.
- Erb, M. and Sulistyanto, P. 2009. "Indonesia and the Quest for "Democracy" dalam Erb, M. and Sulistyanto, P. (eds). *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders*. Singapore: ISEAS.
- Escobar, A. 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Fiott, D. 2011. "European Union's Normative Power in a Multipolar World" *EUSA Biennial Conference 2011*. Boston, EUSA.
- Foucault, M. 1972. *The Archaeology of Knowledge*. London: Routledge, terj. Inyik Ridwan Munzir.
- Foucault, M. 1984. *The Foucault Reader*. New York: Pantheon.
- Foucault, M. 1991. "Governmentality" dalam Akhil Gupta (ed). *Anthropology of The State*. New York: Blackwell.
- Gillespie, R, and Youngs, R. 2002. "Themes in European Democracy Promotion" in Gillespie, R and Youngs, R. (eds). *European Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa*. London and Oregon: Frank Cass.
- Hadiwinata, BS. 2003. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London: Routledge.
- Hadiwinata, BS. 2008. "Civil Society Networks and the Promotion of Democracy in Southeast Asia" *Paper Presented at the International Cultural*

- Forum*, Bertelsmann Foundation of Germany and Diplomatic Academy of Vietnam, 12 November 2008.
- Hadiz, VR. 2004. "Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives". *Development and Change* 35 (2): 697-718.
- Hadiz, VR. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hadiz, VR. and Robison, R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Hadiz, VR. and Chalmers, I. 1997. *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. London: Routledge.
- Harriss, J. 2003. *Depoliticizing Development: the World Bank and Social Capital*. Delhi: Left Word.
- Hiariej, E. 2003. "Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia" *Jurnal Sosial Politik* 10 (1): 91-120.
- Hill, H. and Narjoko, D. 2010. "Managing Industrialisation in a Globalising Economy: Lessons from the Soeharto Era" dalam Aspinall, E. dan Fealy, G. (eds). *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU E-Press.
- Hurt, SG. 2006. "Civil Society and European Union Development Policy" in Lister, M. and Carbone, M. (ed). *New Pathways in International Development : Gender and Civil Society in EU Policy*. Hampshire and Burlington: Ashgate.
- Hyde-Price, A. 2006. "Normative Power Europe: A Realist Critique". *Journal of European Public Policy* 13 (2): 217-234.
- Kovler, A. 2011. "Human Rights in a Contemporary Society and European Values: Critique of Eurocentrism" *EU-Russia Paper*, September.
- Kegley, CW. and Wittkopf, ER. (2006). *World Politics: Trends and Transformation*. Belmont: Thomson-Wadsworth, third edition, revised.
- Kunio, Y. 1986. *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Larner, W. and Walters, W. 2009. "Introduction: Global Governmentality: Governing International Spaces" in Larner, W and Walters, W. (eds). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. (London: Routledge).
- Li, TM. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press. Translated to Bahasa Indonesia by Pujo Semedi and Hery Santoso.
- Manners, I. 2002. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" *Journal of Common Market Studies*, 40 (2): 235-258.
- McGowan, L. 2007. "Theorising European Integration: Revisiting Neo-Functionalism and Testing Its Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy" *European Integration*, 11 (4).

- Maull, H. 2006. "Introduction" dalam Maull, H. (ed). *Germany's Uncertain Power: Foreign Policy of the Berlin Republic*. Basingstoke and New York: Palgrave.
- Merlingen, M. 2007. "Everything Is Dangerous: A Critique of 'Normative Power Europe'" *Security Dialogue* 38 (4): 435-453.
- Morgenthau, HJ. 1956. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York, New York: Alfred A. Knopf.
- Nadesan, NH. 2008. *Governmentality, Biopower, and Everyday Life*. London: Routledge.
- Negri, A. and Hardt, M. 2000. *Empire*. Boston: President and Fellow, Harvard College.
- Nye Jr, JS. 2002. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*. Oxford: Oxford University Press.
- Pollack, M. 2010. "Living in a Material World: A Critique of "Normative Power Europe" *EUSA Review* 23 (2):3-6.
- Poot, H., Kuvenhoven, A., and Jansen, C. 1989. *Industrialisation and trade in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Reus-Smit, C. 1999. *The Moral Purpose of the State*. Princeton: Princeton University Press.
- Rojas, C. 2004. "Governing through the Social: Representations of Poverty and Global Governmentality" in Larner, W. and Walters, W. (eds). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. New York and Canada: Routledge).
- Rose, N. 1999. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rowan, C. 2009. *The Politics of Water in Africa: The European Union's Role in Development Aid Partnership*. London: Tauris Academic Studies.
- Scholte, JA. 2004. "Civil Society and Democratically Accountable Global Governance", *Government and Opposition* 39 (2). 211-33.
- Shapiro, IJ. 1989. "Textualizing Global Politics" dalam Der Derian, J. and Shapiro, IJ. *Intertextual/International Relations*. Ontario: McMillan.
- Sheridan, A. 2005. *Michael Foucault: The Will to Truth*. London: Routledge.
- Sjursen, H. 2006. "EU as 'Normative Power: How Can This Be?'" *Journal of European Public Policy* 13 (2): 235-251.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Smith, M. and McGuire, S. 2008. *The European Union and the United States: Competition and Convergence in The Global Arena*. Basingstoke: Palgrave.
- Tanzi, V. 1998. "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures". *IMF Staff Papers*. Washington: International Monetary Fund.
- Taylor, D. 2009. "Normativity and Normalization" *Foucault Studies* 7: 45-63

- Telo, M. 2006. *Europe: A Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order*. Basingstoke: Palgrave.
- Tiley, R. 2012. "Normative Power Europe and Human Rights: A Critical Analysis" *Polis Journal* 7 (2): 450-494.
- Widjojanto, A. et. al. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- Zaborowski, M. 2006. *EU as A Global Power*. Warsaw: EU Institute for Security Studies and European Centre Natolin.

Dokumen

- European Union. *Press Release on Indonesia-European Union Partnership & Cooperation Agreement*. Document accessed from . <http://europa.eu/>
- European Commission. *European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Strategy Paper 2007 - 2010*.
- European Commission. *Indonesia -European Community Strategy Paper 2007-2013*.
- European Commission. *Blue Book 2013: EU-Indonesia Development Cooperation 2012*
- European Union Delegates to Indonesia, Brunei Darussalam, and ASEAN. *Project Overview*. Document accessed from <http://eeas.europa.eu/>

Wawancara

- Amin Sudarsono (Project Manager at PATTIRO, Jakarta), 3 January 2011.

Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia Belanda (1909-1940)

Achmad Sunjayadi

Abstract

This paper discusses the views regarding tourism, especially the role of Vereeniging Toeristenverkeer (VTV)-Association of tourism- in the Netherlands Indies from the newspapers published in the Netherlands. The newspapers are Het Vaderland (HV), Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), Algemeen Handelsblad (AH) during the period of 1909 to 1940. From the three newspapers, the articles about promotion of tourism in the Netherlands Indies, are found to be dominant. They provide also an overview of criticism and suggestion about tourism in the Netherlands Indies, which can be understood because the three newspapers were the liberal newspapers.

Keywords: the views of the Netherlands newspapers, colonial tourism, the Dutch East Indies

Pendahuluan

Pada bulan April 1908 *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV)- (Perhimpunan turisme) didirikan di Weltevreden, Batavia. Didirikannya perhimpunan ini dapat dikatakan menjadi awal turisme modern di Hindia-Belanda. Perhimpunan ini merupakan lembaga semi pemerintah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dan anggotanya. Peresmianya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Heutsz di Weltevreden, Batavia.¹ Tujuan didirikannya VTV adalah untuk mengembangkan dan mendorong turisme di Hindia-Belanda. Salah satunya dengan mendirikan sebuah *bureau* (kantor) yang memberikan informasi mengenai turisme di Hindia (*Eerste Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer*, 1908:3).

Pandangan dan pemberitaan dari surat kabar Belanda mengenai suatu isu di Hindia-Belanda pernah menjadi kajian beberapa peneliti, khususnya isu yang berhubungan dengan pemerintah Hindia-Belanda dan Belanda. Misalnya dalam membahas opini publik di Belanda tentang *Lombokaffaire* (peristiwa Lombok) 1894-1895, van Goor (1985) mengulas *Nieuwe Rotterdamsche Courant*

¹ Lihat kajian Achmad Sunjayadi mengenai perhimpunan ini dalam *Vereeniging Toeristenverkeer Batavia 1908-1942: Awal Turisme Modern di Hindia-Belanda* (Depok: FIB UL, 2007).

(NRC), *De Middelburgsche Courant*, *Het Centrum*, *Het Algemeen Handelsblad*, *De Amsterdammer*, *Het Vaderland*, *Zutphensche Courant*.

Berkaitan dengan turisme, kajian yang dilakukan Marieke Bloembergen (2002) dalam *De Koloniale Vertoning: Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931)* membahas sekilas surat kabar *Het Vaderland* dan *Nieuwe Rotterdamse Courant*. Khususnya tentang pameran internasional di Amsterdam dan Paris serta identitas Hindia-Belanda yang menjadi obyek pameran mewakili Belanda. Sementara itu kajian yang khusus membahas pandangan dan pemberitaan tentang turisme oleh surat kabar Belanda pada masa Hindia-Belanda belum banyak diungkap.

Artikel ini membahas berbagai pandangan dan pemberitaan tentang turisme di Hindia-Belanda dari surat kabar yang terbit di Belanda, antara lain *Het Vaderland*, *Nieuwe Rotterdamse Courant*, *Algemeen Handelsblad* sepanjang periode 1909-1940. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pandangan dan pemberitaan surat kabar Belanda mengenai turisme di Hindia-Belanda?

Alasan dipilihnya tiga surat kabar itu karena surat kabar tersebut memiliki tiras yang banyak di kota-kota besar di Belanda, seperti Den Haag, Amsterdam, Rotterdam dan memuat artikel tentang turisme Hindia-Belanda, khususnya tentang VTV. Pemilihan temporal 1909 sebagai periode awal berkaitan dengan masa awal setelah berdirinya VTV pada 1908. Sedangkan alasan 1940 adalah sejak 10 Mei 1940, Belanda dikuasai Jerman sehingga hubungan Belanda dan Hindia-Belanda dapat dikatakan mengalami kesulitan yang akibatnya kegiatan turisme di Hindia-Belanda tidak menjadi perhatian utama publik di Belanda.

Seperti diungkapkan Sartono Kartodirdjo bahwa apa yang setiap hari disajikan oleh surat kabar kepada kita bukanlah kejadian-kejadian melainkan pernyataan tentang kejadian atau fakta (Kartodirdjo, 1992:17). Berita surat kabar terkadang merupakan kutipan dan tak jarang bersifat obyektif. Data yang dimuat dalam surat kabar, selain fakta juga merupakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran spekulatif. Fakta-fakta dalam surat kabar pada umumnya sering kurang teliti atau berita-beritanya masih dangkal. Hal ini karena singkatnya waktu untuk mengolah informasi-informasi atau untuk mengumpulkan informasi dari banyak sumber tertutup, misalnya laporan pemerintah yang bersifat rahasia. Selain itu, segi-segi subjektivitas surat kabar cukup jelas, karena pada umumnya ia menjadi saluran aspirasi dari golongan politik atau sosial tertentu (Abdurahman, 2007:44-45).

Oleh karena itu berita surat kabar tersebut perlu dibandingkan dengan sumber lain. Antara lain dengan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda dan VTV serta berbagai produk dalam bentuk laporan tahunan, buku catatan perjalanan, kartu pos, artikel dan iklan di majalah sezaman serta buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Dalam menganalisa berita surat kabar Belanda tersebut digunakan model komunikasi David K. Berlo (1960). Model ini dikenal dengan model SMCR, *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima). Menurut Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Lalu pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Sedangkan saluran adalah medium yang membawa pesan, dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Dalam komunikasi massa, terdapat banyak saluran antara lain televisi, radio, surat kabar, buku dan majalah (Mulyana, 2007:162).

Dalam artikel ini yang menjadi *source* (sumber) adalah kelompok penerbit surat kabar (*Algemeen Handelsblad*, *Het Vaderland* dan *Nieuwe Rotterdamsche Courant*). *Message* (pesan) yaitu berita mengenai turisme di Hindia-Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda. Sedangkan *channel* (saluran)-nya adalah surat kabar dan *receiver* (penerima)-nya adalah masyarakat pembaca surat kabar tersebut yaitu masyarakat yang tinggal di Belanda atau yang paham bahasa Belanda. Menurut model Berlo, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor: keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya (Mulyana, 2007:162-163).

Sekilas perkembangan surat kabar di Belanda: *Algemeen Handelsblad*, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, *Het Vaderland*

Perkembangan surat kabar di Belanda pada awal abad ke-20 tidak lepas dari fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Belanda. Fenomena tersebut dikenal dengan nama *verzuiling* (*pemiliran*) yang muncul sejak akhir abad ke-19. Saat itu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Belanda bukanlah hal yang aneh. Perbedaan tersebut berakar pada perubahan masyarakat di Belanda.

Pada masa Perdana Menteri Van Hall (1853-1856) terjadi perbedaan pendapat di bidang pendidikan (*onderwijskwestie*) yang dikenal dengan *schoolstrijd* (perlawanan sekolah) di mana sekolah yang diselenggarakan oleh pihak swasta tidak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Sementara itu sekolah-sekolah yang diselenggarakan pihak swasta kebanyakan adalah sekolah Kristen. Kenyataan ini membuat pihak Protestan ortodoks marah (Mulder, 1989:229).²

Pada 1870 di Belanda dikenal aliran-aliran seperti anti revolusioner, Katolik Roma, liberal dan konservatif (Mulder, 1989:227). Di berbagai wilayah di Belanda muncul berbagai organisasi yang masing-masing memiliki orientasi dari berbagai aliran tersebut, terutama dalam hal agama dan pandangan hidup. Masyarakat Belanda terpetak ke dalam kelompok Kristen Protestan,

2 Kelompok Protestan ortodoks inilah yang pertama kali membentuk pilarnya dan disusul oleh kelompok lainnya (van der Lans, 1998:35)

Katolik, liberal dan sosialis yang masing-masing memiliki gereja, siaran radio, surat kabar, perhimpunan pekerja, sekolah, rumah sakit, perhimpunan olah raga bahkan toko dan perusahaan sendiri (van der Lans, 1998:34).

Sebenarnya surat kabar di Belanda sudah ada sejak abad ke-17, sekitar tahun 1618 yaitu *Courante uyt Italien, Duytslandt & C* (www.historiek.net diakses 25 Januari 2011). Dua abad kemudian, sekitar tahun 1850 sudah ada 92 terbitan dan sembilan surat kabar dengan jumlah sirkulasi di bawah 100.000 eksemplar (Aerst, 2010:229).

Pada tahun 1896 surat kabar di Belanda telah berjumlah lebih dari 60 surat kabar. Surat kabar terbesar adalah *Het Nieuws van den Dag* (Amsterdam) dan *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, masing-masing bertiras 36.000 eksemplar. *Nieuwe Rotterdamsche Courant* merupakan koran liberal seperti halnya *Algemeen Handelsblad* (Amsterdam) dan *Het Vaderland* (Den Haag) yang dibaca oleh kelompok masyarakat berpendidikan. *Het Nieuws van den Dag* merupakan salah satu surat kabar populer untuk masyarakat luas. Namun, seperti surat kabar liberal lainnya surat kabar ini sirkulasinya hanya terbatas di Amsterdam dan sekitarnya (van der Lans, 1998:88).

Algemeen Handelsblad merupakan salah satu surat kabar berpengaruh di Amsterdam yang berhaluan liberal. Koran ini didirikan oleh J.W. van den Biesen pada tahun 1828. Surat kabar ini berada pada puncaknya ketika meletus Perang Boer (1880-1902) di Afrika Selatan hingga Perang Dunia II. Ketika itu koran ini dipimpin oleh Charles Boissevain. Pada awalnya *Algemeen Handelsblad* hanya terdiri dari beberapa lembar yang memuat berita perdagangan, tetapi dengan meletusnya kerusuhan di Belgia menjelang tahun 1830, berita-berita *Algemeen Handelsblad* beralih ke berita-berita politik. Dengan alasan yang sama pada 1830 koran ini mulai terbit harian. Nama-nama lain yang ikut terlibat dalam koran ini adalah A. Polak, C.K. Elout, dan D.J. von Balluseck (www.iisg.nl, diakses 26 Januari 2011).

Nieuwe Rotterdamsche Courant merupakan koran berhaluan liberal berpengaruh yang berkantor pusat di Rotterdam. Sebelum bernama *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, koran ini bernama *Rotterdamsch staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad* yang terbit pertama kali pada 13 Agustus 1843. Pergantian nama koran terjadi pada 1 Januari 1844. Tokoh di balik koran ini adalah Henricus Nijgh, penerbit dan pedagang buku di Rotterdam (www.webstore.iisg.nl, diakses 11 Februari 2014).

Het Vaderland didirikan pada 12 April 1869 di Den Haag (Plasse 2005:27). Pendiri surat kabar ini adalah Albertus Willem Sijthoff, Dirk Antonie Thieme, dan Martinus Nijhoff (kakek dari penyair Martinus Nijhoff). Dalam dunia penerbitan di Belanda mereka dikenal dengan julukan 'tiga serangkai'. Di bawah pimpinan Hendrik Goeman Borgesius³ sebagai pemimpin redaksi,

3 Hendrik Goeman Borgesius pada 1897-1901 menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Pierson (<http://www.inghist.nl/>, diakses 20 Maret 2011)

Het Vaderland pada periode 1871 hingga 1877 menjadi salah satu koran berpengaruh yang berhaluan liberal progresif dan menjadi corong suara *de Liberale Unie* (Persatuan Liberal) yang dibentuk pada 1885 (www.iisg.nl, diakses 26 Januari 2011).

Pandangan dan pemberitaan tentang turisme di Hindia-Belanda dalam *Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad*

Pada bagian ini dibahas mengenai berbagai bentuk pandangan dan pemberitaan tentang turisme di Hindia-Belanda dari masing-masing surat kabar *Het Vaderland* (HV), *Nieuwe Rotterdamsche Courant* (NRC) dan *het Algemeen Handelsblad* (AH). Pandangan dan pemberitaan tersebut terbagi atas beberapa bagian yaitu ada yang merupakan kutipan dari surat kabar yang terbit di Hindia-Belanda, seperti *Bataviaasch Nieuwsblad*, *Het Nieuws van Den Dag*, *Java Bode*. Selain itu ada yang merupakan kutipan dari hasil notulensi rapat *Volksraad*, *Tweede Kamer* di Belanda dan juga laporan tahunan VTV. Walaupun mereka mengutip, terkadang diberikan pula pendapat mereka baik dalam bentuk sekedar pujian, saran dan kritik. Hal yang kerap dibahas antara lain:

A. Subsidi dan keuangan

Masalah keuangan merupakan salah satu persoalan penting dalam suatu organisasi karena menjadi nyawa organisasi tersebut. Di samping bersumber dari kontribusi para anggotanya, subsidi dari pemerintah merupakan hal yang paling diharapkan. Apalagi jika organisasi tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Perdebatan seputar subsidi untuk VTV diangkat oleh *Algemeen Handelsblad* (15-10-1909) yang memuat hasil rapat *Tweede Kamer* di Belanda khususnya tentang *Indische Begroeting* (anggaran untuk Hindia) dalam *voorlopig verslag* (laporan sementara). Banyak anggota yang tidak setuju dengan usulan subsidi bagi *Vereeniging Toeristenverkeer*. Namun, kenyataannya meskipun ada pihak yang tidak setuju dengan pemberian subsidi, lembaga ini tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Usulan subsidi ini diungkapkan dalam lampiran A *Eerste Jaarverslag der Vereeniging Toeristenverkeer 1908* (Laporan tahun pertama VTV).

Usulan subsidi diajukan sebelum diresmikannya VTV oleh pemerintah pada 1908. Mereka mengajukan permohonan supaya subsidi bagi VTV dimasukkan untuk tahun anggaran 1909. Selain subsidi dari pemerintah, VTV mendapatkan bantuan dari pihak swasta sebesar 17.305 gulden.⁴

⁴ BT 10 Mei 1908 No.1; MGS 10 Mei 1908 No.1349 Koleksi ANRI Jakarta. Jumlah subsidi yang diberikan pada tiga tahun pertama sebesar 15.000 gulden. Pada tahun pertama pemerintah bersedia memberikan subsidi sebesar 25.000 gulden (*Eerste Jaarverslag VTV, 1909:1*)

Dalam *NRC* (3-09-1926) dikemukakan mengenai upaya untuk menaikkan subsidi pemerintah Hindia-Belanda. Subsidi awalnya senilai 10.000 gulden lalu bertambah menjadi 20.000 gulden.⁵ *NRC* membandingkan subsidi bagi turisme di Hindia dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah Swiss sebesar 2 juta Frank, pemerintah Jepang 1 juta yen, demikian pula pemerintah Afrika Selatan yang memberikan subsidi sebesar 90.000 gulden.

Pada awal berdirinya, lembaga VTV mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 25.000 gulden dan 20.000 gulden. *Het Vaderland* (4-08-1938) berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh *Volksraad*, mengungkapkan subsidi bagi VTV. Tujuannya adalah pelayanan VTV bagi turisme di Hindia-Belanda semakin baik. Namun, meskipun subsidi sudah ditetapkan, *Het Vaderland* memberikan kritiknya kepada pemerintah. Kritiknya adalah pemerintah sebaiknya menaikkan subsidi kepada VTV dengan alasan subsidi yang diberikan tidak mencukupi, khususnya untuk propaganda VTV.

Satu bulan sebelumnya *Het Vaderland* (22-07-1938) melaporkan hasil sidang *Volksraad*, khususnya dalam pembicaraan anggaran *department van Verkeer en Waterstaat*. Van Dias dari *Economische Groep* mengajukan argumen mengenai pentingnya bantuan pemerintah untuk memajukan turisme. Van Dias mengemukakan inisiatif pihak swasta yang berperan besar dalam memajukan turisme. Ia menunjukkan banyak perusahaan dan bahkan penduduk pribumi yang akan mendapatkan keuntungan jika turisme mengalami kemajuan. Oleh karena itu untuk mendukung turisme memang diperlukan banyak biaya.

Masih berhubungan dengan perihal keuangan, *Het Vaderland* (20-10-1936) mengutip *Java Bode* membahas pengaruh menurunnya nilai tukar gulden terhadap mata uang asing lainnya seperti poundsterling Inggris, dolar Amerika dan Singapura terhadap turisme di Hindia Belanda. Namun, menurut surat kabar tersebut, menurunnya nilai tukar gulden seharusnya justru menjadi stimulus tambahan bagi turisme di Hindia-Belanda bukan menjadi hambatan. Maksudnya adalah sasaran turis, tidak hanya turis dari luar Hindia-Belanda melainkan dari dalam wilayah Hindia-Belanda sendiri.

B. Laporan tahunan, jumlah turis dan konferensi internasional

Sebagai lembaga yang sifatnya semi milik pemerintah, VTV mengeluarkan laporan tahunan secara teratur. Laporan tahunan VTV dimuat secara berkala oleh surat kabar Belanda tersebut. *Algemeen Handelsblad* (29-03-1910) memuat laporan tahun kedua VTV dan laporan tahun keempat (*AH*, 16-02-1912) yang juga dimuat oleh *NRC* (11-04-1912). Sedangkan laporan tahun ketujuh VTV dimuat *NRC* (22-05-1915). Dalam *NRC* (9-11-1928) dan *Het Vaderland* (22-

⁵ Dalam Laporan tahunan VTV 1926 jumlah total subsidi dan kontribusi 56.724,50 gulden (*Negentiende Jaarverslag* VTV, 1926)

11-1928) dimuat laporan tahunan kedua puluh VTV 1927. Selain laporan, diungkapkan pula kritik mengenai sedikitnya jumlah turis asal Belanda yang datang ke Hindia pada 1927. Jumlah mereka bila dibandingkan dengan turis berkebangsaan lain jauh lebih sedikit. Dalam laporan tahunan itu disebutkan bahwa upaya *Nederlandsche Reisvereniging* (Perhimpunan Perjalanan Belanda) untuk meningkatkan jumlah turis tidak berarti banyak (*Twintigste Jaarverslag* VTV 1927:1).

Berdasarkan data dari laporan tahunan VTV sepanjang tahun 1919-1929 pada tabel berikut kita dapat melihat perbandingan turis Belanda dengan turis berkebangsaan asing lainnya.

Tabel 1.

Jumlah turis berdasarkan kebangsaan yang datang ke kantor VTV untuk meminta informasi tahun 1919 -1929

	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
Penduduk setempat *	2056	2445	2264	2370	2390	2396	2201	2953	3189	3220	3096
Inggris**	640	795	879	948	950	966	1184	1277	1653	1339	1742
Amerika	268	495	683	657	632	621	981	923	1009	1234	1382
Jepang	293	280	229	137	145	147	321	253	157	187	212
Jerman	14	168	133	121	127	131	278	358	319	386	427
Prancis	52	57	74	67	73	71	78	98	35	118	243
Belanda	75	139	186	111	125	133	104	773	217	247	316
Lain-lain	123	249	114	188	193	201	218	205	324	256	287
Total	3521	4628	4562	4599	4636	4666	5365	6840	6903	6987	7764

* kebanyakan adalah orang Belanda

** pada tahun 1926 termasuk Australia dengan perincian 844 orang Australia dan 433 orang Inggris

Sumber: *Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer 1922-1929* (Batavia:Javasche Boekhandel & Drukkerij)

Selain kritik terhadap minimnya jumlah turis, khususnya dari Belanda, masalah lama masa tinggal turis juga menjadi sasaran kritik. *Het Vaderland* (17-06-1931) menyebutkan setelah masalah transportasi yang berhasil diatasi, masalah berikutnya adalah masa tinggal para turis. Para turis biasanya hanya tinggal selama empat hari di Jawa. Masa tinggal para turis ini dirasakan masih terlalu singkat. Oleh karena itu perlu diupayakan supaya para turis tersebut lebih lama tinggal di Hindia-Belanda.

Sebaliknya dalam laporan tahunan VTV tahun 1930 yang dimuat *Het Vaderland* (22-05-1931) disebutkan bahwa meskipun di dunia mengalami *malaise* pada 1930, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap turisme dan VTV. Bahkan jumlah turis yang datang semakin meningkat dan para turis yang datang, tinggal lebih lama apalagi setelah dibukanya rute penerbangan

Batavia-Palembang-Singapura oleh *Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM)- maskapai penerbangan Hindia Belanda- sehingga memberikan peluang kepada para turis di Singapura untuk berlibur di Jawa dan Bali meskipun hanya memiliki waktu satu minggu.

Dalam NRC (18-02-1926) terdapat artikel opini yang menyebutkan bahwa Hindia 'ditemukan' oleh Amerika pada masa perang tapi penemuan itu 'mengancam' negeri itu sendiri (Hindia). Tidak dijelaskan maksud ancaman di sini. Apakah hal tersebut berkaitan dengan fasilitas atau ada pihak yang tidak menginginkan Hindia menjadi objek turisme. Artikel berjudul *Bevordering van het toerisme in Indië* membahas kunjungan Van Zalinge, direktur *Koninklijke Paketvaart Maatschappij*- Maskapai pelayaran kerajaan- (KPM) ke Amerika. Salah satu tujuan kunjungan pejabat KPM adalah untuk meningkatkan jumlah turis Amerika ke Hindia-Belanda. Dalam lima belas tahun terakhir (sejak 1911) ada ratusan turis yang mengunjungi Hindia meskipun daerah yang kerap dikunjungi adalah Jawa yang mendapat julukan '*the pearl of the East*' dan '*the paradise of the South Sea*'. Namun, kunjungan tersebut belum terorganisasi dengan baik. Oleh karena belum terorganisasi dengan baik, sebuah kantor pariwisata di Singapura dengan alasan persaingan menghalangi kunjungan para turis dari Singapura ke Hindia. Hal ini tidak diketahui oleh mereka yang berkepentingan dengan turisme di Hindia, khususnya VTV.

Perubahan nama VTV dalam bahasa Inggris yang menjadi *Travellers Official Information Bureau* untuk mencegah salah pengertian dibahas dalam laporan tahunan ke-22 VTV 1929 (*Het Vaderland*, 22-05-1930). Perubahan ini untuk menegaskan bahwa perhimpunan ini bukan sekedar biro pariwisata biasa.⁶ Hal yang kerap terjadi adalah para turis asing sering keliru menganggap VTV sama dengan biro perjalanan swasta. Pada masa itu memang ada biro perjalanan swasta, seperti Enizom Tourist Office yang khusus menyelenggarakan perjalanan ke Eropa (*De Tourist Guide and Garoet Express*, 1923: 3). Selain itu penegasan dengan pernyataan bahwa VTV bukan sekedar biro pariwisata biasa tentunya berkaitan dengan upaya pengukuhan organisasi VTV sebagai organisasi resmi yang dikelola oleh pemerintah Hindia-Belanda. Berbeda dengan biro pariwisata biasa yang dikelola oleh pihak swasta, VTV merupakan organisasi turisme resmi pemerintah yang tujuannya tidak hanya mencari keuntungan.

Berkaitan dengan jaringan turisme internasional, *Het Vaderland* (15-02-1935) memberitakan konferensi internasional di Tokio pada 2 Mei 1935. Tujuan acara ini adalah untuk mengembangkan turisme di Timur Jauh. Para peserta yang hadir dalam konferensi ini antara lain organisasi turisme dan perusahaan kereta api dari Jepang, China, Manchukuo, Indo-China Prancis, *Strait Settlements*, Hindia-Belanda, Ceylon, Siam, India, Filipina, Amerika Serikat, Inggris, Turki dan Jerman. Kehadiran Hindia-Belanda dalam acara

6 AG 30 September 1928 No.37862. Koleksi ANRI Jakarta.

ini memperlihatkan upaya mengembangkan turisme di wilayah lain yang tentunya berkaitan dengan upaya promosi, seperti yang menjadi tujuan dibentuknya organisasi VTV yaitu mengembangkan dan mendorong turisme di Hindia-Belanda.

C. Promosi: reklame, majalah, buku panduan, brosur turisme di Hindia

Pemberitaan yang banyak ditulis oleh tiga surat kabar Belanda tersebut adalah promosi turisme di Hindia-Belanda. Promosi tersebut mulai dari foto, buku panduan, majalah, brosur, reklame hingga *vouwblad* (majalah lipat) yang disajikan dalam bentuk artikel berita kutipan dari surat kabar lain maupun advertorial (iklan yang berupa berita).

Berbagai penerbitan untuk promosi antara lain 1000 eksemplar gambar Pulau Jawa, *kunstkalender* (kalender seni) sebanyak 3000 eksemplar serta 1000 eksemplar kartu pos⁷ oleh VTV (*AH*, 27-02-1910). Lainnya adalah *Come to Java, Visit Java and Sumatra, Batavia*. Penerbitan *Come to Java*⁸ sebanyak 20.000 eksemplar juga dimuat (*NRC* 23-07-1926 dan *NRC*, 13-01-1927). Selain kartu pos dan buku diterbitkan pula majalah bulanan 'Tourism' dengan tiras sebanyak 10.000 eksemplar.⁹ Majalah ini dibagikan secara gratis di luar negeri, khususnya di negara-negara sekitar Hindia-Belanda (*HV*, 11-01-1927 dan *NRC*, 13-01-1927).

Het Vaderland (11-01-1927) memuji upaya promosi dan pengembangan turisme di Hindia-Belanda yang dilakukan oleh VTV. Berkaitan dengan promosi lainnya, *Het Vaderland* (10-04-1929) memuat berita mengenai majalah "Tourism" edisi khusus Januari-Februari mengenai turisme di Flores yang dihiasi dengan gambar-gambar indah mengenai Flores.¹⁰

Sehubungan dengan daerah tujuan turisme di Hindia, Jawa dan Sumatra merupakan daerah yang kerap dikunjungi oleh para turis. Oleh karena itu perusahaan pelayaran *Rotterdam Lloyd* menerbitkan buku khusus mengenai wilayah tersebut. Hal ini dimuat *NRC* (02-02-1927). Buku tersebut adalah *Java, the holiday paradise and Sumatra*, buku yang diterbitkan oleh *Rotterdam Lloyd Royal Mail Line*. Buku itu memuat saran: 'Don't hurry! Java does not give you of

7 Berbagai obyek kartu pos bisa dilihat dalam Marcell Bonnet dan Stephen Grant. 1994. "Bonser baisers de Batavia: Cartes postales des Indes Nééerlandaises", *Archipel* 47:53-85 dan Leo Haks dan Steven Wachlin. 2004. *Indonesia: 500 early postcard*. Singapore: Archipelago Press.

8 Menurut Laporan Tahunan VTV 1926 *Come to Java* yang diterbitkan tersebut merupakan edisi ketiga dan menjadi buku panduan turisme untuk Jawa yang populer (*Negentiende Jaarverslag* VTV 1926:6).

9 Majalah 'Tourism' ini diterbitkan pertama kali pada bulan Juni 1926 sebanyak 1000 eksemplar lalu pada bulan Desember sebanyak 3500 eksemplar (*Negentiende Jaarverslag* VTV 1926:6). Lihat *Tourism in the Netherlands Indies* 1927 Vol.1, No.7,8,9,10. Weltevreden: G.Kolff & Co.

10 Edisi khusus lainnya adalah edisi khusus tentang Yogyakarta *Tourism in the Netherlands Indies* Vol XIII 1938.

its best when subjected to rapid sight-seeing' yang merupakan reklame Rotterdam Lloyd.

Ajakan untuk berkunjung ke tempat lain, selain Jawa yang ditujukan untuk warga Belanda yang tidak tinggal di Hindia-Belanda juga dilakukan. Misalnya *Het Vaderland* (11-01-1927) menuliskan bahwa khusus bagi warga negara Belanda yang mengunjungi Timur Jauh, misalnya dari Singapura atau Australia dapat melakukan kunjungan singkat ke Hindia-Belanda karena VTV telah merancang perjalanan dalam waktu singkat. Bahkan, bagi mereka yang hendak mengenali wilayah Hindia-Belanda, disarankan tidak hanya Jawa, atau 'tanah masa depan' Sumatra tetapi juga ke wilayah timur yaitu kepulauan Maluku yang indah. VTV bersedia memberikan informasi dan merancang perjalanan. Jika diinginkan dapat pula dirancang perjalanan ke wilayah Nieuw-Guinea yang misterius.¹¹ Sebenarnya hal ini cukup menarik mengingat fasilitas yang belum memadai di wilayah-wilayah timur tersebut sehingga unsur petualangan menjadi unsur yang dijual kepada para turis.

Promosi turisme Hindia-Belanda juga dilakukan di negara induk, di Belanda. *Het Vaderland* (14-06-1928) memuat artikel tentang informasi gratis mengenai turisme di Hindia-Belanda yang diberikan oleh *Algemene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer* (ANVV) di Den Haag. ANVV didirikan pada tahun 1916 yang terdiri dari beberapa organisasi turisme di berbagai wilayah di Belanda. Tujuan dari ANVV adalah mengembangkan turisme dari dan ke Belanda. Dalam hal ini ANVV bertindak sebagai wakil VTV di Belanda. ANVV di Belanda itu menyebarkan bahan propaganda turisme Hindia (*21ste Jaarverslag VTV 1928:7*).

Bentuk promosi lainnya adalah penerbitan seri kota-kota di Hindia-Belanda dalam bentuk *vouwbladen* (majalah lipat) oleh VTV yang dimuat dalam *Het Vaderland* (3-05-1930). Majalah lipat itu untuk sementara menggunakan bahasa Inggris dilengkapi dengan foto hasil reproduksi yang baik. Isinya antara lain mengenai Buitenzorg (Bogor) bergambar *Botanische Tuin* (Kebun Raya Bogor). Penerbitan seri berikutnya adalah Batavia. Rencana penerbitan seri kota-kota di Hindia ini dimuat dalam laporan tahunan 1928.¹²

Selain menjadikan masyarakat berbahasa Inggris di Eropa, Asia, Australia maupun Amerika sebagai sasaran promosi, masyarakat berbahasa

11 Hal ini juga dimuat dalam Laporan Tahunan VTV 1927. Dalam laporan disebutkan bahwa program mengunjungi wilayah Sumatra, Bali, Celebes, Borneo, Lombok, Flores, dan kepulauan Maluku terus meningkat (*Twintigste Jaarverslag VTV, 1927:1*).

12 Berita *Het Vaderland* (3-05-1930) mengenai rencana penerbitan seri kota-kota di Hindia-Belanda dikutip dari *Bataviaasch Nieuwsblad* (2-04-1930). Ada pernyataan dari P.J. van Baarda sekretaris VTV yang tidak dikutip oleh *Het Vaderland* yaitu rencana penerbitan seri tersebut tergantung pada kerjasama, khususnya pendanaan, dengan pemerintah lokal (kota-kota). Kerjasama tersebut tampaknya tidak terwujud sehingga yang terbit bukan seri kota-kota di Hindia-Belanda melainkan seri wilayah di Hindia-Belanda. Dalam *24ste Jaarverslag VTV 1931* yang dikutip *De Sumatra Post* (28-05-1932) menyebutkan bahwa penerbitan itu menitikberatkan pada tiga wilayah yaitu Jawa, Sumatra, dan Bali dengan moto "*The Romance of the East, The Comfort of the West, in Java-Sumatra-Bali.*"

Perancis juga menjadi sasaran promosi turisme Hindia Belanda. *NRC* (14-08-1929) dan *Het Vaderland* (17-08-1929) memuat reklame mengenai penerbitan buku panduan dalam bahasa Prancis *Java, l'Eden sous les tropiques; Bali, l'île de Beauté* dan *Visitez Sumatra le pays des contrastes* yang diterbitkan sebanyak 60.000 eksemplar dan dikirimkan ke berbagai alamat. Penerbitan buku itu dimaksudkan karena meningkatnya minat para turis dari Prancis dan Belgia terhadap Hindia-Belanda. *Het Vaderland* juga memberikan apresiasi atas diterbitkannya buku panduan dengan mengucapkan selamat kepada VTV untuk upaya dan kerja keras mereka, mengingat nilai pemasukan yang diperoleh VTV ternyata kecil (HV, 17-08-1929). Rencana penerbitan buku-buku tersebut dimuat dalam Laporan Tahunan VTV 1929 (*22ste Jaarverslag VTV 1929:19*).

Penerbitan majalah lipat yang berisi informasi mengenai Batavia dimuat *Het Vaderland* (7-05-1930). Sembilan tahun kemudian diterbitkan buku panduan turisme edisi Batavia yang beritanya dimuat *Het Vaderland* (23-04-1939). *Het Vaderland* memuji buku tersebut yang ditulis dengan baik serta dilengkapi dengan gambar indah. VTV pun mengeluarkan seri terbitan tentang Hindia-Belanda yang penuh dengan gambar. Seri terbitan itu antara lain *West-Java, Mid-Java, East-Java* dan *North Sumatra, Middle Sumatra, South Sumatra, Bali, Celebes, de Molukken, de Klein Soenda eilanden, dan Borneo*. Seri terbitan ini mendapatkan pujian yang terbaik. Terbitan ini akan dikirim ke 12.000 alamat di seluruh dunia (HV,17-05-1930).

Sepuluh tahun kemudian *Het Vaderland* (23-02-1940) memuat ulasan mengenai terbitan VTV edisi Sumatra Utara. Dalam terbitan tersebut dimuat foto-foto pemandangan, bangunan, fasilitas umum dan kegiatan budaya di wilayah tersebut, antara lain Medan, pegunungan Barisan, Danau Toba, Prapat, Sabang, Teluk Tapatuan, Kota-Raja. Edisi khusus lainnya adalah Garut. *Het Vaderland* (30-10-1934) memuat tentang penerbitan edisi khusus Garut dan sekitarnya yang merupakan hasil kerjasama antara *Vereeniging "Mooi Garoet"* dan VTV. Dalam edisi khusus ini memuat 57 foto, 47 foto di antaranya mengenai Garut dan sekitarnya. Sebelumnya diterbitkan edisi Batavia, Buitenzorg, Sukabumi dan Garut. Serta edisi khusus yang memuat candi di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Prambanan. Hal ini dimuat dalam (*Het Vaderland,13-06-1936*).

Berbagai reklame, khususnya reklame promosi turisme Hindia yang digunakan di luar Hindia mendapatkan perhatian sangat serius. Dalam *NRC* (3-09-1926) terdapat berita mengenai aturan mengenai pembuatan reklame turisme Hindia di luar negeri (internasional). Beberapa bulan sebelumnya disebutkan alasan kurangnya reklame turisme Hindia Belanda di luar negeri karena tidak tersedianya bahan yang cukup dan kurangnya pengalaman mengenai reklame internasional. Oleh karena itu *NRC* membandingkan VTV

dengan ANVV (*Algemene Nederland Vereeniging Vreemdelingenverkeer*) yang membuat iklan untuk menjual turisme di Belanda.

Menjelang 1930-an Bali menjadi obyek turisme yang dianggap mampu menggantikan Jawa yang sudah tidak 'murni' lagi. Jawa yang telah dieksploitasi habis-habisan dan menjadi kian modern memerlukan pengganti yang lebih 'murni'. Akhir 1920-an Bali menjadi pilihan pengganti Jawa. *NRC* (19-09-1928) memuat rangkaian acara upacara adat di Bali bulan Agustus-Oktober 1928, antara lain ngaben di Klungkung, ngaben di Kahuan Tampaksiring, tari keris di Kesiman, Denpasar.

Ketenaran Bali membuat Bali menjadi tema utama saat pameran kolonial internasional di Paris tahun 1931 (Bloembergen, 2004:181). Pintu masuk paviliun Hindia-Belanda di lokasi pameran, menggunakan duplikat pintu masuk pura Camenggon di Sukawati, Bali Selatan dengan tinggi 50 meter lengkap dengan ukiran dari batu granit. Menurut *Het Vaderland* (02-10-1931) saat berlangsung, pameran dihadiri oleh 25.050.638 pengunjung.

Upaya mempromosikan Bali terus dilakukan. Salah satunya dengan menerbitkan buku panduan turisme Bali. *Het Vaderland* (6-09-1931) memuat artikel tentang terbitan baru VTV mengenai Bali dalam bahasa Belanda dan Inggris. Para penyumbang artikel adalah P.J. van Baarda sekretaris VTV yang menulis sejarah singkat Pulau Bali. Lalu Dr. R. Goris, pejabat dinas purbakala di Hindia yang menulis mengenai kepercayaan dan adat di Bali, lalu artikel mengenai perjalanan di Bali dari A. Morzer Bruyns, pejabat K.P.M. Namun, harian ini mengkritik terbitan VTV tersebut yang dikatakan seperti buku pelajaran sekolah. Lalu buku tersebut dibandingkan dengan buku karya Prof. C. Lekkerkerker *Bali en Lombok. Overzicht der Literatuur omtrent deze eilanden tot einde 1919* (1920) yang lebih baik. Oleh karena itu *Het Vaderland* menyayangkan biaya besar yang dikeluarkan untuk menerbitkan buku tersebut tidak sebanding dengan kualitas buku yang dihasilkan.

Namun, setelah hampir sepuluh tahun Bali menjadi wilayah yang dikunjungi oleh banyak turis, Bali mengalami banyak perubahan dan mulai mendapatkan kritikan. *Het Vaderland* (21-01-1940) memuat artikel mengenai rasa prihatin dan kritik terhadap Bali. Bali dikatakan tidak lagi suci, apalagi dengan penduduknya. Penyakit parah, penyalahgunaan minuman alkohol dan opium merusak tubuh penduduk Bali. Kritik juga ditujukan kepada para 'raja' dan 'pejabat tinggi' yang tidak berupaya menjaga budaya di Bali. Dengan kata lain Bali tidak lagi menjadi pulau alami demikian pula dengan penduduknya. Bali menjadi tontonan yang penuh dengan reklame dan bertujuan uang semata. Turisme dan reklame membuat Bali dan khususnya penduduk Bali selatan kian rusak.¹³

13 Dalam *Indisch Verslag* 1937 disebutkan bahwa Dr. C. Lekkerkerker dengan Prof. P.G. Groenen serta Dr. V.E. Korn dalam pertemuan *Indisch Genootschap* 16 Desember 1932 mengkritik upaya pemerintah Hindia-Belanda yang menjadikan Bali sebagai *living museum* (museum hidup).

D. Orang pribumi: pemandu wisata pribumi, anak muda, pengemis

Hal menarik dari artikel surat kabar Belanda mengenai turisme di Hindia adalah para pelaku turisme, khususnya penduduk pribumi. Misalnya kritik terhadap uji coba digunakannya pemandu wisata pribumi (*AH*, 29-03-1910). Uji coba ini harus dihentikan setelah dilakukan persiapan selama berbulan-bulan karena adanya keluhan terhadap ketidakacuhan dan ketidaktahuan para pemandu wisata tersebut. Uji coba dengan pemandu wisata pribumi menurut *AH* dianggap sebagai suatu kegagalan total. Hal ini membuktikan bahwa para pribumi tidak cocok menjadi pemandu wisata. *AH* menyarankan supaya tugas ini kembali menjadi tugas pemandu Eropa. Pada saat itu pemerintah mencoba pemandu wisata Eropa berbahasa Inggris seperti halnya di India.

Perhatian juga ditujukan pada lembaga pemandu turisme di berbagai tempat di Hindia (*NRC*, 3-09-1926). Maksudnya adalah supaya VTV memiliki pemandu turisme Eropa, India dan pribumi. Syarat utama dari ketiga kategori tersebut adalah kemampuan berbahasa Inggris. Masih mengenai pemandu wisata, *Het Vaderland* (17-06-1931) mengkritik pendidikan bagi para pembantu pribumi yang akan melayani para turis. Disarankan pula supaya para anak muda Jawa belajar bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dengan para turis yang berbahasa Inggris.¹⁴

Kritikan lain ialah mengenai perlunya dibuat aturan untuk anak-anak yang mengemis supaya tidak mengganggu para turis (*AH* 16-02-1912). Sebagai ilustrasi Jan Poortenaar seorang seniman yang melakukan perjalanan bersama keluarganya ke Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra pada tahun 1920-an mengungkapkan pengalamannya ketika berkunjung ke Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ketika Poortenaar dan keluarganya tiba di sana, mereka dikerubuti oleh para pengemis tua dan anak-anak. Ke mana pun mereka pergi, mereka selalu dibuntuti oleh para pengemis itu (Poortenaar 1989: 45-46).

E. Fasilitas hotel dan transportasi

Berbagai berita dan opini tentang fasilitas serta obyek turisme juga menjadi tema. Berita tentang beberapa rencana pembangunan hotel dimuat oleh *AH* (16-02-1912). Rencana tersebut merupakan inisiatif pihak swasta di Surabaya, Yogya dan Bandung serta rencana besar untuk pembangunan hotel baru di Batavia dan Makassar. Demikian halnya dengan pembentukan *Hotelbond*

¹⁴ Dalam *Jaarverslag* ke-20 VTV dimuat juga mengenai penguasaan bahasa para pemandu turis di Bali. Tujuannya supaya mereka dapat menjelaskan pada para turis asing yang tidak mengetahui bahasa Bali, agama dan adat istiadat penduduk setempat sehingga tidak menimbulkan salah paham antara turis dan penduduk setempat (*Twintigste Jaarverslag van Vereeniging Toeristenverkeer* 1927:6).

yang salah satu tujuannya adalah turut mengembangkan turisme di Jawa (NRC, 15-05-1911).

Pendirian hotel di Denpasar yang memiliki 16 kamar double yang didirikan oleh KPM dilaporkan NRC (19-09-1928).¹⁵ Informasi tentang daftar hotel yang dibuat oleh VTV Weltevreden dimuat *Het Vaderland* (8-06-1929). Daftar itu memuat seluruh hotel di Hindia-Belanda, baik di Jawa maupun luar Jawa.¹⁶

Dukungan perusahaan pelayaran dalam pendirian *officiel toeristen bureau* untuk mendukung turisme diungkap NRC (03-04-1927) mengutip *Het Nieuws van de dag*. NRC (11-01-1925) mengutip *Bataviaasch Nieuwsblad* menyebutkan kapal yang membawa turis dan bersandar di pelabuhan hanya diwajibkan membayar satu hari meski bersandar lebih dari satu hari. Tujuan kebijakan itu adalah untuk mendukung turisme. NRC (23-04-1927) mengutip *Het Nieuws van de dag* menyebutkan datangnya 3000 turis Amerika dalam "Round the world cruise" dari Agen Thomas Cooks di Singapura. Agen Thomas Cook di Singapura yang melakukan perjalanan di Jawa berkomentar tentang kenyamanan baik dalam perjalanan maupun penginapan di Jawa.

Sarana transportasi merupakan penunjang turisme di Hindia-Belanda. Setelah sempat mengalami masalah dengan jumlah turis, terutama periode 1906-1919. Jumlah turis di Hindia meningkat. Hal itu tak lepas dari kerjasama dengan perusahaan pelayaran, perusahaan kereta api. Khusus perusahaan pelayaran KPM dengan kapal barunya mereka mampu menarik minat penumpang. Hal ini dimuat *Het Vaderland* (17-06-1931).

Het Vaderland (11-11-1933) melaporkan kunjungan J.Kracht, agen perusahaan pelayaran Dollar S.S Lines milik Amerika di Singapura. Kracht, seperti yang dikutip dari *Bataviaasch Nieuwsblad* berpendapat kecilnya peluang turisme di Hindia apabila tidak ada perubahan kebijakan. Disebutkan pula untuk menarik para turis Amerika yang ingin mengunjungi Bali maka KPM diminta untuk menurunkan tarif. Karena tidak semua turis Amerika adalah orang kaya (jutawan). Kebanyakan dari mereka adalah orang yang bekerja keras (pekerja biasa) mengumpulkan uang untuk membiayai perjalanannya.

Menurunnya nilai tukar gulden dibahas *Het Vaderland* (20-10-1936). Menurut *Het Vaderland* menurunnya nilai tukar tersebut justru dapat mengembangkan dan meningkatkan turisme dalam negeri Hindia. Harian ini menunjuk pada tarif keluarga yang diterapkan oleh *SS-Staatsspoorwegen*

15 Lihat A.H Hamilton, 1930, *Bali*. Batavia: Officiele Vereeniging Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië, hal.8.

16 Pada tahun 1938 VTV menerbitkan *List of the Principal Hotels in the Netherlands Indies* yang juga merupakan daftar hotel di Hindia-Belanda. Dalam daftar itu memuat nama hotel, tarif dan fasilitas yang ditawarkan kepada para tamu (*List of the Principal Hotels in the Netherlands Indies*, 1938:3-5). Dari daftar yang dikeluarkan diketahui tarif termurah adalah 4,5 gulden per malam untuk hotel Mataram, Grand Hotel Sarangan dan Bromo Hotel. Sedangkan tarif termahal adalah Grand Hotel Brastagi sebesar 30 gulden per malam. Secara khusus diterbitkan pula majalah *Hotelblad* yang mengulas berbagai hal berhubungan dengan hotel di Hindia-Belanda.

(perusahaan kereta api negara) dan KPM. Jadi mereka yang tinggal di Jawa dapat melakukan perjalanan ke Sumatra dan sebaliknya yang tinggal di luar Jawa dapat melakukan perjalanan di Jawa menggunakan transportasi kereta api dan kapal laut.¹⁷

Perkembangan transportasi pendukung turisme lainnya seperti pesawat udara juga menjadi tema berita. Pada 1 November 1928 secara resmi jalur penerbangan udara di Hindia-Belanda oleh KNILM dibuka. Jalur perdananya ialah Batavia-Bandung (*Luchtreisgids* KNILM 1929:10).

Mengenai KNILM ini *Het Vaderland* (18-08-1936) memuat laporan tahunan KNILM tahun 1935. Dalam *NRC* (15-07-1928) yang mengutip majalah *Oedaja* ditulis mengenai penerbangan pada malam hari, khususnya rute Amsterdam-Batavia. Waktu yang ditempuh menjadi empat hingga lima hari.¹⁸ Dibukanya jalur penerbangan itu diharapkan ikatan antara Belanda dan Hindia-Belanda menjadi *vereniging van het Groot- Nederlandsche staatverband* (Persatuan Negara Belanda Raya). Jalur lain dari KNILM, khususnya negeri tetangga juga menjadi perhatian. *Het Vaderland* (22-05-1931) memuat pembukaan jalur Batavia-Palembang-Singapura. Dengan dibukanya jalur ini para turis yang berasal dari Singapura dan hanya memiliki waktu seminggu dapat mengunjungi Jawa dan Bali.¹⁹

F. Objek turisme

Berkaitan dengan objek turisme terdapat artikel dalam bentuk opini yang dimuat dalam *NRC* (10-08-1920). Artikel tersebut ditulis oleh Dr. Roelof Broersma penulis *Oostkust van Sumatra* (1919). Broersma membahas keindahan rumah di Minangkabau. Ia berpendapat bahwa jika ada wilayah dengan potensi turisme yang besar di Sumatra, dua wilayah itu adalah Pantai Barat Sumatra dan Tapanuli.

Dalam *NRC* (22-11-1922) dimuat lagi artikel dari Dr. Roelof Broersma tentang VTV. Ia membandingkan situasi sebelum dibentuknya VTV (lima belas tahun lalu) dengan situasi setelah dibentuknya VTV. Dalam artikel itu disebutkan pendapat Van Heutsz, mantan Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda 1904-1909 mengenai peran para pengusaha dan turis akan menghidupkan turisme di Hindia-Belanda. Tema opini serupa ditulis P.J. van Baarda sekretaris VTV dalam *Het Vaderland* (1-05-1933). Baarda menulis artikel mengenai situasi sebelum dan setelah VTV didirikan. Menurut pendapatnya kebanyakan para turis datang untuk melihat keindahan *'The paradise of the East'* atau *'The garden of Eden'* di Hindia.

17 Lihat iklan *Staatsspoorwegen* dalam *Java's heerlijkheid en glorie*, 1937 dan *See Java by rail* serta *Java from easy chair* dalam *Tourism in the Netherlands Indies*, 1938.

18 Lihat tawaran terbang di atas pulau Jawa pada malam hari dalam *Nitour Reisbulletin* edisi November 1941.

19 Lihat iklan *Visit Java* (*Official Tourist Bureau Batavia* 1935, koleksi KITLV).

Dalam *NRC* (16-05-1926) muncul kembali artikel opini dari Broersma dengan judul *Heerlijkheid van Lebak*. Seperti tulisannya tentang Minangkabau, Broersma juga menulis tentang keindahan alam perbukitan di Lebak, Banten. Namun, menurut Broersma Lebak masih tertutup bagi para turis karena sarana jalan dari Rangkasbitung belum memadai. Meskipun demikian, kondisi jalan ke Lebak menurut Broersma sudah sedikit lebih baik. Apalagi bila dibandingkan dengan kondisi jalan pada masa Eduard Douwes Dekker (1820-1887) ketika bertugas di Lebak tahun 1857.

Promosi Turisme di Koloni dan Jumlah Turis dari Belanda

Pandangan ketiga surat kabar Belanda *Algemeen Handelsblad*, *Het Vaderland*, dan *Nieuwe Rotterdamsche Courant* yang berorientasi liberal periode 1909-1940 mengenai turisme di Hindia-Belanda didominasi oleh pandangan yang mendukung turisme di Hindia-Belanda. Dukungan tersebut dapat dilihat dari dominasi berita mengenai promosi turisme di Hindia-Belanda, terutama berita promosi turisme Hindia-Belanda yang dimuat oleh *Het Vaderland*.

Berita mengenai promosi turisme di Hindia-Belanda yang dimuat tentunya bertujuan meningkatkan jumlah turis dari negeri induk di Belanda untuk datang ke negeri koloni di Hindia-Belanda. Disamping berita mengenai promosi, diperkuat juga dengan berita yang memuat laporan tahunan serta subsidi untuk VTV (*Vereeniging Toeristenverkeer*) –perhimpunan turisme resmi dari pemerintah Hindia-Belanda, pemandu turisme dan objek turisme di Hindia-Belanda. Semua hal ini semakin mempertegas dukungan surat kabar Belanda berhaluan liberal terhadap turisme di Hindia-Belanda.

Meskipun terdapat dukungan dalam bentuk berita promosi turisme Hindia-Belanda, jumlah turis dari negeri induk (Belanda) masih jauh dari harapan karena pada praktiknya, jumlah masyarakat Belanda yang berkunjung ke Hindia sedikit. Sebagai gambaran dalam Laporan Tahunan VTV tahun 1930 yang dikutip oleh *het Vaderland* (22-05-1931) terdapat data mengenai jumlah turis yang datang ke Bali. Jumlah turis secara keseluruhan pada 1930 adalah 1555 orang, turis asal Amerika 665 orang dan turis asal Belanda ada 397 orang.

Tabel 2.

Asal negara dan jumlah turis yang mengunjungi Bali 1926-1930

	1926	1927	1928	1929	1930	Total 1926-1930
Belanda	257	361	365	438	397	1818
Australia	17	17	51	80	107	272
Amerika	91	150	224	480	665	1610
Jerman	25	40	63	94	103	325
Inggris	32	65	105	159	107	468
Lain-lain	23	47	119	177	197	545
Total	445	680	927	1428	1555	5035

Sumber: *Jaarverslag van Vereeniging Toeristenverkeer 1928-1929* (Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij); *Indisch Verslag 1931* (s' Gravenhage: Landsdrukkerij)

Sebenarnya perlu diteliti lebih lanjut apakah turis yang dimasukkan dalam kategori asal Belanda memang berasal dari Belanda atau dari tempat lain. Selain itu sedikitnya jumlah turis Belanda yang datang ke Hindia-Belanda perlu juga menjadi perhatian. Seperti catatan VTV dalam laporan tahunan 1927 yang menyayangkan sedikitnya jumlah turis Belanda (*21ste Jaarverslag VTV 1928:2*). Meskipun pemerintah Hindia-Belanda begitu gencar mempromosikan turisme di Hindia-Belanda kepada orang asing dan orang Belanda di Belanda, menurut orang Belanda yang tinggal di Hindia-Belanda masih banyak orang Belanda yang tidak mengetahui apa yang terjadi di koloni (van Goor, 2000:240).

Selain promosi, ketiga surat kabar juga memberikan kritik dan saran mengenai turisme di Hindia-Belanda, khususnya dalam artikel panjang yang berbentuk opini. Misalnya kritik *Algemeen Handelsblad* terhadap kualitas pemandu turis dari kalangan pribumi sehingga menurut mereka sebaiknya tugas itu ditangani oleh pemandu turis dari kalangan Eropa. Sementara itu *Het Vaderland* mengkritik pendidikan bagi para pembantu pribumi yang akan melayani para turis. *Het Vaderland* juga memberikan saran untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris bagi para pembantu sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan turis asing. Kritik lainnya adalah kritik *Het Vaderland* terhadap kualitas buku mengenai Bali yang diterbitkan oleh VTV dalam bahasa Belanda dan Inggris. Menurut *Het Vaderland* kualitas buku tersebut tidak sepadan dengan biaya besar yang dikeluarkan. Demikian pula kritik *Het Vaderland* terhadap Bali yang semakin rusak karena turisme.

Kritik terhadap subsidi pemerintah kepada VTV juga disampaikan oleh *Nieuwe Rotterdamsche Courant* (NRC) dan *Het Vaderland*. NRC membandingkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah Swiss, Jepang, Afrika Selatan untuk mendukung turisme dengan subsidi pemerintah Hindia-Belanda. *Het*

Vaderland secara tegas mengkritik pemerintah dan meminta pemerintah menaikkan subsidi tersebut karena tidak mencukupi untuk mempromosikan turisme Hindia-Belanda.

Penutup

Kabar dari koloni berupa pemberitaan mengenai turisme oleh surat kabar di Belanda, khususnya *Algemeen Handelsblad*, *Het Vaderland*, dan *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, memperlihatkan dominasi berita mengenai promosi turisme di Hindia-Belanda. Berita promosi tersebut menunjukkan pandangan ketiga surat kabar yang mendukung turisme di Hindia-Belanda. Disamping promosi ada pula berita tentang laporan, subsidi, pemandu turisme dan obyek turisme. Berita tentang turisme yang dimuat mulai dari satu paragraf (berita singkat) hingga artikel panjang. Dalam pemberitaan di ketiga surat kabar tersebut, khususnya artikel panjang, terkadang memuat pandangan berupa kritik dan saran mengenai turisme di Hindia-Belanda. Mengenai kritik, hal itu dapat dipahami karena haluan liberal ketiga surat kabar tersebut. Kritik yang dikemukakan menunjukkan adanya tanggapan dan reaksi masyarakat tertentu di Belanda terhadap turisme di Hindia, khususnya masyarakat yang terpetak dalam masyarakat liberal. Dikatakan masyarakat tertentu mengingat orientasi surat kabar tersebut mewakili situasi masyarakat di Belanda pada masa itu.

Meskipun demikian pengaruh berita-berita tersebut, khususnya promosi turisme di Hindia, masih jauh dari harapan karena pada praktiknya, jumlah masyarakat Belanda yang berkunjung ke Hindia sedikit. Padahal masyarakat pembaca dari ketiga surat kabar tersebut adalah masyarakat dari kalangan terpelajar. Sedikitnya jumlah turis Belanda tampaknya perlu diteliti lebih lanjut. Apakah faktor jarak antara negeri induk di Eropa dan negeri koloni di Asia atau faktor keterikatan secara emosional dengan Hindia (misalnya mereka pernah bertugas, memiliki saudara yang bertugas dan tinggal di Hindia) memberikan pengaruh terhadap keinginan turis dari Belanda untuk datang ke Hindia.

Pada sisi lain, bila kita juga dapat menganalisis surat kabar lain yang mewakili orientasi tertentu dalam masyarakat di Belanda, misalnya yang berorientasi Katolik, Protestan, dan sosialis, maka kita akan mendapatkan pandangan yang lebih utuh. Khususnya mengenai pandangan masyarakat Belanda tentang turisme di Hindia-Belanda. Perhatian surat kabar liberal terhadap turisme di Hindia-Belanda ini juga menimbulkan pertanyaan lain yaitu apakah hanya surat kabar liberal yang menaruh perhatian pada turisme di Hindia-Belanda. ●

Referensi

Arsip

- BT (*Besluit*) 10 Mei 1908 No.1. Koleksi ANRI Jakarta.
 MGS (*Missive Gouvernement Secretarie*) 10 Mei 1908 No.1349. Koleksi ANRI Jakarta.
 AG (*Gedeponeerde Agenda*) 30 September 1928 No.37862. Koleksi ANRI Jakarta.

Sumber-sumber resmi tercetak

- Jaarverslag Vereeniging Toeristenverkeer Batavia* (1909- 1929). Weltevreden: G.Kolff & Co
Indisch Verslag 1931.'s Gravenhage: Landsdrukkerij.
Indisch Verslag 1937. Batavia: Landsdrukkerij.

Buku

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bloembergen, Marieke.2002. *De Koloniale vertoning. Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen 1880-1931*. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
- 2004. *Koloniale inspiratie*. Leiden: KITLV.
- Goor, J. van. 1985. "De Lombokexpeditie en het Nederlandse Nationalisme" dalam J. Van Goor (ed), *Imperialisme in de Marge: de afronding van Nederlands-Indië*.Utrecht: HES uitgever.
- 2000. *Indische Avonturen*. Den Haag: Sdu Uitgevers.
- Haks, Leo dan Steven Wachlin. 2004. *Indonesia: 500 early postcard*. Singapore: Archipelago Press.
- Hamilton, A.H.1930. *Bali* . Batavia: Officiele Vereeniging Toeristenverkeer in Nederlandsch-Indië.
- "Java's heerlijkheid en glorie". 1937. Nitour uitgave october-november-december. Batavia: n.v. Nederlandsch-Indisch Toeristenbureau.
- Jos van der Lans dan Herman Vuijse. 1998. *Lage Landen Hoge Sprong; Nederland in beweging 1898-1998*. Wormer: Inmerc.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Mulder, Liek (eds). 1989. *Geschiedenis van Nederland. Van prehistorie tot heden*. Appeldoorn: van Walraven.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Plasse, January van de. 2005. *Crowning International Electronical Commission van de Nederlandse dagblad en opiniepers*. Amsterdam: Otto Cramwinckel.

- Poortenaar, Jan. 1989. *An artist in Java and other Islands of Indonesia*. Singapore: Oxford University Press [cetakan pertama 1928].
- Sunjayadi, Achmad. 2007. *Vereeniging Toeristenverkeer Batavia 1908-1942: Awal Turisme Modern di Hindia-Belanda*. Depok: FIB UI.

Artikel

- Aerts, Remieg. 2010. 'Civil society or Democracy? A Dutch Paradox' dalam *The International Relevance of Dutch History*, Klaas van Berkel dan Leonie De Goei (eds.) *The Low Countries Historical Review*. Vol. 125/2-3.
- Bonnef, Marcell dan Stephen Grant. 1994. "Bonser baiser de Batavia: Cartes postales des Indes Nééerlandaises", *Archipel* 47:53-85.

Majalah

- De Toerist-Guide and Garoet Express*, edisi 15 Juni 1923.
- Tourism in the Netherlands East Indies* Vol 1 No.7, 8, 9, 10 (1927).
- Tourism in the Netherlands East Indies* Jogjakarta number. Vol XIII No.2 (1938).
- Nitour Reisbulletin*, November 1941 (Batavia Centrum: Nederlandsch-Indisch Toeristen Bureau).

Surat kabar

- Algemeen Handelsblad*, (1909, 1910, 1912).
- Bataviaasch Nieuwsblad* (1930).
- De Sumatra Post* (1932).
- Nieuwe Rotterdamse Courant*, (1911, 1912, 1915, 1920, 1922, 1926, 1927, 1928, 1929).
- Het Vaderland*, (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940).

Situs

- www.historiek.net diakses 25 Januari 2011.
- www.iisg.nl diakses 26 Januari 2011.
- www.inghist.nl diakses 20 Maret 2011.
- www.webstore.iisg.nl, diakses 11 Februari 2014.

Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan¹

Paulus Rudolf Yuniarto

Abstract

There are two fundamental issues facing globalization problem today's, namely the economic competition and the threat of the nation's unity as the question of regional conflict. Indonesia, in this context, is expected more conscious and aware to various challenges of globalization. To respond the globalization challenges, since 2006, through a variety of research from research centers under Social and Humanities Deputies, Indonesia Institute of Science has addressed these challenges. Through a study of literature on all those conducted research, the availability of information and the institutional arrangement for the stakeholders (local and national) with reference to globalization problem has still become a fundamental issue. This paper aimed to recommendation policy on globalization in Indonesia, regarding the need for cooperation in the form of joint ventures and strategic alliances between governments, transnational actors and civil society. All those stakeholder are required to and obliging in order to face competition and also as part of disputes solutions as well as capacity building to prepare rough leader cadres. The Government could facilitate such efforts.

Keywords: Globalization, Stakeholder, Policy, Challenges

Pendahuluan: Tentang fakta globalisasi yang 'bermasalah'

Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti terjadi, selain memberi manfaat secara ekonomi namun membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia, yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya saja, perubahan arus perdagangan internasional membuat produk yang diciptakan negara di belahan benua lain dapat dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sampai di pelosok kota/desa di benua lainnya. Arus modal internasional membawa implikasi di pindahkannya

¹ Tulisan ini merupakan pengembangan dari makalah awal berjudul *Globalisasi dan Regionalisme: Kompleksitas Isu dan Pertalian Kepentingan Antar Aktor* yang dipresentasikan untuk kegiatan Seminar Refleksi Akhir Tahun Kedeputian IPSK LIPI 2011 bertajuk "Mempersiapkan Indonesia Menyongsong Era Baru 2015" tanggal 20 Desember 2011. Gd. Widya Graha Lt. 1 Jakarta. Penulis ucapkan terimakasih pada para peneliti LIPI: Mochtar Pabottingi, Rusydi Syahra, Carunia M. Firdausy, Adriana Elisabeth, dan Nanto Sriyanto atas komentar dan saran yang diberikan bagi penyempurnaan tulisan ini.

industri di negara maju ke negara berkembang, untuk mendapatkan tenaga buruh murah. Perubahan teknologi informasi memungkinkan berita-berita internasional diketahui seluruh dunia hanya dalam beberapa saat. Liberalisasi pasar nasional dan global membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya berbagai produk dan jasa bagi para konsumen di suatu negara. Akhirnya globalisasi turut mengubah pola berpikir dan berperilaku masyarakat.

Bersandar pada pendapat para ahli, seperti Roland Robertson dan David Held misalnya, mereka mengatakan bahwa perkembangan globalisasi sebenarnya bukan perkara baru dan telah dimulai sejak era imperium pada abad ke-15 dan berkembang dengan terbentuknya negara bangsa pada abad ke-17 (dalam Mubah 2010). Kemudian, penemuan-penemuan alat komunikasi dan transportasi telah mengakselerasi proses globalisasi sehingga memunculkan sebuah perubahan sosial akibat dari perkembangan teknologi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya dan transaksi ekonomi internasional. Dalam konteks ini, gagasan globalisasi tampaknya seringkali dipakai untuk merujuk pada perluasan dan pendalaman arus perdagangan, modal, teknologi, informasi internasional dalam sebuah pasar global yang cenderung terintegrasi. Selanjutnya James Petras dan Henry Veltmeyer mengatakan globalisasi dapat dimaknai sebagai proses liberalisasi pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia (Petras&Veltmeyer 2001: 11). Dalam pemaknaan yang lain, globalisasi juga bukan semata-mata terbatas pada ide kosmopolitanisme dalam arti semata gejala mondial, namun juga glokalisasi (*think globally act locally*). Di sini fenomena yang dikemukakan oleh Naisbitt menjadi salah satu contoh yang mengemuka. Dimana perpindahan lokasi industri menjadi pilihan untuk kedekatan sumber daya, serta juga perampingan struktur perusahaan seperti yang berkembang dengan perusahaan e-company semacam google[dot]com (Naisbitt 1995: 191).

Bila semua pandangan itu digabungkan, idea atau gagasan globalisasi dapat kita pahami sebagai suatu kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Artinya, bahwa suatu bentuk perilaku kehidupan, seperti pertukaran barang dan jasa, tidak hanya pertukaran modal, tetapi juga hal-hal lain semacam perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, migrasi atau berbagai fenomena *human trafficking* yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun (Arfani 2010: 1). Atau dengan kata lain, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide maupun perusahaan transnasional.

Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia (juga di negara-negara berkembang lainnya) terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentu saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang dalam perkembangannya mengancam persatuan dan kesatuan suatu bangsa karena konflik yang ditimbulkannya. Dua poin yang baru saja disebutkan adalah masalah mendasar yang menghadapi masalah globalisasi, yaitu kompetisi (persaingan ekonomi) dan ancaman persatuan bangsa. Pengaruh arus globalisasi pada dasarnya sulit untuk dapat dicegah dan memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan-kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulangnya. Indonesia, dalam hal ini, tentu saja di harapkan akan menjadi lebih sadar akan pentingnya mewaspadaai berbagai kemungkinan tantangan globalisasi. Sebab, pada era demokrasi ekonomi yang kita anut sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, bangsa Indonesia akan memasuki pusaran arus globalisasi dunia, suatu era yang penuh tantangan dan juga peluang.

Globalisasi dan segala isinya saat ini telah berkembang menjadi tema kajian yang cukup sering dibahas, terutama karena fenomena ini sangatlah kompleks yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi.² Berkaitan dengan perkembangan proses globalisasi, tulisan ini akan menelaah berbagai tema yang berkaitan dengan globalisasi. Metode penulisan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembacaan (studi literature) kajian mengenai globalisasi yang dilakukan di bawah pusat-pusat penelitian di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), yang mana telah banyak menghasilkan kajian, temuan dan analisa penelitian, yang sebagian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, terutama bagi pemerintah (para pengambil kebijakan) dan berbagai pihak/pemangku kepentingan di dalam negeri. Kemungkinan bahwa dalam pembacaan terhadap studi globalisasi di IPSK LIPI ini masih mengandung banyak kekurangan, baik sumber data maupun analisis yang diberikan. Tulisan ini sesuai dengan judul makalah adalah hendak memperlihatkan mengenai kompleksitas isu dalam masalah globalisasi sekaligus memperlihatkan berbagai macam kepentingan dan kebijakan di

2 Pandangan-pandangan yang muncul dalam melihat globalisasi antara lain; ada pandangan yang melihat bahwa globalisasi (terutama integrasi ekonomi) sebagai sebuah proses sejarah yang mendorong tercapainya peningkatan suatu kemajuan ekonomi suatu wilayah, menciptakan perdamaian, dan juga demokrasi bagi warga dunia. Di sis yang lain ada pula yang memandang bahwa, globalisasi melalui integrasi ekonomi (justru) akan mengakibatkan bentuk-bentuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan, atau semakin mendorong terciptanya kemiskinan baru. Di kalangan ilmuwan, banyak perbedaan dalam memaknai proses globalisasi ini dan juga perbedaan definisi yang disesuaikan dengan lingkup kajian, idealisme, maupun perspektif yang mereka gunakan.

dalamnya yang dapat menjadi perhatian kita semua dan diharapkan informasi yang diberikan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan pemerhati masalah globalisasi agar dapat menjawab tantangan dari globalisasi itu sendiri.

Beberapa Kajian Mengenai Globalisasi

Melihat implikasi yang isunya begitu beragam tetapi begitu mendalam dan spesifik konteks persoalannya, globalisasi bukanlah fenomena hitam putih yang bisa secara mudah dan cepat dipahami. Fenomena umum yang disebutkan di atas berada di sekitar kita, bahkan *embedded* dengan berbagai kepentingan kita. *Global governance*, integrasi ekonomi, regionalisme, liberalisasi perdagangan, daya saing, *common market*, transnasional migrasi, *political union*, *human security*, dan lain-lain adalah sebagian istilah maupun persoalan yang berkembang dalam proses globalisasi. Persoalan globalisasi dan segala kaitannya di berbagai area tidak saja menggambarkan kompleksitas persoalan dan kajiannya, tetapi juga sekaligus menawarkan ide atau berbagai alternatif bentuk pengelolaan dan penyelesaian persoalan di seputar isu tersebut.

Beberapa isu dalam globalisasi antara lain dapat di kelompokkan dalam beberapa tema kajian sebagai berikut.

1. Regionalisme: Upaya Integrasi Wilayah Menjadi Satu Entitas

Salah satu ciri penting globalisasi adalah dunia dan pasar kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain ke dalam satu lingkungan (region). Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah regionalisme ekonomi ASEAN dan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN (Elisabeth 2009). Studi ini memperlihatkan bahwa Asia Tenggara yang menjadi bagian penting dalam rantai globalisasi merasa perlu membangun kerja sama regional. Pemerintah negara Asia Tenggara sebagai pelaku globalisasi ekonomi kemudian membentuk ASEAN yang berupaya (salah satunya) mengintegrasikan kawasan ke dalam ekonomi dunia. Melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor, yang didukung oleh kebijakan untuk menarik masuk investasi modal asing lantas mendirikan kawasan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area/FTA). Secara bertahap negara-negara ASEAN mulai merapkan program, salah satunya yaitu membuka pasar dalam negerinya dan membuka perjanjian tentang pengembangan spesialisasi industri di antara negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri memilih untuk menjadi "sentra" industri otomotif, namun pada kenyataannya industri otomotif yang berkembang justru terjadi di Thailand. Industri sepeda motor di Thailand bahkan telah menjadi sebuah sistem industri yang sudah mapan rantai produksinya. Sebenarnya, kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan

diberlakukannya kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijakan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, dimana setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Terciptanya regionalisme ekonomi di Asia Tenggara diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini terutama bagi penanaman modal dari luar (*foreign direct investment*/FDI) agar kawasan ASEAN tidak hanya menjadi daerah produksi tetapi juga ekspor bagi negara lain. Dengan kata lain, integrasi ekonomi regional ASEAN berkembang ke arah yang lebih terbuka atau menjadi *open regionalism*.

Perkembangan terkini, studi regionalisme ASEAN adalah kesepakatan untuk membentuk Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada 2015 melalui tiga pilar: Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/AEC), Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*/APSC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*/ASCC). Berawal dari gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang dikaitkan dengan isu-isu perdagangan bebas barang, jasa dan investasi kemudian secara sistematis dan konseptual, analisis dimulai dengan pembahasan mengenai perkembangan konsep regionalisme dikaitkan dengan pembentukan AEC, serta pembahasan tentang pasar tunggal ASEAN. Satu hal yang paling kontroversial dalam pembentukan AEC adalah rencana pembentukan pasar tunggal ASEAN (*ASEAN single market*). Persoalannya bukan hanya mengenai pencapaian target waktu yang telah ditetapkan pada 2015, melainkan juga kemungkinan ASEAN membentuk pasar tunggal tanpa melalui uni pabean (*customs union*). Indonesia dalam hal ini telah ditetapkan sebagai koordinator sektor otomotif, salah satu dari 12 sektor prioritas dalam AEC. Peran ini merupakan peluang bagi Indonesia meningkatkan daya saing secara regional, sekaligus menjadi tantangan, khususnya dalam memanfaatkan peluang dan menyiapkan langkah-langkah strategis menuju AEC pada 2015. Upaya Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN sangat relevan dengan kesepakatan untuk mempertahankan kerjasama ekonomi regional yang terbuka, agar mampu berkontribusi dalam liberalisasi perdagangan global, serta menciptakan kawasan yang kompetitif dan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN dengan tingkat pertumbuhan ekonomi relatif setara (*equitable*).

Tantangan utama dalam membentuk pasar tunggal ASEAN ini sangat berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara yang masih dipegang teguh dan dijalankan oleh setiap negara anggota ASEAN. Sedangkan integrasi ekonomi kawasan yang utuh membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama untuk "mengurangi derajat kedaulatan negara" melalui kesepakatan perdagangan dan investasi yang dapat berlaku di setiap negara ASEAN. Sampai saat ini, ASEAN masih mengutamakan pendekatan harmonisasi, termasuk dalam

harmonisasi peraturan, meskipun sudah ada kesepakatan bersama untuk menjalankan kebijakan *ASEAN single window* yang harus terlebih dahulu diterapkan di tingkat nasional (Lihat Laporan Tim ASEAN P2P, dalam Wulandari 2009).

Selain isu regionalisme ASEAN, yang patut diperhatikan juga adalah pertumbuhan ekonomi yang amat pesat di kawasan Asia Timur Laut (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Cina Daratan) yang berdampak positif pada negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) karena terjadi peningkatan pesat dalam perdagangan antar negara dari kedua kawasan ini (Lihat Thee Kian Wie 2010: 1-8). Di samping ini negara-negara dari kawasan Asia Timur Laut sejak akhir 1980-an juga telah muncul sebagai sumber investasi asing langsung terbesar di kawasan Asia Tenggara (Thee Kian Wie 2010). Suatu aspek lain yang menarik dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur Raya adalah apa yang dinamakan fragmentasi produk (*product fragmentation*), yaitu penyebaran produksi dan perakitan komponen mobil (*auto parts*), komponen elektronika, dan komponen computer serta komponen-komponen dari barang-barang lain (kamera, pesawat TV, barang optik, perlengkapan musik, arloji, mesin jahit, barang-barang kimia dan farmasi, garmen) di berbagai negara dalam proses produksi yang terintegrasi secara vertikal. Fragmentasi produk ini dipicu oleh perluasan yang amat pesat dari kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan transnasional (*transnational corporations/TNCs*) dalam ekonomi global selama tiga dasawarsa terakhir (Athukorala 2007 dalam Thee 2010: 6). Beberapa aspek dari integrasi ekonomi regional di atas menunjukkan dengan jelas bahwa integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) selama beberapa dasawarsa terakhir telah berlangsung dengan pesat dan saling menguntungkan. Oleh karena ini ditinjau dari segi kajian wilayah, berbagai aspek dari integrasi ekonomi regional di Asia Timur patut dikaji secara lebih mendalam (Thee Kian Wie 2010: 7).

2. Dampak Perkawinan Investasi dan Liberalisasi Perdagangan

Globalisasi dalam salah satu definisi yang dikemukakan Jan A. Scholte (2000) berarti liberalisasi, yaitu proses penghapusan hambatan ekonomi dan perdagangan menuju dunia tanpa batas dan terbuka. Liberalisme ekonomi menjamin adanya kebebasan bagi *semua* insan/pelaku ekonomi untuk menentukan sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan bebas untuk memperdagangkannya. Namun bukan berarti liberalisme tanpa aturan. Aturan dan pengaturan merupakan keharusan dan harus disepakati bersama. Tanpa aturan dan pengaturan, kebebasan seseorang bisa mengurangi kebebasan orang lain, dan ini bertentangan dengan jiwa dari liberalisme ekonomi. Salah satu bentuk

liberalisasi perdagangan yang berkembang terwadahi dalam *World Trade Organisation* (WTO) dengan neoliberalisme sebagai ideologi utamanya. Hal inilah yang lebih jauh menjadi fokus penelitian Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Ekonomi IPSK LIPI³ dalam melihat kaitannya globalisasi dengan isu-isu perdagangan dan juga dampaknya terutama di sektor pertanian, industri dan tenaga kerja.

Salah satu penelitian ini melihat bahwa globalisasi telah berdampak luas pada pertanian di negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan pada berbagai input luar adalah bukti konkritnya. Pencabutan subsidi, privatisasi sumberdaya dan institusi pemerintah, longgarnya kran impor sebagai prasyarat untuk ekspor, lenyapnya berbagai sumberdaya dan budaya lokal, membiasnya pemberdayaan, dan mandegnya inovasi merupakan dampak langsung dari globalisasi. Penelitian ini telah menjawab konsekuensi-konsekuensi yang diterima Indonesia dengan tergabungnya dalam WTO. Tampaknya kondisi dan posisi sektor pertanian di era globalisasi secara umum masih memprihatinkan, perlu upaya meningkatkan produksi beras melalui produksi dan pengelolaan paska panen, perkembangan ekspor komoditas pertanian juga belum menggembirakan, perhatian terhadap pembangunan agroindustri sangat diperlukan, kemudian sub sektor perikanan perlu diidentifikasi sebagai sub-sektor yang dapat mendukung ketahanan sektor pertanian, dan terakhir pengembangan sub sektor kehutanan yang masih terbatas perlu untuk di tingkatkan. Di level masyarakat, bagaimana *civil society* di Indonesia merespon konsekuensi yang timbul dan juga posisi pemerintah Indonesia menghadapi respon masyarakat sipil ini di jawab pula. Globalisasi secara bersamaan mengandung dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi ini kemudian menjadi fokus respon kelompok *civil society* (LSM) yang tertuang dalam berbagai bentuk agenda, termasuk komunikasi dengan pemerintah. Pemerintah perlu menyadari bahwa komitmen Indonesia terhadap globalisasi tidak serta merta meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi warga negaranya dari dampak negatif globalisasi.

Dalam bidang liberalisasi perdagangan dan investasi, bahwa selain globalisasi telah mendorong terjadinya perubahan (ketimpangan) dalam struktur ketenaga kerjaan global (dimana hal ini perlu pemecahan masalah yang di lakukan secara bersama-sama), globalisasi juga telah mengubah dinamika perekonomian nasional yang mana mekanisme pasar jauh

3 Beberapa penelitian yang telah di lakukan tersebut antara lain dalam penelitian Agus R. Rahman dkk. 2007. *Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia*. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Carunia Mulya Firdausy (ed). 2004. *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta; Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.

menentukan ketimbang peran pemerintah. Berkurangnya peran pemerintah di khawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengorbankan pelaku ekonomi dengan daya saing rendah. Namun di sisi lain, globalisasi perlu untuk memberikan motivasi setiap pelaku ekonomi untuk bertindak efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Lantas bagaimana dengan keadaan perdagangan dan investasi di Indonesia. Tampaknya, keadaan perdagangan dan investasi mulai mengalami perubahan secara perlahan. Peningkatan laju investasi domestik dan asing mulai berkembang seiring dengan membaiknya dinamika iklim usaha yang telah di rumuskan dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun secara umum, upaya pengembangan investasi dan perdagangan nasional di era globalisasi harus terus dilakukan.

Pemikiran penting yang lain; *pertama*, investasi dan perdagangan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada sektor pertanian, melainkan juga pada sektor atau komoditi yang spesifik dapat diproduksi oleh berbagai daerah di Indonesia. Hal yang sama juga harus dilakukan dalam memanfaatkan perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pemanfaatan investasi dan perdagangan di daerah lintas batas telah memberikan kontribusi yang besar tidak hanya bagi perekonomian daerah, namun juga bagi perkembangan makro ekonomi nasional. *Kedua*, dominasi kapital terhadap buruh juga dapat menyebabkan mereka hanya menerima proporsi nilai tambah yang kecil. *Ketiga*, sektor finansial yang mendominasi sektor industri menyebabkan akumulasi nilai tambah 'semu', sehingga ekonomi *bubble* terjadi. Hal ini juga menyebabkan proses deindustrialisasi, sehingga menurunkan kemampuan sektor industri nasional dalam menyerap tenaga kerja. *Keempat*, proses pemiskinan dapat terjadi bila sistem persaingan pasar menyebabkan redistribusi kepemilikan aset (misalnya tanah) kepada korporasi. Sementara itu, alokasi anggaran program anti-kemiskinan memiliki keterbatasan akibat efektivitas program yang masih rendah.

3. Mobilitas Penduduk dan Persoalan HAM di dalamnya

Migrasi internasional adalah produk dari ekonomi global, dengan polanya yaitu perpindahan tenaga kerja dari negara miskin dengan kapital langka dan tenaga kerja banyak ke negara maju dengan kapital banyak dan tenaga kerja langka. Migrasi internasional antara lain memunculkan gelombang aktivitas jaringan sosial ekonomi yang bersifat regional dan global menjadi semakin marak, terbentuknya interaksi hukum yang bersifat global, dan munculnya segala bentuk aktivitas yang sifatnya 'transnasional'. Dalam konteks migrasi, lapangan transnasional dapat berarti bahwa pergerakan manusia sangat dekat dengan tujuan ekonomi, namun di sisi yang lain juga sangat rentan dengan persoalan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Contoh pada kasus moratorium TKI (lihat PSDR LIPI 2011), menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 pemerintah menetapkan soal kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2011 kebijakan moratorium resmi diberlakukan. Kebijakan moratorium adalah kebijakan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke suatu negara karena adanya persoalan-persoalan yang belum disepakati antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja. Kebijakan moratorium ini diberlakukan untuk menjawab maraknya TKW Indonesia yang bermasalah di Arab Saudi, mulai dari gaji tidak dibayar, penyiksaan oleh majikan, pelecehan seks, dan hukuman pancung yang dikenakan kepada TKW Indonesia. Pada awal November 2011, Menteri Perburuhan Arab Saudi berkunjung ke Indonesia dan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Indonesia yang salah satu agendanya soal moratorium TKW sektor informal. Pemerintah Indonesia tetap pada pendirian yaitu menerapkan kebijakan moratorium TKW sektor informal. Namun pihak Pemerintah Arab Saudi belum bersedia menandatangani MOU tersebut dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi belum bergeming dari posisinya untuk lebih bersikap adil dalam struktur hubungan kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga. Moratorium TKW sektor informal ke Arab Saudi dari perspektif jangka pendek adalah kebijakan yang berakibat tertundanya keberangkatan pekerja migran dan menghambat peluang usaha PJTKI serta pihak-pihak terkait. Dari perspektif ideal dan jangka panjang kebijakan moratorium merupakan upaya konsolidasi dan perbaikan sistem pengiriman tenaga kerja. Kebijakan ini juga sebagai upaya memperbaiki posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim. Upaya ini dilakukan agar Pemerintah Arab Saudi menandatangani MOU ketenagakerjaan dengan Pemerintah Indonesia.

Pada kasus mobilitas korban penyelundupan manusia juga merefleksikan gambaran besar wilayah atau negara asal mereka pada persoalan-persoalan politik yang sedang berkembang (Pudjiastuti 2010). Persoalan penyelundupan manusia yang masuk kawasan Asia Tenggara meskipun hanya sebagian kecil dari persoalan *displaced people* di dunia, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai bagian dari ancaman keamanan negara dan wilayah ASEAN. Bentuk-bentuk ancaman baru telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan ekonomi internasional, kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kehadiran pencari suaka dan juga pengungsi ataupun *stateless* di wilayah negara lain menimbulkan persoalan pelanggaran HAM dan memicu konflik antar negara, yang pada ujungnya menjadi persoalan politik keamanan yang kompleks. Upaya Indonesia untuk dapat tetap menghormati HAM bagi para pencari suaka dan pengungsi tersebut yaitu dengan memperbanyak

dan memperbaiki rumah detensi, membangun kerjasama bilateral dengan berbagai pihak antara kepolisian dan imigrasi Indonesia dengan Australia.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indonesia kini menghadapi tantangan baru dalam memasuki era globalisasi. Di sisi lain permasalahan internal juga datang silih berganti, isu-isu kritis yang sering muncul adalah adanya keinginan untuk melakukan perbaikan di segala bidang termasuk pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu komponen supra sistem pembangunan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain pembangunan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas adalah modal pembangunan, sehingga strategi pembangunan seharusnya memperhitungkan aspek dari pengembangan SDM, melalui proses pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Namun, fakta yang ada memperlihatkan bahwa pendidikan konvensional pada saat ini kurang memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada malah semakin memperlebar kesenjangan yang ada. Pengembangan SDM di masa depan melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan belajar yang paling cocok dimasa depan adalah pembelajaran inovatif (*innovative learning*) yang memadukan belajar mengantisipasi (*antisipative learning*) dan partisipasi learning atau belajar bersama orang lain. Pendidikan non formal perlu lebih proaktif dalam mereformasi visi, misi dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang sedianya berorientasi pada menghasilkan lulusan sebagai pencari kerja (*worker society*) menjadi upaya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mandiri dan pencipta lapangan kerja (*employee society*). Oleh karenanya, pengembangan SDM lewat program-program pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mempunyai keterampilan dan citra diri yang positif mengenai keanekaragaman budaya dalam menghadapi era globalisasi (Nagib & Tjiptoherijanto 2008).

5. Globalisasi yang 'Tamak': Kemiskinan dan Degradasi Lingkungan

John Perkins dalam bukunya, *Confession of an Economic Hitman* mengungkap perselingkuhan korporasi, pemerintah dan intelektual untuk menguasai sebuah negara. Para intelektual-intelektual tersebut mendatangi setiap negara-negara yang baru merdeka; memperkenalkan konsep pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur sebanyak-banyaknya, jalan raya, pelabuhan, bandara pembangkit listrik dan lain-lain. Negara-negara

yang kemudian menyetujui hal tersebut diberikan utang dari institusi keuangan global, IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Utang inipun tidak secara gratis diberikan tapi diikuti dengan berbagai persyaratan-persyaratan atau disebut *Structural Adjustment Program*. Program penyesuaian struktural, dimana setiap negara penghutang harus tunduk pada aturan-aturan liberalisme; pengurangan peran negara dalam pengelolaan sumber dayanya, membuka usaha-usaha milik negara untuk dimiliki oleh pihak swasta, privatisasi, merevisi undang-undang yang dianggap menghambat korporasi, deregulasi dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya (<http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan.html> di akses pada tanggal 13 Desember 2011).

Kemiskinan dan pemiskinan global di definisikan sebagai kemiskinan yang di sebabkan oleh globalisasi yang berasal dari pasar bebas dan atau akibat ulah negara maju (Wiranta 2007). Pengalaman Indonesia selama kurun waktu dua dekade terakhir memberikan gambaran bahwa kapitalisme atau membanjirnya modal asing ke Indonesia mempunyai pengaruh yang kurang menguntungkan pihak masyarakat ekonomi lemah. Sejatinya kapitalisme dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan kesejahteraan penduduk, tetapi kapitalisme juga mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar kelompok negara. Kesenjangan seperti ini merupakan akibat logis dari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis, di antaranya adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat mengutamakan kepemilikan individu. Bahwa kebebasan untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dan pasar bebas merupakan prinsip-prinsip dasar kegiatan ekonomi kapitalis, namun pasar sempurna sebagai persyaratan terwujudnya pemerataan kesejahteraan tidak pernah terjadi. Semua ini akibat adanya praktik-praktik pengejaran kebutuhan ekonomi manusia yang tak terbatas. Perpaduan dari prinsip-prinsip ini dalam kegiatan ekonomi membawa sekelompok masyarakat ke jenjang kesejahteraan atas dasar pengorbanan kelompok lain. Selama tidak dilakukan rekonseptualisasi prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis, selama itu pula proses pemiskinan masyarakat atau negara lemah oleh negara kapitalis kuat akan terus berlanjut.

Pada tataran praktis, globalisasi – dalam hal tertentu – telah membawa dampak negatif pada lingkungan yang pada gilirannya juga membahayakan keamanan manusia. Saat ini perekonomian global terasa dekat dalam lingkungan pembangunan dimana ‘korporasi’ (perusahaan transnasional) berperan sebagai mesin utamanya. Aktivitas ekonomi terus digenjut demi memenuhi hasrat segelintir orang yang ingin menumpuk keuntungan pribadi dan mengorbankan mayoritas lainnya terkena dampak dari aktivitas mereka. Contoh kasus di sektor pertambangan di kawasan Asia-Pasifik mengindikasikan hal tersebut. Di Cina, Indonesia dan Papua Nugini,

aktivitas pertambangan telah merusak kondisi tanah, mencemari air, udara, danau, pantai dan hutan. Salah satu dampak serius yang ditimbulkan adalah penyakit (pernapasan, jantung, dan kanker paru-paru), keberadaan sumber penghidupan bagi beberapa kelompok masyarakat juga menjadi semakin terancam, dan konflik sosial yang terjadi oleh karena langkanya sumber daya akibat aktivitas korporasi pertambangan terjadi hampir di seluruh tempat. Meski berbagai aturan sudah dikenakan kepada mereka, tetap saja tidak mampu membendung langkah korporasi-korporasi ini mewujudkan kepentingannya yang berujung pada kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan di atas adalah korporasi. Oleh karena itu, penting untuk menagih komitmen mereka untuk membenahi persoalan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan mereka secara langsung dalam setiap konferensi lingkungan global (Amri 2010).

6. Globalisasi dan Ke(tidak)tahanan Budaya

Pada era global, percampuran antara berbagai budaya tampaknya sulit untuk dihindari, sebagai akibat dari interaksi manusia antar bangsa yang berbeda budaya. Dalam interaksi tersebut, masing-masing akan berusaha mempertahankan budayanya dan berusaha mempenetrasikan kepada bangsa lain. Hal ini bisa dimaklumi, karena budaya merupakan suatu sistem nilai yang memengaruhi cara bertindak dan berpikir seseorang atau masyarakat. Oleh karena itu, di dalam globalisasi di dalamnya terdapat proses hibridisasi. *Hibridisasi* diartikan sebagai suatu cara, dimana suatu bentuk dipisahkan dari kesatuannya (keberadaannya) untuk kemudian digabungkan dengan bentuk lain yang baru. Dalam konsep ini, berarti ada unsur yang dianggap unggul, yang dipindahkan atau diambil dari asalnya, untuk kemudian digabungkan dengan unsur lain (yang juga dianggap unggul). Inilah salah satu isu penting yang ingin di sampaikan dari hasil penelitian Puslit Masyarakat dan Budaya LIPI (Retnowati 2007). Kekuatan globalisasi yang ditopang oleh kekuatan finansial lembaga asing, kekuatan perdagangan bebas, dan kekuatan kebudayaan dunia, kemudian membentuk nilai dan standar etika sesuai dengan kepentingan pemilik modal melalui media global seperti iklan dan lainnya. Oleh karenanya, budaya lokal semakin terancam akibat hegemoni satu arah dari negara maju, padahal negara berkembang memiliki kekayaan lokal. Akibatnya terjadi resistensi yang menolak globalisasi karena moral globalisasi hanya berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan tertutupnya akses rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas. Salah satu contohnya, perusahaan waralaba KFC, McDonalds, dan Pizza Hut yang banyak tersebar di kota-kota Indonesia adalah kepanjangan tangan dari pemilik modal asing dan

pemegang lisensi, sehingga keuntungan tetap mengalir ke mereka. Secara budaya sangat jelas belum memberikan manfaat kecuali membuka akses informasi dan keterbukaan budaya luar negeri bagi masyarakat (Ariwibowo 2007: 55-56).

Kompleksitas Masalah dan Tantangan Globalisasi

Menurut Kamus Merriam Webster (2010) kata globalisasi (*globalization*) pertama kali digunakan pada tahun 1951. Sejak itu, globalisasi lantas didefinisikan sebagai: *the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets*. Kata globalisasi memang cenderung dilekatkan pada aktivitas ekonomi (Amri 2010: 2). Lebih jauh, beberapa sarjana kemudian mengidentikkan globalisasi dengan dinamika kapitalisme global (Waters 1995; Anderson et. all 1995; dan Marshall 1999) yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengakumulasi modal ekonomi sebanyak-banyaknya tanpa mengenal batas dan wilayah. Waters (1995: 5) misalnya, merujuk aspek ekonomi sebagai kekuatan utama pendorong globalisasi di samping politik, sosial, dan budaya. Demikian pula dengan Anderson, Brook, dan Cochrane (1995) yang juga menitikberatkan aktivitas ekonomi sebagai pilar utama globalisasi. Dalam bukunya yang berjudul *A Global World? Re-Ordering Political Space*, ketiganya meletakkan ekonomi sebagai faktor utama pengubah tatanan politik dunia. Pun halnya dengan Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi dari para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini, lanjut Marshall, dimotori oleh korporasi transnasional yang hadir paska Perang Dunia II. Dengan dibantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang berhasil mengubah tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin, aktivitas ekonomi korporasi transnasional tersebut menjadi semakin lancar. Perlahan-lahan akhirnya kekuasaan negara diintervensi, atau bahkan dilemahkan.

Globalisasi tampaknya merupakan suatu fenomena yang luas, namun sebenarnya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rejim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan baik tarif maupun nontarif. Globalisasi dibidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan HAM. Semangat demokratisasi yang terjadi disuatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi dibidang budaya bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan

lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat menikmati McDonald, Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *Blue Jeans* yang disukai kaum muda AS, seperti *Levi's* juga disenangi oleh masyarakat di negara lain (Siswanto 2010: 1-8).

Selain beberapa hal di atas, tampaknya kita perlu juga memperhatikan munculnya beberapa isu lain seperti; *global governance* yang mengatur berbagai kecenderungan globalisasi yang telah mendorong terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, pemerintah nasional Indonesia adalah anggota dari WTO yang terikat dengan aturan-aturan yang diratifikasi di dalamnya. Dalam hal perburuhan kita juga adalah anggota ILO (*International Labor Organization*) yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip penerapan HAM dalam kehidupan kaum buruh. Demikian pula, dalam isu-isu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain (Arfani 2010: 1).

Sejak kemunculannya, globalisasi telah secara perlahan merombak pola relasi antar aktor dalam hubungan internasional. Dahulu, orang hanya bisa terhubung dengan orang lain di sekitarnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan alat komunikasi dan transportasi, hubungan antar manusia semakin meluas melintasi batas-batas wilayah. Bersamaan dengan itu, negara-negara di dunia juga kian meningkatkan hubungannya. Proses globalisasi yang di satu sisi melemahkan peran negara, namun di sisi lain menguatkan peran masyarakat internasional. Di era sekarang, internasionalisme yang lebih menekankan peran negara dihadapkan secara diametral dengan globalisasi yang kadang kala menisbikan peran negara (Mubah 2010: 1).

Dari beberapa perspektif ide maupun praktis yang tercakup dalam tema globalisasi di atas, globalisasi sendiri di hadapkan pada kompleksitas masalah dan tantangan. Secara umum, kompleksitas ini dapat di uraikan dalam tiga pemahaman; *pertama*, globalisasi tidak bisa dihindari, namun bagaimana mengurangi dampak negatif bagi kepentingan setiap aktor, terutama bagi setiap warga negara, baik secara ekonomi maupun politik, keamanan dan kebudayaan. *Kedua*, dampak globalisasi yang terjadi di tingkat regional dan nasional terhadap masyarakat, pemerintah dan pasar/pelaku ekonomi. *Ketiga*, masalah penataan struktur dan pola hubungan antar para aktor yang lebih simetris yang bekerja dalam ranah globalisasi. Atau dengan kata lain, lunturnya batas negara yang bergiat di bidang globalisasi ekonomi dapat membangun suatu kekuatan negara, kelompok masyarakat atau korporasi perusahaan transnasional. Penjelasan mengenai ketiga persoalan ini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Dari berbagai kecenderungan isu globalisasi di atas, paling tidak terdapat dua aspek yang mengemuka dalam globalisasi dan pola relasi di dalamnya yakni adanya aktor yang berperan dalam gerak globalisasi dan konsep status/peran yang mengikutinya. Hubungan aktor/pelaku dan status/peranan ini tentunya mempunyai implikasi terhadap 'perilaku' atau 'cara-cara mempengaruhi/menguasai' subyek yang ingin mereka kuasai. Seperti telah diketahui bahwa wacana aktor dalam globalisasi telah meninggalkan dikotomi aktor negara dan aktor non-negara. Dalam kaitan globalisasi, di mana jaringan aktor-aktor melibatkan pelaku mulai dari tingkat lokal sampai global, kini sebagian orang semakin cenderung menggunakan istilah "aktor transnasional" daripada "aktor non-negara" (Marut 2010: 1-2). Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Selain negara, aktor transnasional ditandai oleh kelompok-kelompok seperti *Multi national Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)* (Yani 2010: 3-4). Selanjutnya dijelaskan bahwa interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs semakin rumit dikarenakan keterkaitan mereka dalam beragam isu yang begitu luas seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia, pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkoba. Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara. Namun demikian, masih banyak teoritis hubungan internasional yang mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa "*nation states are the most important actors for understanding international relations*" (Yani 2010: 3-4).
2. Dalam tata kelola ekonomi global, liberalisasi perdagangan dan investasi adalah salah satu faktor pendorong proses percepatan akumulasi kapital (Tim Peneliti P2E LIPI 2010: 3). Hal ini menjadi masalah pula dalam proses globalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Strategi liberalisasi perdagangan dan investasi ini diyakini akan meningkatkan volume perdagangan dan investasi global, nasional maupun lokal-sehingga dengan proses harmonis yang terjadi-akan menghasilkan akumulasi kapital pada setiap pelaku ekonomi. Setiap pelaku ekonomi menggunakan kekuatan (*power*) yang dimiliki untuk mencapai maksimisasi manfaat

(seperti akumulasi kapital) dan memperoleh/ memperkuat kekuatan pasar (*market power*) dari setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Karena itu, dapatlah dipahami bahwa liberalisasi sebagai suatu 'ideologi' berusaha diimplementasikan sebagai upaya memperkuat kekuatan pasar terutama bagi kapitalis raksasa seperti perusahaan transnasional (MNCs) dengan dukungan pemerintahnya. Dukungan ini bukan hanya dari sisi finansial tetapi juga non-finansial, termasuk pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dan sebagainya.

3. Abstraksi lain mengenai kritik masalah terhadap proses globalisasi adalah pandangan mengenai keberhasilan mengintervensi dan melemahkan kekuasaan negara yang tidak melulu bukan semata-mata hasil upaya korporasi transnasional. Menurut Robinson (1996), terdapat agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional yang gencar mengampanyekan perlunya meminimalisasi peran negara. Mereka kemudian menciptakan ketergantungan negara-negara Selatan yang tertinggal terhadap negara-negara Utara yang maju melalui utang dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di negara Selatan itu sendiri. Dalam perkembangannya, akibat ketidakmampuan mengelola keuangan, negara-negara peminjam (Selatan) ini mengalami kegagalan percepatan ekonomi sehingga tidak mampu membayar hutang. Akibatnya, mereka pun 'dipaksa' untuk menerima skenario yang bernama Program Perbaikan Struktural (*Structural Adjustment Program*) yang intinya mengharuskan mereka untuk melakukan liberalisasi ekonomi, menderegulasi sektor keuangan, dan melakukan privatisasi atas sumberdaya alam, industri, perbankan, dan sektor publik lainnya (Casanova 1996). Dengan demikian, negara-negara peminjam ini semakin dibuat tidak berdaya dengan aksi-aksi aktor-aktor globalisasi di atas.

Dengan ketidakberdayaan negara-negara ini mengakibatkan aktor (korporasi) transnasional menemukan peluangnya untuk semakin bebas beraksi. Perlahan tapi pasti mereka menggerogoti sumberdaya alam negara-negara Selatan tersebut yang pada gilirannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Studi mengenai hubungan antara globalisasi—aktivitas korporasi transnasional—dan kerusakan lingkungan ditunjukkan oleh Lofdahl (2002: 8-9) dan Broswimmer (2002). Menurut Lofdahl, aktivitas ekonomi global saat ini telah jauh dari yang dicita-citakan. Alih-alih ingin memperjuangkan pemerataan kemakmuran, harmoni sosial, sembari menjaga kelestarian lingkungan, korporasi transnasional malah melakukan sebaliknya. Aktivitas ekonomi global justru membawa dampak negatif, salah satunya, pada kelestarian lingkungan. Misalnya, negara-negara Utara yang maju telah memindahkan ladang produksinya ke negara-negara Selatan yang tertinggal. Akibatnya, kondisi lingkungan negara-negara Selatan menjadi terpuruk.

4. Sejalan dengan point 3 di atas, masalah globalisasi muncul melihat keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas, yang dianggap tamak (*greedy*) dan eksploitatif terhadap alam, dalam percaturan ekonomi global. Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi warga bumi yang berlebihan, di samping kian bertambahnya jumlah penduduk dunia. Tidak heran mengapa kemudian Broswimmer (2002) menyebut abad ini sebagai periode kemusnahan ekologis (*the period of Ecocide*) karena berbagai indikasi telah muncul mulai dari persoalan lingkungan, dari yang sederhana, semisal pencemaran lingkungan, hingga yang paling kompleks, seperti perubahan iklim. Berbagai persoalan lingkungan ini diyakini bermuara pada keamanan manusia (*human security*)⁴.

Beberapa persoalan keamanan manusia yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan sangat berpotensi mengakibatkan kelangkaan sumberdaya, konflik, dan penyakit kronik. Studi yang dilakukan oleh Rosegrant dkk (2002: 7) menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak pada kelangkaan pangan di masa depan. Mereka pun memprediksi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi penurunan jumlah hasil panen para petani sebesar satu persen hingga beberapa dekade ke depan. Serupa dengan ini, studi Rosegrant dan Cline (2003: 1917) juga menunjukkan betapa degradasi lingkungan yang terjadi belakangan ini berdampak nyata pada kelangkaan sumberdaya pangan (*food scarcity*) khususnya di negara-negara Selatan yang terbelakang. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu yang kemudian mengganggu aktivitas bercocok tanam di negara-negara tersebut.

5. Dalam bidang kebudayaan, keistimewaan kondisi sosial dewasa ini dengan segala macam perangkat komunikasi dan informasi mutakhir

4 Ada beberapa sarjana yang mendefinisikan konsep keamanan manusia, di antaranya adalah MacLean (1999); Newman (2001); King dan Murray (2002). Menurut MacLean keamanan manusia merupakan perlindungan terhadap individu atas ancaman politik dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera. Ancaman politik yang dimaksud dapat berupa kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain sementara kesempatan hidup sejahtera tercermin pada aksesibilitas manusia terhadap lingkungannya. MacLean mendefinisikan keamanan manusia ini sebagai keamanan atas diri pribadi, komunitas, dan lingkungan. Sementara itu, Newman mendefinisikannya sebagai bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Adapun King dan Murray mendefinisikan keamanan manusia sebagai keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pandangan para sarjana ini kemudian turut mengubah pengertian mengenai konsep keamanan itu sendiri yang sebelumnya berpusat pada negara atau teritori tertentu dan cenderung bernuansa politik menuju manusia atau individu yang melihat kerusakan lingkungan juga sebagai ancaman. *Human security* di sini dapat diartikan peningkatan peran dan perhatian individu dibandingkan sebelumnya yang lebih fokus pada negara/masyarakat. Perubahan ini juga dibarengi dengan sejumlah masyarakat yang membutuhkan tindakan bersama (*collective action*) yang berbeda (persoalan lingkungan hidup). Fenomena *collective action* dan individu ini menunjukan ciri yang unik ketika dibarengi dengan tingginya penggunaan internet yang menjadikan peran individu menjadi lebih berarti berkat wahana jejaring sosial yang semakin marak sekarang ini.

bukan terletak pada kadar maupun intensitas proses globalisasi, tetapi pada kejelasan, keterbukaan, dan sifat “kasat mata” pengaruh berbagai macam kebudayaan dunia yang masuk dalam ranah kehidupan manusia (Alam 1998: 1-11). Dalam konteks ketahanan budaya atau pelestarian budaya dalam era globalisasi, masih banyak yang mengkhawatirkan bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi. Namun, menilik pada sifat/kodrat kebudayaan itu sendiri yang bersifat dinamis, cair dan hibrid (dan) dengan menghindari serta mengkritik representasi budaya yang bersifat esensialis dan statis, maka kita pun seharusnya menjadi paham bahwa proses globalisasi dan perubahan budaya sesungguhnya tak pernah absen dari kehidupan sosial manusia. Mengutip ahli antropologi Lévi-Strauss, identitas atau jati diri para pendukung suatu kebudayaan menjadi kuat bukan karena isolasi tetapi justru karena adanya interaksi antara budaya. Dalam proses globalisasi tak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan yang menjurus pada *xenophobia*, justru yang terpenting adalah bagaimana memahami proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian (Alam 1998: 1-11).

6. Kecenderungan terakhir dari globalisasi adalah regionalisme. Artinya, bahwa saat ini para pengusaha multi nasional mulai mengalami kemandegan karena sumber daya yang kian terbatas. Strategi yang dilakukan salah satunya adalah mereka mulai masuk ke suatu wilayah atau region, pengelompokan beberapa negara. Strategi ini diikuti pula oleh pengusaha kecil dan menengah yang sering kesulitan melawan globalisasi. Jalan sama yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah. Kerjasama dapat terjadi sebagai kerjasama antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua-duanya. Otonomi regional tidak berarti tiap daerah bekerja sendiri-sendiri dan melupakan keterkaitan dan kerjasama dengan daerah lain (Ananta 2008). Dengan kata lain, regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil. Menjadi menarik, bila kita memikirkan paradigma pembangunan dalam konteks regionalisasi dan globalisasi. Salah satu contoh pemikiran yang perlu dikaji lebih jauh dan lebih mendalam adalah ‘kemungkinan’ melakukan *Borneo Regional Economic Cooperation*, meliputi semua propinsi ke Kalimantan, Sabah dan Serawak di Malaysia, dan Brunei. Dalam kaitan dengan globalisasi, salah satu tantangan yang kini banyak dialami di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah adanya gejala “*global consumers, local earners*”. Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan standar dunia dan harga dunia, tetapi masyarakat masih berproduksi lokal. Untuk negara seperti Jepang, gejala ini

menguntungkan karena harga dan gaji mereka tinggi untuk ukuran dunia. Untuk negara seperti Indonesia, gejala ini membuat orang Indonesia mengalami kesulitan dalam persaingan internasional (Ananta 2008).

Tabel 1: Rekapitulasi Masalah dan Tantangan Globalisasi di Indonesia.

No	Masalah	Identifikasi Tantangan
1	“aktor transnasional” selain “aktor non-negara”	Selain negara, aktor transnasional kini ditandai oleh kelompok-kelompok seperti <i>Multi national Corporations (MNCs)</i> , <i>International Governmental Organizations (IGOs)</i> , <i>International non Governmental Organizations (INGOs)</i> dan kelompok teroris internasional dan <i>Transnational Organized Crime (TOC)</i> → melahirkan konsep <i>international society</i>
2	Percepatan akumulasi kapital	Liberalisasi sebagai suatu ‘ideologi’ menggabungkan kekuatan korporasi dengan pemerintah dalam bentuk finansial dan non-finansial (pemahaman akademis, bantuan asing maupun pengaruh politik dsb)
3	Intervensi dan pelemahan kekuasaan negara	Peran ini dilakukan gabungan korporasi transnasional dan agen ekonomi supranasional, forum-forum politik tingkat tinggi dunia, serta elit-elit transnasional
4	Bencana kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Konsekuensi dari dominannya paradigma pasar bebas - Penduduk yang semakin banyak - Pola konsumsi - Pencemaran lingkungan - Perubahan iklim - Kelangkaan pangan di masa depan
5	Keamanan manusia (<i>human security</i>)	Peningkatan peran dan perhatian individu pada negara/masyarakat melalui tindakan bersama (<i>collective action</i>) agar terhindar dari ancaman politik, bencana kerusakan lingkungan,

		dan mendapatkan perlindungan untuk memperoleh kesempatan hidup sejahtera
6	Ketahanan budaya atau pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kekhawatiran bahwa budaya akan hilang seiring dengan berkembangnya proses globalisasi - Pemahaman proses perubahan kebudayaan itu sendiri yang sering luput dari perhatian
7	Regionalisme	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kecenderungan pengusaha multi nasional mulai mengalami kemandegan beroperasi karena sumber daya yang kian terbatas - Jalan yang ditempuh adalah membentuk regionalisasi, kerjasama ekonomi antara beberapa daerah dalam suatu negara, antar negara, atau kedua duanya - Regionalisasi tampaknya merupakan salah satu cara menarik untuk meningkatkan perekonomian, baik dari sisi pengusaha multi-nasional mau pun pengusaha menengah dan kecil

Sumber: data di olah dari berbagai sumber

Kebijakan ‘Setengah Hati’ Terkait Globalisasi

Globalisasi seperti gambaran di atas tampak sebagai sesuatu yang menakutkan, namun bisa juga sekaligus tantangan. Ada yang menilai merasakan keuntungan besar dari globalisasi, tetapi bagi sejumlah pandangan lain melihat globalisasi justru dinilai sebagai ancaman. Namun, seperti di katakan Hadi Soesastro (2004: 8) bahwa kenyataan globalisasi itu sulit di hindari, bahwa dalam kurun saat ini telah banyak yang telah terjadi, baik di belahan dunia, di kawasan Asia, atau di Indonesia sendiri. Pada tingkat global dan regional proses integrasi telah semakin laju. Yang melintasi batas-batas negara bukan hanya arus barang dan jasa, orang, uang dan modal, tetapi juga teknologi, informasi, dan bahkan juga gagasan. Dunia telah menjadi satu. Kesemua jenis arus itu sulit dibendung masuk atau keluar. Kemajuan teknologi bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan dan dalam perkembanganya hambatan-hambatan itu sendiri kini dapat semakin

dikurangi. Globalisasi dalam hal ini lantas menyisakan pekerjaan rumah baik bagi pemerintah maupun masyarakat⁵. Pemaparan berikut ini menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan persoalan-persoalan globalisasi, namun hanya 'beberapa' saja yang dapat dimasukkan karena keterbatasan data yang dimiliki.

Terkait dengan soal kebijakan terhadap masalah globalisasi ini, salah satu strategi terhadap globalisasi yang dapat di baca dari paparan di atas adalah proses deregulasi dan liberalisasi ekonomi, kerjasama ekonomi regional dan pembentukan *political union*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sedikit banyak menerapkan pola strategi yang sama. Yang paling kentara adalah strategi liberalisasi melalui berbagai deregulasi di sektor perdagangan, investasi dan keuangan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak jaman Orde Baru. Revisi UU penanaman modal tahun 2007, salah satunya contohnya, memberi ruang gerak kepemilikan asing yang semakin besar, mulai dari 60% hingga 99%.⁶ Model pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pemerintah yang mendukung liberalisasi perdagangan di satu sisi mempercepat akumulasi kapital, tetapi di sisi lain dapat menghasilkan pemiskinan. Sebagai contoh, dominasi korporasi pada sektor retail di atas menunjukkan pola persaingan yang tidak sehat, antara si kaya (perusahaan besar) dan si miskin (pedagang kecil). Akibatnya, marginalisasi pedagang kecil di pasar tradisional mengindikasikan terjadinya proses pemiskinan. Demikian pula halnya terjadi di sektor keuangan perbankan dan investasi.

Diterapkannya kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi melalui penanaman modal asing, 'salah satunya' adalah pengaruh tidak langsung dari keikutsertaan Indonesia dalam percaturan kerjasama ekonomi dan kerjasama regional. Misalnya, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Proyek ini yang dikenal sebagai program AFTA atau *ASEAN Free*

5 Menurut Stiglits (2006) dalam bukunya *Making Globalization Work* menyatakan ada 6 pekerjaan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) perhatian terhadap upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan; (2) perlunya bantuan asing dan pengurangan utang; (3) perdagangan yang adil; (4) liberalisasi perdagangan dan pasar modal; (5) perlindungan terhadap masalah lingkungan; dan (6) pemerintahan yang bersih, di kutip Carunia Mulya Firdausy (peny). 2006. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi. Di Sektor Industri Manufaktur*. P2E LIPI, Jakarta. Hlm iii.

6 Sebagai contoh untuk skala hypermarket, dominasi kekuatan pasar berada ditangan Carrefour dengan penguasaan omset sebesar 48.70%, kemudian disusul oleh Hypermart, Giant dan Makro dengan porsi omset masing-masing sebesar 22.08% dan 17.75% dan 9.52%. Dari sudut pandang strategi *pro-growth*, struktur pasar monopolistik menguntungkan karena akan mampu menciptakan profitabilitas yang besar sehingga akan memperbesar akumulasi capital, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, struktur pasar monopolistik di sektor retail berpotensi memarginalisasikan pedagang kecil dan pasar tradisional, dimana mayoritas penduduk miskin dengan usaha kecilnya melakukan aktifitas bisnis. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam laporan hasil penelitian Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan; dan laporan penelitian P2E-LIPI. 2009. *Dominasi Asing Dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta P2E-LIPI.

Trade Area yang diluncurkan pada Januari 1993 dan direalisasikan 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2008 namun pada tahun 1998 diputuskan kembali oleh kelompok anggota ASEAN ini untuk mengajukan percepatan realisasi AFTA menjadi 1 Januari 2002. Selain AFTA, pada tahun 2002 melalui KTT ASEAN-Cina, Indonesia juga turut menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and PRC* sebagai cikal bakal pembentukan *China ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* yang telah diberlakukan efektif pada 1 Januari 2010. AFTA dan CAFTA adalah jawaban terhadap globalisasi dan regionalisasi sekaligus, yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari liberalisasi ekonomi. Kesepakatan ini adalah keputusan bersama, namun sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, Indonesia kini dibanjiri barang-barang murah buatan Cina dan terlebih lagi barang-barang tidak resmi banyak tersedia di pasaran. Barang-barang yang diimpor dari Cina sebagian besar berupa perkakas listrik, mesin, produk besi baja, tekstil, keramik, plastik, makanan olahan, garmen, kerajinan tangan, pupuk, aluminium, produk makanan dan minuman, serta produk laut. Tidak hanya barang-barang dari negara Cina, dari sesama negara-negara ASEAN pun menunjukkan keadaan yang sama. Tekanan impor barang negara lain tentu saja mengganggu ekonomi Indonesia, terutama daya saing produksi dalam negeri yang memiliki kemiripan dengan barang-barang impor (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China> di akses pada 14 Desember 2011).

Paskapenandatanganan kesepakatan AFTA maupun CAFTA, pemerintah RI juga telah mengadopsi kebijakan pangan yang sangat berorientasi pro pasar bebas (*free-market*). Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh, dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah). Kebijakan ini secara tidak langsung akan membuat impor barang pertanian/supply produk pertanian menjadi semakin besar. Pasar pangan Indonesia yang cukup besar memang banyak di incar oleh produsen pangan luar negeri. Diterbitkannya Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pembebasan tanah bagi kepentingan umum, ini berkaitan dengan tujuan untuk memudahkan investasi asing, dan semakin mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri tampaknya turut memperburuk kondisi pertanian Indonesia secara umum (Firdausy 2005). Kenyataan ini juga terjadi pada industri manufaktur terutama dalam era globalisasi yang semakin menunjukkan kerapuhannya. Kerapuhan industri manufaktur tidak hanya terjadi pada industri padat karya seperti industri alas kaki dan tekstil, juga terjadi pada industri padat modal (otomotif, mesin, elektronika, dan semen)

(Firdausy dkk 2006). Penyebabnya dipengaruhi beberapa faktor; selain daya saing, produktifitas dan rendahnya investasi menjadi sumber penyebab utama. Beberapa paket kebijakan (industri maupun investasi; PP 20 tahun 1994, UU No 22 tahun 1999, dan INPRES No 3/2006) yang cukup memadai namun kurang ditunjang oleh komitmen dalam pelaksanaannya, sehingga globalisasi ekonomi yang terjadi justru malah mengakibatkan kecenderungan penurunan pada sektor industri manufaktur (Firdausy dkk 2006).

Sementara itu kebijakan globalisasi lain, misalnya, dalam bidang pengelolaan SDA di Indonesia juga tidak luput dari masalah. Kisah mengenai datangnya korporasi transnasional pertambangan dimulai dari naiknya Suharto sebagai pemimpin pada tahun 1966. Pemerintahan Suharto mula-mula menyiapkan perangkat hukum datangnya korporasi tersebut, sebagaimana pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 1/1967 berisi tentang investasi luar negeri. Tidak lama berselang, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 11/1967 yang khusus mengatur sektor pertambangan. Dengan dua perangkat hukum ini, pemerintah kemudian membuka kesempatan yang sangat luas kepada korporasi transnasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Adapun korporasi yang pertama kali memperoleh kontrak karya (*Contract of Work*) dari pemerintah adalah Freeport dan mulai beroperasi pada tahun 1972 (Ballard 2001: 13&23). Selanjutnya menyusul Rio Tinto (Australia), Inco (Kanada), dan Newmont (Amerika). Kerja korporasi internasional ini semakin mudah dengan diberlakukan perijinan kontrak karya bagi mereka. Sebagai contoh, UU No. 4/2009 mengenai mineral dan batu bara hanya dirancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah namun tidak mengoreksi keberadaan korporasi global yang telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Terbukti, pasal 169 menyatakan bahwa korporasi yang telah memegang Kontrak Karya tetap memiliki hak untuk beroperasi hingga masa kontraknya berakhir. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan akan timbulnya kerusakan lingkungan yang lebih parah dan mengancam keamanan manusia Indonesia di masa depan.

Kebijakan paling rumit terkait globalisasi adalah kebijakan menyangkut budaya, mungkin karena sulit dijabarkan. Misalnya masalah kepemilikan budaya. Pada tanggal 2 Oktober 2009 batik telah di tetapkan oleh UNESCO sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Namun bila mencermati soal kepemilikan budaya Indonesia masih banyak bermasalah, yang paling kentara sekali adalah klaim produk budaya dari Malaysia. Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif "Parang Rusak", angklung, wayang kulit hingga rendang, kemudian lagu yang sangat mirip "Rasa Sayang" menjadi *soundtrack* iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu "Rasa Sayange" dan lagu "Indang Bariang" yang juga digunakan untuk iklan merupakan lagu asal daerah Sumatera. Klaim Tari Barongan sebagai warisan dari Batu Pahat,

Johor dan Selanggor Malaysia padahal Tari Barongan yang sangat mirip Reog Ponorogo sementara Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan Reog Ponorogo dan mendapatkan Hak Cipta No.026377 pada 11 Februari 2004. Ada pula klaim Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Melayu dengan slogan mereka “Bahasa Melayu adalah Bahasa Malaysia”, dan terakhir Tari Pendet menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk “Enigmatic Malaysia”. Berkaitan dengan persoalan sengketa budaya ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta *Eminent Persons Group* (EPG) agar difungsikan lebih baik untuk mencegah terulangnya kasus serupa. EPG yang dibentuk tahun 2006 bertujuan mengelola sengketa kedua bangsa, termasuk isu hak cipta, karya budaya, karya peradaban dan lain-lain (Saiman 2009).

Dan terakhir, terkait isu migrasi internasional tenaga kerja Inonesia ke luar negeri tahun 1999 ditetapkan KEPPRES No. 29 tentang *Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia* (BKPTKI). Badan ini bersifat lintas sektoral dan terkait dengan sembilan instansi yang berhubungan dengan TKI atau buruh migran. KEPPRES ini sebagai respon dari pemerintah atas semakin banyak masalah yang dihadapi oleh TKI atau buruh migran saat bekerja di luar negeri. Sedangkan, di daerah khususnya di tingkat Propinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Hal ini merupakan pelayanan agar proses pengurusan dokumen bagi calon buruh migran lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Disamping itu, badan ini juga memberi perlindungan bagi calon TKI dan TKI purna yang kembali ke Indonesia. Selanjutnya untuk menyikapi perkembangan dinamika tenaga kerja luar negeri pemerintah melakukan revisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Perpres No 61. tahun 2006. BNP2TKI ini sekaligus secara yuridis adalah melaksanakan perintah UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Diharapkan kebijakan ini dapat menyentuh segi pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Laporan PSDR LIPI 2009: 25-28).

Sebagai catatan penutup, pemerintah Indonesia sejauh ini tidak memiliki visi dan strategi khusus dalam menghadapi globalisasi. Tampaknya pemerintah masih memaknai globalisasi hanya sebatas selayang pandang, belum pernah diurai bagaimana peluang dan tantangannya dalam bentuk praktis dalam kebijakan. Beberapa aspek seperti: bagaimana penjelasan pemahaman mengenai perkembangan dan dampak globalisasi bagi peradaban umat manusia bagi masyarakat Indonesia melalui media oleh pemerintah; kemudian mengenai pemetaan aktor (pelaku globalisasi), apa saja kepentingan yang saling di harapkan dan hubungan antar aktor negara dan non-negara dalam dinamika proses globalisasi tidak terjelaskan dengan tuntas dalam rumusan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban mereka terutama bagaimana mengenai penataan hubungan antar aktor di level nasional, regional dan

global. Tidak adanya dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai acuan dalam menghadapi era globalisasi menyebabkan miskinnya analisis dan uraian memadai dalam rencana pembangunan (misalnya dalam RPJM/RPJP sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat) yang membahas globalisasi.

Penutup: Index dan Strategi Globalisasi

Dalam indeks globalisasi tahunan yang dikeluarkan AT Kearney/Foreign Policy 2003-2006, posisi Indonesia tidak berubah, yakni peringkat ke-3 dari belakang (*least globalized country*). Indonesia menduduki urutan 60 dari 62 negara. Peringkat atas (*most globalized country*) ditempati negara maju, seperti Singapura, Swiss, Denmark, Kanada, AS, Australia, dan Inggris. Indeks ini diukur melalui indikator ekonomi, politik, teknologi, dan personalitas. Dalam integrasi ekonomi, Indonesia pada urutan ke-52, kontak personal ke-59, koneksitas teknologi ke-51, dan kesepakatan politik ke-50. Tak jauh beda dengan indeks AT Kearney, indeks globalisasi KOF juga mengukur dimensi ekonomi, sosial, dan politik globalisasi. Hanya saja, KOF mengukur indeks globalisasi dengan jumlah negara lebih banyak dan dalam kurun waktu lebih lama. Dalam daftar indeks globalisasi KOF 2007, posisi Indonesia pada urutan 78 dari 122 negara. Peringkat globalisasi ini didasarkan pada data tahun 1970 hingga 2004 dengan 25 variabel (Cahyono 2007). Index ini mengukur globalisasi sektor ekonomi karena memang lebih dominan dibandingkan dengan dimensi lain, selain itu juga karena dampaknya nyata dan signifikan.

Terkait dengan index posisi globalisasi Indonesia, sejauh ini memang sangat diperlukan pengembangan riset dan teknologi untuk menunjang aturan main dan ketersediaan informasi mengenai globalisasi di masa depan. Hal ini disebabkan posisi negara dan masyarakat memang masih rendah ketika berhadapan dengan kekuatan global. Ibarat Mike Tyson (dulu sebagai juara kelas berat) melawan Chris John (juara kelas ringan), menempatkan Indonesia dalam kompetisi yang tidak pada levelnya. Sebenarnya sudah banyak lembaga riset yang melakukan terobosan dalam konteks ancaman globalisasi semisal menciptakan pola daya saing lokal terhadap gempuran perusahaan asing, di antaranya adalah Puslit Ekonomi dan Politik IPSK LIPI atau *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS). Rekomendasi yang diberikanpun sudah sangat baik, mendorong strategi orientasi globalisasi yang sudah ada (dari *state security* ke *human security*) untuk lebih mendukung kepentingan (kesejahteraan) bagi masyarakat banyak. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar memiliki 'visi' tentang globalisasi. Studi/kajian yang komprehensif dan kerjasama lintas lembaga penelitian tentang perkembangan globalisasi dan dampaknya di tingkat regional dan nasional

penting untuk dilakukan terutama oleh Kedepatian IPSK LIPI yang membidangi masalah-masalah sosial di Indonesia.

Selain penelitian dan pengembangan untuk memperkuat visi globalisasi, penataan kelembagaan juga tidak boleh diabaikan dalam mendesain kebijakan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah program peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk pemerintah, masyarakat dan pasar/pelaku ekonomi. Dengan perkembangan masalah (politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan), penambahan jumlah aktor (aktor negara dan non-negara) maupun kompleksitas pola relasi antar para aktor, baik di tingkat global, nasional maupun lokal, maka kemampuan setiap aktor harus ditingkatkan secara proporsional. Tujuan utamanya agar mampu memahami setiap perkembangan, memanfaatkan peluang yang ada, serta yang terpenting adalah untuk menata kembali hubungan yang lebih simetris antara ketiga aktor utama (Negara/Pemerintah, Masyarakat dan Pasar).

Sebagai contoh, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang semakin canggih, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan para birokrat untuk menggunakan fasilitas elektronik (*e-government*) secara tepat dan optimal. Selain membangun infrastruktur yang memadai dan membuat kebijakan untuk mengatur pemberdayaan aparatur negara serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. *Capacity building* ini dapat berupa seminar, workshop, training, konferensi, dan lain-lain. Perhatian terhadap pengembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) dan penguatan SDM harus sama besar dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk pelatihan tidak hanya menyangkut bagaimana menjalankan sebuah kebijakan dengan baik, tetapi juga dalam pemahaman mengenai peluang pasar, teknik produksi, pengawasan kualitas, meningkatkan efisiensi kerja, pengetahuan hak paten, pengetahuan mengenai perkembangan perdagangan, pertanian, pelestarian budaya, pemahaman ketentuan-ketentuan dalam konteks WTO, AFTA, dan lain-lain. Kerjasama dalam bentuk *joint ventures* dan aliansi strategis di antara pemerintah, aktor transnasional dan masyarakat sangat bermanfaat guna menghadapi persaingan dan juga penyelesaian-penyelesaian sengketa yang muncul. Kemudian, memperkuat diplomasi ekonomi yang harus didukung kekuatan ekonomi internal. Peran, posisi, dan strategi Indonesia dalam forum-forum internasional juga belum menunjukkan hasil maksimal. Oleh karenanya *capacity building* mutlak harus dilakukan untuk membangun institusi dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang tangguh. Pemerintah bisa memfasilitasi upaya-upaya tersebut. ●

Referensi

- Alam, Bachtiar. 1998. Globalisasi dan Perubahan Kebudayaan: Perspektif Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Indonesia* No 54 Tahun 1998. Hlm 1-11.
- Ananta, Aris. 2008. *Suatu Wacana mengenai Paradigma Pembangunan di Indonesia*. Radar Banjarmasin, 12 Maret 2008
- Anderson, James dkk (Ed.). 1995. "A Global World? Reordering Political Space". Oxford: Oxford University Press.
- Amri, Ulil. 2010. *Globalisasi, Degradasi Lingkungan, dan Keamanan Manusia di Kawasan Asia-Pasifik: Kasus China, Indonesia, dan Papua Nugini*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 pada tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Arfani, Riza Noer. 2010. Globalisasi. Karakter dan implikasinya. *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär* Edisi I/2004. Hlm. 1
- Ariwibowo, Sutamat. 2007. Industri Budaya di Kota Mataram dalam Era Globalisasi. Hal 55-56 dalam Retnowati, Endang (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.
- Broszimmer, Franz. 2002. "Ecocide, A Short History of the Mass Extinction of the Species". London: Pluto Press.
- Cahyono, Imam. 2007. *Strategi Menghadapi Globalisasi*. Rubrik OPINI Harian Kompas. Senin, 29 Oktober 2007 diunduh dari <http://www.theprakarsa.org/index.php?act=dtlpub&id=20081215070511> tanggal 1/4/2012 3:16:16 PM.
- Casanova, Gonzales.1996. "Globalism, Neoliberalism, and Democracy". *Social Justice*, 23 (1-2): page 39-48.
- Elisabeth, Adriana (ed). 2009. *Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN: Isu-Isu Strategis*. LIPI Press, Jakarta.
- Firdausy, Carunia Mulya (ed). 2004. *Liberalisasi Perdagangan dan Investasi di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Firdausy, Carunia Mulya (ed). 2005. *Pengembangan Sektor Pertanian di Era Globalisasi*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Globalisasi dan Proses Pemiskinan Negara Berkembang diunduh dari <http://waiting4caliph.blogspot.com/2010/10/globalisasi-dan-proses-pemiskinan.html> 12/13/2011 8:59:12 AM
- Laporan Tim ASEAN P2P, Ganewati Wulandari (ed). 2009. *Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. LIPI Press, Jakarta.
- Laporan PSDR LIPI. 2009. *Pengelolaan Remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi Remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 25-28

- Lofdahl, Corey. 2002. *Environmental Impacts of Globalization and Trade: A Systems Study*. USA: Massachusetts Institute of Technology.
- Marut, Don K. 2010. Globalisasi, Aktor non-Negara dan Hak-hak Azasi Manusia. Paper pengantar Seminar “Lumpuhnya Sistem Keadilan: Tantangan Penegakan Hak-hak Azasi Manusia dan Peran Advokat untuk Kepentingan Publik”, yang diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, HUMA, 3 – 5 Agustus 2010, Jakarta. Hlm 1-2
- Marshall, Brent K. 1999. “Globalisation, Environmental Degradation and Ulrich Beck’s Risk Society”. *Environmental Values*, 8: 253–275 dalam Ibid Ulil Amri. 2010. Hlm 2.
- Merriam Webster Dictionary. 2010. *Globalization*.
- Perdagangan Indonesia - China. [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China 12/14/2011 4:40:06 AM](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/02/1153057/Perdagangan.Indonesia-China%2012/14/2011%204:40:06%20AM)
- PSDR LIPI. 2011. *Policy Paper Moratorium Tenaga Kerja: Pragmatisme vs Idealisme*. Tidak di terbitkan
- Mubah, A. Safril. 2010. *Perkembangan Proses Globalisasi*. Paper Cakra Studi Global-Strategis.
- Nagib, Laila&Tjiptoherijanto, Prijono (ed). 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di antara Peluang dan Tantangan*. PPK LIPI. LIPI Press, Jakarta
- Naisbitt, John. 1995. *Global Paradox*. New York: Avian Books, hlm. 191
- Petras, James.&Veltmeyer, Henry. 2001, *Globalization Unmasked. Imperialism in 21st Century*, oleh, Zed Books, London. Page 11.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. 2010. *Ancaman Keamanan Transnasional di ASEAN: Upaya Indonesia Menanggulangi dan Mencegah Migrant Smuggling*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Rahman, Agus. R. dkk. 2007. *Globalisasi dan Gerakan Anti Globalisasi di Indonesia*. P2P LIPI. LIPI Press, Jakarta.
- Retnowati, Endang. (ed). 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia (Perspektif kajian Budaya)*. Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Maju di Kota Mataram, NTB. PMB LIPI, Jakarta.
- Robinson, William. I. 1996. *Promoting Polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony*. New York: Cambridge University Press.
- Rosegrant, Mark dkk. 2002. “World Water and Food to 2025”. Washington (DC): International Food Policy Research Institute.
- Rosegrant, Mark. dan Cline, Sarah. 2003. Global Food Security: Challenges and Policies”. *Science*, 302: page 1917-1919.
- Saiman. 2009. Tantangan Budaya Nasional Di Era Globalisasi. *Jurnal Bestari Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol 42 (2009) diunduh dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/105> 12/15/2011 10:02:32 PM

- Soesastro, Hadi. 2004. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Economics Working Paper Series. <http://www.csis.or.id/papers/wpe082> diunduh 12/13/2011 6:17:08 PM, Hlm. 8
- Siswanto. 2010. Masyarakat Eropa Dalam Merespon Globalisasi Diteropong Dari Kajian Wilayah. dalam PSDR LIPI. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hal 1-8). Paper dalam proses penerbitan.
- Thee Kian Wie. 2010. Globalisasi Ekonomi Dalam Perspektif Kajian Wilayah dalam PSDR LIPI. 2010. *Term of Reference Diskusi Panel Globalisasi Dalam Perspektif Kajian Wilayah*, Kamis, 5 Agustus 2010, Gedung Widya Graha LIPI Lantai V, Jakarta (Hlm 1-8). Paper dalam proses penerbitan.
- Tim Peneliti P2E LIPI. 2010. *Liberalisasi, Dominasi Asing dan Kemiskinan Di Indonesia*. Makalah Seminar IPSK - Refleksi Akhir Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010. Tidak di terbitkan.
- Waters, Malcom. 1995. *Globalization*. London: Routledge dalam Ibid. Amri, Ulil. 2010. Hlm 2.
- Wiranta, Sukarna. 2007. *Kemiskinan dan Pemiskinan Global*. P2E LIPI. LIPI Press, Jakarta
- Yani, Yanyan Mochamad. 2010. *Dinamika Hubungan Internasional Dan Indonesia*. Hlm 3-4

Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik: Perspektif Kajian Wilayah¹

Siswanto

Abstract

This paper is intended as an attempt to understand the dynamics of European society, related to the issue of globalization, in particular the issue of political globalization. Globalization in political issues in Europe caused to the Democratization of Eastern Europe. Before the wave of democratization, Eastern Europe is the Communist political order and after that into a liberal democracy. The problem is how to learn from the process of political globalization in the region properly. The approach used in this paper is the analysis of the facts and inter-disciplinary study. Achieved the result is an understanding that the event democratization in Eastern Europe is valuable lessons for the nations of the World and the conclusion is that occurred democratization in Eastern Europe should became the reference of the process of Indonesia reform.

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Eropa merupakan pelopor peradaban dan Ilmu Pengetahuan. Khususnya masyarakat Yunani kuno, mereka merupakan sekumpulan manusia yang melahirkan filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Sokrates. Mereka mewariskan peradaban agung yang sampai sekarang hal itu masih relevan dan mewarnai kehidupan manusia. Mereka telah meletakkan dasar-dasar tatanan pemerintahan yang benar dan sains yang menyejahterakan manusia.

Selain dari itu, masyarakat Eropa juga pernah mengalami periode Pencerahan atau *Aufklärung* yang merubah total kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupan, semula mereka didominaasi oleh kekuasaan, doktrin-doktrin agama, mitos-mitos masyarakat, lalu dengan datangnya era reformasi kemudian dibimbing oleh pandangan-pandangan ilmu pengetahuan dan rasio yang cerdas.

Akibat tumbuhnya ilmu pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan ekonomi khususnya sektor industri selanjutnya, Eropa mengalami Revolusi Industri yang telah merubah wajah kehidupan ekonomi dan sosial di sana.

1 Makalah ini disampaikan pada Seminar IHT PSDR-LIPI, Globalisasi ditinjau dari Kajian Wilayah, tanggal 5 Agustus 2010

Proses produksi dan transportasi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan berubah menggunakan tenaga mesin. Akibat perubahan dalam faktor produksi ini, efisiensi dan jumlah produksi mengalami peningkatan secara signifikan.

Sekarang Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani walaupun baru-baru ini mengalami keguncangan yang hebat. Setidaknya terdapat segi-tiga kekuatan ekonomi internasional, yaitu AS, Jepang, dan Uni Eropa. Tiga pilar ekonomi ini mendominasi tata ekonomi internasional. Namun demikian, terdapat kekuatan ekonomi pengimbang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina. Salah satu indikator kuatnya ekonomi Eropa adalah kuatnya mata uang Euro. Mata uang ini merupakan alat pembayaran yang cukup kuat nilainya, walaupun sempat mengalami guncangan akibat krisis ekonomi yang melanda Eropa khususnya Spanyol. Keberadaan negara-negara Eropa juga memiliki posisi yang kuat atau memiliki *power* yang besar dalam forum WTO. Akibatnya, Eropa menentukan arah perdagangan dunia baik yang menyangkut tarif maupun pasar bebas.

Selanjutnya, Uni Eropa (UE) sebagai kekuatan politik yang berpengaruh di dunia. UE adalah negara-negara berdaulat yang berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini pertama diwacanakan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tanggal 9 Mei 1950 yang mengkhawatirkan terulangnya perang yang memporakporandakan Eropa (Perang Dunia ke-2). Wacana ini mendapat dukungan negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, Italia, Belanda, Belanda, Luksemburg. Realisasi dari gagasan ini adalah terbentuknya masyarakat batu bara dan baja Eropa sebagai cikal bakal UE pada tahun 1951 di Paris. UE dan AS dewasa ini boleh dibilang mengontrol sistem internasional Pasca Perang Dingin. Kita menyaksikan berbagai persoalan di dunia melibatkan peran kekuatan negara-negara Eropa atau UE untuk mencapai penyelesaian. Misalnya saja penyelesaian konflik Timur Tengah melibatkan kekuatan Eropa disamping kekuatan AS dan Rusia. Pendeknya Eropa menjadi mitra AS dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Sementara itu, globalisasi diartikan sebagai pergerakan masyarakat, barang, jasa, informasi, dan ide yang melampau batas-batas negara. (Hodson: 1978,102) Globalisasi secara tidak langsung mengurangi sekat-sekat antar negara. Berbagai unsur-unsur di atas bergerak dari suatu negara ke negara lain secara bebas dan cepat khususnya informasi. Segala bentuk informasi mudah merambah dari negara ke negara lain. Jadi, suatu kejadian yang terjadi di suatu negara dengan cepat diketahui di negara lain. Bahkan, efeknya dapat dirasakan di negara lain. Seolah-olah bumi menjadi sempit. Penduduknya merupakan suatu kesatuan yang saling berinteraksi atau berhubungan satu sama lain.

Globalisasi suatu fenomena yang luas, namun dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, globalisasi dibidang ekonomi bisa dilihat dalam isu perdagangan bebas. Rezim perdagangan dunia WTO membicarakan soal kebijakan perdagangan internasional, khususnya perdagangan bebas. Produk barang dan jasa diharapkan mudah bergerak dari negara lain tanpa memperoleh hambatan baik tarif maupun non-tarif. Globalisasi dibidang politik dan ideologi bisa dipahami dari berkembang isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Semangat demokratisasi yang terjadi disuatu kawasan bisa menular ke kawasan lain. Isu demokratisasi di Eropa Timur dan Tengah (ETT) menumbangkan rejim komunis yang otoriter satu demi satu. Globalisasi dibidang budaya bisa dikaitkan dengan gaya hidup yang ada di suatu kawasan diikuti oleh suatu masyarakat di kawasan lain. Misalnya budaya populer AS diikuti oleh sebagian masyarakat di tempat lain. Hal ini bisa dilihat dari maraknya masyarakat menikmati McDonald, Coca Cola, Kintucky Fried Chicken. Mode pakaian bergaya *Blue Jeans* yang disukai kaum muda AS seperti Levi's juga disenangi oleh masyarakat di negara lain.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami dinamika masyarakat Eropa yang terkait dengan isu global dalam hal ini demokratisasi dilihat dari perspektif Kajian Wilayah. Respon masyarakat Eropa terhadap isu-isu dalam konteks global tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain atau guna mengambil hikmahnya. Segi-segi positif dari masyarakat di negara-negara Eropa bisa menjadi teladan bagi negara lain seperti Indonesia, sebaliknya segi-segi negatifnya justru menjadi peringatan untuk dapat dihindari. Hal penting agar aspek negatif itu tidak terjadi pada negara kita. Pengalaman negara lain menjadi penting sejauh dapat memanfaatkannya dengan baik sebagai cermin untuk memperbaiki keadaan.

Eropa sebagai kekuatan dunia yang sangat berpengaruh sehingga beberapa permasalahan yang melanda kawasan itu perlu dipahami khususnya dalam konteks globalisasi dalam bidang politik. Dipenghujung abad ke-20, masyarakat dunia dikejutkan oleh merambatnya demokratisasi ke ETT yang datangnya justru bukan dari Eropa Barat yang terkenal sebagai pelopor demokrasi, tetapi dari Uni Soviet atau Rusia yang sebelumnya dikenal sebagai pimpinan negara komunis dengan tatanan politik otoriternya. Sehubungan dengan hal itu, sebuah pertanyaan yang relevan untuk diajukan yaitu bagaimana sebenarnya masyarakat Eropa merespon munculnya isu demokratisasi?

Studi Wilayah Eropa

Terlebih dahulu perlu dikemukakan yang dimaksud dengan studi wilayah dalam tulisan ini. Studi wilayah di sini adalah studi wilayah internasional atau studi kawasan internasional karena untuk membedakan studi kawasan

yang di kembangkan di dalam negeri. Misalnya, studi kawasan pedesaan, studi kawasan daerah terpencil, studi kawasan daerah tertinggal, dan studi kawasan daerah perbatasan yang belakangan ini ramai dilakukan, seperti studi wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Timur, Papua, dan NTT.

Selanjutnya, studi wilayah disini diartikan atau didefinisikan sebagai usaha untuk mempelajari, meneliti, dan memahami suatu wilayah internasional secara mendalam dan bersungguh-sungguh (Alfian: 1980,1). Berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah yang diteliti itu perlu dipelajari secara cermat. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya meneliti dan memahami dari aspek politik saja, melainkan juga dari segi-segi lain seperti kebudayaan, ekonomi, sejarah, pendidikan, geografi, sosial, militer, penduduk, dan agama. Kehidupan masyarakat tersebut dipelajari secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja dari kehidupan masyarakat tersebut. Dengan demikian, hasilnya adalah suatu hasil kajian atau laporan penelitian yang utuh.

Dalam hal ini, perkembangan studi wilayah internasional berhubungan erat dengan perkembangan ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini, studi wilayah internasional mendapat dukungan dari disiplin antropologi, sosiologi, ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi. Studi wilayah internasional menggunakan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Keberadaan studi wilayah internasional sebagai perspektif untuk memahami suatu kawasan menjadi semakin komprehensif dan tajam karena memanfaatkan alat bantu analisis dari ilmu sosial dan kemanusiaan. Studi wilayah semakin lama semakin berkembang menjadi suatu kajian yang memiliki arti penting dalam menjelaskan berbagai persoalan di berbagai wilayah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kajian wilayah dapat dikatakan suatu studi yang bercirikan interdisiplin. Dalam pendekatan interdisiplin, masalah sosial didekati, dianalisis dan dikaji dari berbagai disiplin ilmu sosial dan kemanusiaan secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan (Sumaatmaja, 1980: 123). Masalah sosial yang kompleks tidak cukup memadai jika hanya dikaji dari satu disiplin ilmu saja. Pendekatan interdisiplin menjadi solusi alternatif yang bisa digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah kompleks yang timbul di masyarakat. Misalnya, dinamika masyarakat terkait dengan soal kemiskinan, pendidikan, pengangguran, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan Uni Eropa (UE). Pembicaraan soal wilayah Eropa adalah tidak realistis jika mengabaikan keberadaan UE sebagai institusi yang dominan di Eropa

bahkan di dunia. Sedangkan, suatu kajian yang difokuskan terhadap persoalan sosial di suatu negara Eropa maka objek materialnya adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan Eropa (Kajian UE) dan isu-isu yang timbul di negara-negara Eropa.

Globalisasi Politik

Ada beragam globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi, budaya, dan politik. Globalisasi politik terjadi ketika suatu isu politik berubah menjadi suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik ditingkat regional maupun global. Pada dekade 1990-an, Di Eropa sempat terjadi globalisasi politik, yaitu ketika gelombang demokratisasi melanda Eropa Tengah dan Timur (ETT) dan mendorong perubahan tatanan politik disana.

Glasnost dan Perestroika sebagai bola api yang liar. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa perubahan tidak hanya di Rusia, namun di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Namun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini.

Fenomena ini dipahami sebagai gelombang demokratisasi yang menjatuhkan pemerintahan di ETT. Satu demi satu pemerintahan komunis di ETT tumbang karena mendapat tekanan dari rakyatnya yang menuntut pemerintahan demokratis. Disamping itu, Gorbachev juga mengisyaratkan perlu menerima aspirasi rakyat yang berkembang di ETT. Peralihan dari tatanan komunis kepada demokrasi secara umum tidak terlalu bergejolak, kecuali di Rumania. Pemerintah komunis yang berkuasa sendiri yang melakukan pembenahan internal untuk menuju tatanan demokrasi. Di lain pihak, rakyat menerima transformasi politik ini dengan baik pula sehingga tidak perlu jatuh korban yang terlampau banyak dalam transisi politik ini. Transisi politik ini umumnya terjadi antara tahun 1989 sampai dengan 1991.

Dalam kurun waktu waktu 3 tahun masyarakat yang tinggal di ETT telah merespon isu demokratisasi. Hal ini tidak terlepas dari aspek eksternal yaitu

Gorbachev memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi di wilayah ini. *Glasnost* dan *Perestroika* juga disebarakan ke kawasan ETT sebagai upaya mendorong gelombang demokratisasi. Berbagai negara ETT yang berada di bawah hegemoni Rusia mau tidak mau mengikuti garis kebijakan tersebut. Sedangkan aspek internalnya adalah perilaku politik masyarakat di ETT yang mendukung kebijakan transformasi politik tersebut secara realistis. Terkesan terjadi suatu kesepakatan politik antara penguasa dan rakyat di ETT, sehingga transisi politik dari tatanan otoriter menuju tatanan demokratis berjalan dengan aman.

Namun demikian, gelombang demokratisasi bukan berjalan tanpa masalah. Demokratisasi juga memiliki kendala-kendala yang menghambat demokratisasi itu sendiri. Di Rusia ide pembaruan mendapat penolakan dari masyarakat pendukung Komunisme. Mereka adalah kaum konservatif yang lebih menyukai tatanan Komunisme atau Marxisme-Leninisme tetap menjadi sistem politik di negaranya. Kekuatan masyarakat Rusia yang berpaham demikian jumlahnya cukup signifikan dan memiliki wakil di *Duma* yaitu Parlemen Rusia. Salah satu peristiwa yang cukup bersejarah ketika Gorbachev diculik dan dibawa keluar kota Moscow oleh sejumlah orang. Hal ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan atau para pihak yang anti terhadap kebijakan-kebijakan politiknya atau pihak-pihak yang mengincar posisinya selaku pemimpin negara adidaya itu. Sampai akhirnya, Boris Yeltsin menemukan dirinya dan mengamankan atau membawanya kembali ke Moscow. Akhirnya, Yeltsin menggantikan dirinya dan meneruskan upaya pembaruan di negara itu.

Kebijakan Presiden Gorbachev membawa dampak signifikan dalam kehidupan politik Uni Soviet. Uni Soviet berubah menjadi sejumlah negara berdaulat, namun demikian Rusia menjadi pewaris utama negara adidaya itu. Negara-negara baru muncul seiring dengan bubarnya Uni Soviet, misalnya; Georgia, Ukraina, dan sejumlah negara Asia Tengah yang dahulu juga di bawah Soviet seperti Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan lainnya. Pola hubungan sesama bekas Uni Soviet ini sebagian bersifat konflik karena perebutan wilayah. Sedangkan hubungan, Rusia dengan bekas Uni Soviet sebagian juga bersifat konflik karena Rusia mendukung sejumlah gerakan-gerakan anti pemerintah di berbagai negara bekas Uni Soviet itu. Di samping itu, hal ini juga dipicu oleh masalah-masalah ekonomi.

Sedangkan, demokratisasi di ETT dihadapkan pada kekuatan lama yang berganti "baju baru." Seperti di ketahui, di ETT terjadi transformasi politik yang dilakukan oleh penguasa komunis sendiri. Partai Komunis yang berkuasa di ETT karena terjadi transformasi menyebut dirinya menjadi Partai Sosialis. Mereka memang mendukung terjadinya perubahan tatanan politik itu, namun demikian sikap-sikap konservatifnya belum sama sekali hilang. Akibatnya, sering terjadi konflik antara kekuatan konservatif yang terdiri dari

sisa-sisa Partai Komunis melawan kekuatan demokratis yang mencerminkan gerakan pembaruan.

Sisa-sisa kekuatan komunis masih eksis dalam kehidupan politik di ETT. Dalam suatu pemilu mereka memilih dan menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakilnya. Dalam hal ini, mereka memiliki suara dan kekuatan politik, walaupun kekuatannya tidak sekuat saat sebelumnya. Ketika kekuatan politik pro-demokrasi gagal dalam pembangunan, keberadaan kekuatan komunis bukan mustahil menjadi menguat dan bisa mencuri perhatian masyarakat di ETT. Namun demikian, hal ini sebenarnya dipandang positif. Sejauh program-program mereka mencerminkan perubahan dan semangat demokrasi. Keberadaan sisa-sisa kekuatan komunis bisa menjadi penyeimbang kekuatan pro-demokrasi. Akibatnya, diantara kedua kekuatan terjadi saling kontrol dan koreksi yang menyempurnakan kekurangan-kekuarangan satu sama lain.

Bulgaria adalah salah satu negara di ETT yang mengalami transformasi politik. Transformasi di Bulgaria tidak terlepas dari sikap elit politik komunis yang berkuasa. Tudor Zhivkov seorang pemimpin Bulgaria yang memberi ruang kepada gelombang demokratisasi setelah berkuasa secara otoriter lebih dari 3 dekade. Gelombang demokratisasi telah mendorong Zhivkov mentolerir demonstrasi di Sofia, Ibukota Bulgaria. Zhivkov sebagai Sekjen Partai Komunis dan Ketua Dewan Negara mendominasi struktur politik di Bulgaria, namun akhirnya 10 November 1989 dia turun dari tampuk kepemimpinan di Bulgaria. Zhivkov dipandang sudah tidak lagi cocok dengan tuntutan rakyat Bulgaria yang menginginkan pemimpin yang lebih demokratis. Zhivkov menolak upaya demokratisasi yang tidak sejalan dengan Sosialisme sehingga menimbulkan ketidaksukaan rakyat kepada dirinya.

Selanjutnya, kepemimpinan Zhivkov dilanjutkan oleh Petur Mladenov. Mladenov sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Bulgaria. Mladenov adalah pemimpin komunis yang mencoba menampung semangat demokratisasi rakyat Bulgaria. Mladenov antara lain membubarkan Polisi Rahasia Bulgaria pada 7 Februari 1990. Polisi Rahasia ini sering berhadapan dengan aktivitis atau para pemimpin demonstran. Kebijakan Madenov mendapat dukungan rakyat Bulgaria, bahkan juga mendapat pujian dari masyarakat internasional khususnya masyarakat Eropa. Langkah yang ditempuh Mladenov dengan membubarkan Polisi Rahasia ini dipandang sejalan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Namun demikian, Mladenov terjebak pada tindakan yang tidak demokratis. Dia membubarkan demonstrasi dengan paksa yaitu menggunakan Tank pada tanggal 18 Desember 1989. Hal ini direkam oleh video dan dijadikan barang bukti bahwa Mladenov tidak konsisten dengan semangat demokratisasi. Karena terbukti bersalah, Mladenov akhirnya pada 1 Agustus 1990 mengundurkan diri dan dia digantikan oleh Zheliu Zhelev pemimpin pertama di Bulgaria yang berasal bukan dari kalangan komunis. Dia adalah

pemimpin *the Union of Democratic Force* (UDF) yang menjadi salah satu kekuatan penting dalam transformasi di Bulgaria. *Grand National Assembly* mengangkat Zhelev menjadi Presiden Bulgaria, namun Wakil Presiden ialah Atanas Semerdjiev, seorang Jenderal dan tokoh dari kalangan komunis. Nampaknya, konfigurasi politik yang dibangun di era transisi adalah keseimbangan antara kekuatan pro-demokrasi dan komunis.

Selanjutnya, dari sisi ekonomi hal penting dari transformasi di Bulgaria adalah kebijakan privatisasi. Privatisasi di Bulgaria bisa dikatakan berjalan lambat. Kondisi ini terkait dengan sikap Partai Sosialis Bulgaria yang bersikap konservatif dalam soal kebijakan privatisasi tersebut. Konsekuensinya, ini kurang menarik minat para investor dalam dan luar negeri, lalu akibat lebih lanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kebijakan privatisasi di Bulgaria mengarah kepada 1). Arah kebijakan privatisasi untuk perbaikan sektor pertanian, industri kecil, dan perumahan, 2). Sasaran privatisasi usaha kecil meliputi mini market dan pompa bensin, 3). Konsep yang dipakai dalam privatisasi adalah *one by one privatisation*. Privatisasi dilakukan dari perusahaan kecil, menengah, baru perusahaan besar. (Schwartz, 1995: 32). Dilain pihak, investor biasanya lebih tertarik kepada perusahaan-perusahaan menengah dan besar.

Program privatisasi di Bulgaria dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala-kendala itu, sebagai berikut:

(1). Masih kuatnya pengaruh komunis aatau kendala ideologis. Pad Pemilu 1990 Bulgaria Sosialis Party (BSP) mendapat 47 %, the Union Democratic Force (UDF) mendapat 36,20 % dan sisanya dibagi sejumlah partai. (Bell:1989,20) Dengan demikian, kekuatan kubu sosialis yang merupakan renkarnasi kekuatan komunis masih kuat di Parlemen. Konfigurasi politik ini menjadi kendala dalam program privatisasi karena sikap konservatif BSP.

(2). Produk hukum yang tidak kondusif untuk terlaksananya privatisasi atau disebut juga kendala struktural. Produk hukum yang mengatur soal privatisasi adalah dekret No. 56 tahun 1990 yang membatasi modal asing dalam perbankan di Bulgaria. Modal asing maksimal hanya boleh memiliki saham 50 % di perbankan Bulgaria. Undang-undang Privatisasi tahun 2003 (PPPC Act) juga hampir sama semangatnya dengan dekret tersebut yaitu penjualan saham disuatu perusahaan tidak boleh melebihi angka 50 %. Dengan demikian Pemerintah Bulgaria tidak ingin kehilangan kontrol atas peusahaan-perusahaan di disana sehingga terjadi pembatasan atas peran swasta di berbagai perusahaan. Hal ini membuat investor kurang berminat menanamkan modalnya di sektor perbankan.

Sementara itu, Tembok Berlin menjadi sasaran masyarakat pejuang demokrasi di Eropa. Tembok Berlin dipandang sebagai simbol dari komunisme. Dengan demikian, Tembok Berlin tidak disukai oleh rakyat Eropa khususnya

rakyat Jerman sehingga mereka terpancing untuk menjebolnya. Tembok itu mengingatkan masyarakat kepada kekejaman rejim komunis. Disamping itu, Tembok ini dinilai tidak relevan dengan semangat demokratisasi yang melanda Eropa.

Dari segi historis, Tembok Berlin dibangun tahun 1948 dan pembangunan ini dipandang sebagai awal terbelahnya Eropa secara ideologi. Pembangunan ini boleh dikatakan tanda dimulainya Perang Dingin di Eropa yang kemudian menjalar di berbagai kawasan di dunia. Perang antara komunisme melawan liberalisme. Rusia merasa berkepentingan menguasai Eropa Timur. Negara ini beralasan negara ini tidak ingin kembali mendapat serangan dari Jerman dikemudian hari karena sudah mendapat serangan Jerman sebanyak 2 kali. Kebijakan Rusia ini sebenarnya bertentangan dengan Konferensi Yalta 1945 yang menjanjikan masa depan kawasan ETT akan ditentukan oleh Pemilu yang demokratis. Namun kenyataannya, Jerman Timur dan negara ETT lainnya dijadikan daerah penyangga dari ekspansi Jerman.

Pembangunan Tembok Berlin bukan hanya pembagian atas wilayah Jerman, tetapi hal ini sebagai fenomena semakin menguatnya konflik antara AS dan Rusia.

Ketegangan politik antara AS dan Rusia sudah mulai terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Pemimpin kedua negara saling melontarkan pernyataan yang bernada perumusuhan karena adanya saling tidak percaya diantara *The Big Three* (Rusia, AS, dan Inggris). Misalnya saja Stalin menyatakan bahwa dunia tidak akan damai sejauh tatanan ekonomi internasional dikuasai oleh Kapitalisme. Pernyataan ini memprovokasi pihak pemimpin AS. Sebaliknya, Presiden Truman meyakini bahwa demokrasi dan kebebasan akan terancam dengan semakin meluasnya ekspansi Komunisme. Pembangunan Tembok Berlin ini juga mencerminkan blokade Rusia terhadap masyarakat yang tinggal di Jerman Barat yang merupakan negara kalah perang dan menjadi daerah pengaruh AS dan sekutunya. Wajar saja AS dan sekutunya mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menembus blokade atau semacam embargo ekonomi kepada masyarakat di kawasan itu. AS dan sekutunya melakukan suplai kebutuhan pokok untuk masyarakat Jerman Barat. Upaya penerobosan blokade ini dilakukan dengan penerarahan pesawat udara untuk menerjunkan berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan di wilayah Jerman Barat.

Di lain pihak, Jerman Barat berada di bawah pengaruh AS. Jerman Barat menerapkan tatanan sosial-politik prinsip-prinsip demokrasi liberal. Jerman Barat menetapkan ibukota atau pusat pemerintahannya adalah Bonn. Dalam Perang Dingin, Jerman Barat merupakan bagian penting dari strategi militer AS. Di negara ini digelar sejumlah peluru kendali berhulu ledak nuklir. Jerman Barat bagian penting dari *Containment Policy* di Eropa yang tujuannya untuk mencegah meluasnya ekspansi Komunisme. Dalam rangka

melaksanakan *Containment Policy* ini AS dan sekutunya mengembangkan NATO dan *Marshall Plan*. NATO adalah aliansi militer AS dan negara-negara Eropa Barat, sedangkan *Marshall Plan* dukungan ekonomi AS kepada Eropa Barat yang hancur karena Perang Dunia ke-2.

Jebolnya tembok Berlin pada tahun 1989 sebagai simbol tumbangya Komunisme. Masyarakat di Jerman Timur maupun Jerman Barat menjebol Tembok Berlin sebagai upaya memerangi simbol-simbol komunisme di Jerman. Tembok Berlin dibangun atas keinginan Rusia yang menjadi simbol pemimpin komunis dunia. Di samping itu, masyarakat Jerman Barat juga ingin kembali bersatu dengan masyarakat Jerman Timur karena selama ini mereka dipisahkan oleh Tembok Berlin. Di era Perang Dingin Tembok Berlin dijaga dengan ketat oleh pasukan Jerman Timur. Hal ini untuk mencegah menyeberangnya warga Jerman Timur ke Jerman Barat karena kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan adalah warga Jerman Timur. Masyarakat di Jerman Timur kehilangan hak-haknya sebagai individu selama di bawah rejim komunis. Mereka memandang pendobrakan Tembok Berlin sebagai peluang untuk mengembalikan hak-hak individu baik hak politik maupun hak ekonomi. Mencari kehidupan yang lebih baik di Jerman Barat menjadi impian dari masyarakat Jerman Timur. Bantuan Pemerintah Jerman Barat untuk menata kehidupan mereka juga merupakan sesuatu dambaan. Warga Jerman Timur tentu juga berharap ingin hidup sejahtera seperti saudara-saudaranya yang tinggal di Jerman Barat. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang sangat berbeda antara kedua negara menjadi alasan penting untuk bergabung dengan Jerman Barat.

Masyarakat Eropa meyakini jebolnya Tembok Berlin sebagai kemenangan demokrasi atas tirani. Dalam tatanan komunis, individu tidak memiliki hak-hak politik secara bebas untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa. Rakyat tidak bisa mengartikulasikan kepentingan politiknya. Disamping itu, individu-individu juga tidak memiliki hak untuk mengembangkan usaha-usaha dibidang ekonomi karena kewenangan pengelolaan sektor ekonomi baik barang maupun jasa berada ditangan pemerintah. Setelah Tembok Berlin jebol, masyarakat Berlin bebas menyampaikan aspirasi politiknya karena tatanan sosial-politiknya menjadi demokrasi. Selanjutnya, kendali sosial ekonomi berada ditangan Jerman Barat sehingga individu-individu dijamin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan usahanya di Berlin. Pendeknya, sesudah jebolnya Tembok itu masyarakat Jerman Timur hidup dalam tatanan yang demokratis atau hidup dalam suasana bebas dari ketakutan.

Catatan Penutup: Mengkaji Eropa untuk Indonesia

Studi wilayah Eropa adalah suatu kajian terhadap dinamika sosial yang

terjadi di wilayah Eropa secara keseluruhan dan kajian terhadap dinamika sosial yang terjadi di negara-negara Eropa. Ketika suatu kajian dilakukan terhadap dinamika sosial di Eropa secara keseluruhan, objek materialnya atau objek telaaahnya adalah persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan Uni Eropa (UE). Sedangkan, suatu kajian yang difokuskan terhadap persoalan sosial di suatu negara Eropa maka objek materialnya adalah persoalan-persoalan di masyarakat dan kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Kajian ini lebih sempit sifatnya karena diarahkan kepada persoalan-persoalan sosial yang timbul di negara Eropa saja. Dengan demikian, studi wilayah Eropa dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang timbul di kawasan Eropa (Kajian UE) atau kajian makro dan isu-isu yang timbul di negara-negara Eropa atau kajian mikro dengan kata lain Kajian wilayah Eropa terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kajian institusional atau kelembagaan dan kajian negara.

Masyarakat Eropa menyikapi isu globalisasi politik atau isu demokratisasi dengan cepat dan berhasil. ETT yang tadinya berpaham komunis berubah menjadi demokratis. *Glasnost dan Perestroika* menjadi inspirasi dari demokratisasi di ETT. Terpilihnya Presiden Michael Gorbachev membawa perubahan tidak hanya di Rusia, namun juga di ETT. Seperti diketahui, ETT merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung Perang Dingin. Rusia menjadikan beberapa negara di wilayah ini seperti Polandia, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, dan Slovak penganut paham Komunisme. Namun demikian, Presiden Gorbachev melakukan program *Glasnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi) di Rusia. Program ini membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, gaung dari pembaruan atau demokratisasi ini sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ini dari komunis menjadi demokrasi. Suatu catatan, Uni Soviet atau Rusia yang mengkomunikasikan ETT, namun Rusia juga yang mendemokrasikannya. Namun demikian, peran rakyat di kawasan ini juga besar dalam demokratisasi itu

Demokratisasi di EET menjadi pembanding dari proses reformasi di Indonesia. Transformasi di ETT hampir sama dengan reformasi di Indonesia. Namun demikian, penegakan hukum di Bulgaria bagi mantan penguasa komunis yang bersalah sungguh-sungguh ditegakan. Misalnya saja Tudor Zhikov dipenjara selama 9 tahun. Padahal, Zhikov mantan orang nomor 1 (satu) di negaranya, namun tidak ada istilah diampuni atau dimaafkan. Sedangkan di Indonesia Presiden Soeharto dan keluarganya tidak mendapat sanksi hukum atas kesalahan-kesalahannya di waktu yang lalu. Oleh karena itu, Kelemahan dan kelebihan di reformasi di ETT menjadi bahan pelajaran yang berharga untuk menyempurnakan reformasi di Indonesia. ●

Referensi

- Alfian. 1990. *Permasalahan Studi Wilayah Internasional*. Lembaga Riset Kebudayaan Nasional-LIPI.
- Bell, John D. 1989. "Bulgaria" dalam Stephen White, *Handbook of Reconstruction in Eastern Europe and The Soviet Union*. London: Longman.
- Hodson, Joel. 2000. "Globalization and Nationalism in the United States: A Historical Perspective" dalam Leo Suryadinata (ed.). *Nationalism and Globalization*. Singapura: ISEAS.
- Sumaatmaja, Nursid. 1980. *Perspektif Studi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Schwartz, Gerd. 1995. "Privatization in Easter Europe" dalam Paul cook, Et.al *Privatization Policy and Performance*. Manchester: Prentice Hall.
- The European Union and Indonesia: Building Closer Relations*. Delegation of the European Commission. Jakarta.

TENTANG PARA PENULIS

Mohamad Rosyidin adalah staf pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang. Bisa dihubungi di: *mohamad.rosyidin@gmail.com*

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar adalah peneliti pada ASEAN Studies Center, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio-Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Bisa dihubungi di: *ahmad.rizky.m@mail.ugm.ac.id*

Achmad Sunjayadi adalah staf pengajar Program Studi Belanda dan anggota Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bisa dihubungi di: *achmad.sunjayadi@ui.ac.id* / atau *achmad.sunjayadi@gmail.com*

Paulus Rudolf Yuniarto adalah peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI). Bisa dihubungi di: *rudolfyuniarto@gmail.com*

Siswanto adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Bisa dihubungi di: *siswanto@yahoo.com*